



PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-PPAS)

**KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2022**

I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS	3
II.RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	9
2.1. Rencana Pendapatan Daerah	9
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah	10
2.1.2. Pendapatan Transfer	11
2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13
2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah	13
Tabel 2.1	14
III. PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	15
3.1. Perubahan Masing-masing Urusan Perangkat DAerah	15
Tabel 3.1	17
3.2. Perubahan PPAS Berdasarkan Program dan Kegiatan	23
Tabel 3.2	24
Tabel 3.3	32
Tabel 3.4	52
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	52
Tabel 4.1	52
3.3. Belanja Daerah	305
Tabel 4.2	306
3.4. Pembiayaan	307
Tabel 5.1	308
IV. PENUTUP.....	309

KABUPATEN BANDUNG BARAT
PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBD Murni bergeser menjadi Perubahan APBD di suatu tahun berjalan merupakan hal yang lumrah karena perubahan disusun dalam rangka untuk mengintegrasikan dan menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Namun perjalanan APBD periode dimaksud mengalami hal-hal yang berbeda dari biasanya, beberapa penyebab yang mempengaruhinya antara lain :

1. Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang harus disesuaikan seperti kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR), Gaji Ketiga Belas, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pengaruh terbesar yaitu adanya kebijakan refocussing anggaran dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang harus diakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2022;
2. Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
3. Percepatan pelaksanaan APBD T.A. 2022 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease dan Percepatan Pemulihan Ekonomi;

4. Penyediaan dan percepatan penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari APBD;
5. Adanya program kegiatan yang harus dilaksanakan pada Tahun 2022 namun belum terakomodir dalam APBD T.A. 2022 sehingga mengakibatkan perlu dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
6. Adanya perubahan terhadap estimasi pendapatan daerah seperti berasal dari penerimaan alokasi bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi dan dari Pendapatan Asli Daerah;
7. Adanya Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (Silpa) Tahun Anggaran 2021 yang harus disesuaikan dengan hasil Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran di Tahun 2021;
8. Ditetapkan SK. Gubernur Jawa Barat Nomor 53/KU.01.03.08/BPKAD tanggal 5 Januari 2022 tentang Rincian Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota T.A. 2022 dan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Pemda Kabupaten Bandung Barat T.A. 2022;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2022 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;
10. Tunjangan Hari Raya untuk Pekerja Tidak Tetap (THR PTT);
11. Pengalihan gaji Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K);
12. Pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI); dan
13. Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Ternak serta Kesiapan Hewan Kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H.

Perubahan saat ini dirasakan oleh Kabupaten Bandung Barat disebabkan oleh kondisi Pendapatan yang terdampak dari adanya Pandemi Covid-19, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pendapatan Transfer. Namun apapun situasinya,

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2022 tetap disusun untuk dijadikan sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA SKPD) serta Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA SKPD) Tahun Anggaran 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS

Tujuan penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA SKPD) serta Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA SKPD) Tahun Anggaran 2022.

Program dan Kegiatan tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan PPAS APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);
10. Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

- Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah

- tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2009);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4).
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E).
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D).
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 5 Seri A Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat 6/288/2021).

42. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 9 Seri D).
43. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 22 Seri A).

II.RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. Rencana Pendapatan Daerah

Target perubahan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan Kabupaten Bandung Barat dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupatæn Bandung Barat Tahun 2022 adalah Asumsi pengurangan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat pada Perubahan APBD Tahun 2022 adalah sebesar Rp6.666.757.560,00 atau turun 2,02% dari target sebelum perubahan yaitu sebesar Rp2.913.958.280.698,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp2.855.390.706.417,00. Kondisi tersebut disebabkan adanya penambahan penerimaan pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Transfer sebesar Rp42.661.854.990,00 atau sebesar 1,97% dari target sebelum perubahan semula sebesar Rp2.162.665.986.795,00 naik menjadi sebesar Rp2.205.327.841.785,00, dan adanya pengurangan penerimaan pendapatan berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp101.229.429.271,00 atau turun sebesar 13,47 % dari target sebelum perubahan semula sebesar Rp751.292.293.903,00 turuun menjadi sebesar Rp650.062.864.632,00. Sedangkan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah masih tetap nihil.

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari :

a. Hasil Pajak Daerah

Penerimaan Hasil Pajak Daerah pada perubahan direncanakan mengalami pengurangan sebesar Rp17.418.834.221,00 atau turun sebesar 3,61 % dari sebelum perubahan semula sebesar Rp482.286.834.221,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp464.868.000.000,00. Pengurangan tersebut disebabkan adanya pengurangan dari target pajak Hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sedangkan untuk pajak restoran mengalami kenaikan.

b. Hasil Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah pada perubahan direncanakan mengalami pengurangan sebesar Rp16.349.832.047,00 atau turun sebesar 43,48 % dari sebelum perubahan semula sebesar Rp37.603.765.789,00 setelah perubahan turun menjadi sebesar Rp16.349.832.047,00. Pengurangan tersebut disebabkan Target Retribusi Pelayanan Kesehatan bergeser ke Pos Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, sehingga sudah tidak dipungut oleh Dinas Kesehatan melainkan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) baik itu 3 (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun 32 (tiga puluh dua) Puskesmas. Retribusi pelayanan Pasar juga mengalami penyesuaian sehingga di perubahan berkurang target pendapatannya.

Selain itu, adanya pencabutan kewenangan penarikan Retribusi Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) oleh Provinsi Jawa Barat, Retribusi IMB di kecamatan mengakibatkan terjadinya penurunan Retribusi Perizinan Tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami penambahan target penerimaan pendapatan daerah berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp494.842.021,00 atau naik sebesar 100,00% dari target sebelum perubahan semula sebesar Rp494.842.021,00 naik menjadi sebesar Rp989.684.042,00.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp67.955.605.024,00 atau turun 29,43 % dari sebelum perubahan semula sebesar Rp230.906.851.872,00 setelah perubahan turun menjadi sebesar Rp162.951.246.848,00.

2.1.2. Pendapatan Transfer

Target Penerimaan dari Dana Transfer pada perubahan mengalami penambahan sebesar Rp42.661.854.990,00 berasal dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Terdiri dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) serta Dana Desa. Pendapatan Transfer pada Perubahan ditargetkan mengalami penambahan sebesar Rp42.661.854.990,00 atau naik 1,97% dari sebelum perubahan semula sebesar Rp2.162.665.986.795,00 setelah perubahan ditargetkan menjadi sebesar

Rp2.205.327.841.785,00, kenaikan tersebut berasal dari:

- Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH pada Perubahan ditargetkan mengalami penambahan sebesar Rp5.730.993.000,00 atau naik sebesar 7,61% dari sebelum perubahan semula sebesar Rp75.291.472.000,00 setelah perubahan naik menjadi sebesar Rp.81.022.465.000,00.

- Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU tidak mengalami kenaikan, masih tetap sebesar Rp1.012.676.514.000,00.

- Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

DAK Fisik masih tetap, masih tetap sebesar Rp47.940.920.000,00.

- Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)

DAK Non Fisik masih tetap, masih sebesar Rp521.334.737.000,00.

- Dana Desa (DD)

Dana Desa masih tetap, masih sebesar Rp252.779.336.000,00.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Perubahan ditargetkan mengalami penambahan sebesar Rp36.930.861.990,00 atau naik sebesar 14,62% dari sebelum perubahan semula sebesar Rp252.643.007.795,00 setelah perubahan naik menjadi sebesar Rp289.573.869.785,00, terdiri dari:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak ditargetkan

mengalami penambahan sebesar Rp10.011.421.990,00 atau naik sebesar 4,09% dari sebelum perubahan semula sebesar Rp245.064.934.245,00 setelah perubahan naik menjadi sebesar Rp255.076.356.235,00.

- Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp26.919.440.000,00 yang targetnya baru muncul saat perubahan.
- Sedangkan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota masih tetap sebesar Rp7.578.073.550,00.

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan tidak mengalami perubahan, tetap nihil.

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah, Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 rencana penerimaan pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp51.756.309.545,00 atau turun 15,62% dari sebelum perubahan sebesar Rp331.371.304.238,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp279.614.994.693,00.

Berdasarkan rencana penerimaan pada anggaran pendapatan daerah dan anggaran pembiayaan daerah sebagaimana diuraikan diatas, maka jumlah dana tersedia yang dapat dimanfaatkan dalam rangka belanja dan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2022 di Kabupaten Bandung Barat berkurang sebesar Rp110.323.883.826,00 turun sebesar 3,40% semula ditargetkan sebesar Rp3.245.329.584.936,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp3.135.005.701.110,00.

Adapun uraian rincian rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, dapat terlihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	751.292.293.903	650.062.864.632	-101.229.429.271
04.01.01	Pajak Daerah	482.286.834.221	464.868.000.000	-17.418.834.221
04.01.02	Retribusi Daerah	37.603.765.789	21.253.933.742	-16.349.832.047
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	494.842.021	989.684.042	494.842.021
04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	230.906.851.872	162.951.246.848	-67.955.605.024
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	2.162.665.986.795	2.205.327.841.785	42.661.854.990
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.910.022.979.000	1.915.753.972.000	5.730.993.000
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	252.643.007.795	289.573.869.785	36.930.861.990
	JUMLAH PENDAPATAN	2.913.958.280.698	2.855.390.706.417	-58.567.574.281
6	PEMBIAYAAN			
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	331.371.304.238	279.614.994.693	-51.756.309.545
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	190.712.820.661	84.793.235.771	-105.919.584.890
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	140.658.483.577	194.821.758.922	54.163.275.345
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	331.371.304.238	279.614.994.693	-51.756.309.545
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	3.245.329.584.936	3.135.005.701.110	-110.323.883.826

III. PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

3.1. Perubahan Masing-masing Urusan Perangkat DAerah

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) disusun berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA).

Berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD yang ditetapkan dan usulan perubahan dari SKPD terdapat perubahan pada :

1. Urusan wajib Pelayanan Dasar meliputi :

- Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan);
- Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan);
- Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang);
- Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman);
- Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah); dan
- Urusan Sosial (Dinas Sosial).

2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

- Urusan Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja);
- Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa);
- Urusan Pangan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan);
- Urusan Pertanahan (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman);

- Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Dinas Lingkungan Hidup);
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa);
- Urusan Komunikasi dan Informatika (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik);
- Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah);
- Urusan Statistik (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik);
- Urusan Kebudayaan (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan);
- Urusan Kearsipan (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan).

3. Urusan Pilihan

- Urusan Pariwisata (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan);
- Urusan Pertanian (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan Dinas Perikanan dan Peternakan);
- Urusan Perdagangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan); dan
- Urusan Perindustrian (Dinas Perindustrian dan Perdagangan); dan

4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

- Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan);
- Pengawasan (Inspektorat Daerah);
- Perencanaan (Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah);
- Keuangan (Badan Keuangan dan Aset Daerah); dan
- Kepegawaian (Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia).

Secara jelas Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Sakip		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Nilai SAKIP DISKOPUKM		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			KoperasiPersentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi%		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Jumlah kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Pertumbuhan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP		
				Dinas Perikanan dan Peternakan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Jumlah akan Produksi Ikan Kolam Air tenang		
				Dinas Perikanan dan Peternakan	
			Jumlah Produksi Benih Ikan		
				Dinas Perikanan dan Peternakan	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Persentase Pengawasan SDP		
				Dinas Perikanan dan Peternakan	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Cakupan pelayanan kesehatan hewan (%)		
				Dinas Perikanan dan Peternakan	
			Prevalensi Brucellosis (%)		
				Dinas Perikanan dan Peternakan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Prosentase Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP KEC SINDANGKERTA		
				Kecamatan Sindangkerta	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
			Nilai SAKIP KEC SAGULING		
				Kecamatan Saguling	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan		
				Kecamatan Sindangkerta	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi		
				Kecamatan Sindangkerta	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan ekonomi		
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD		
				Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase Diseminasi Hasil Kelitbangan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Persentase Hasil Kelitbangan Yang Didesiminasikan Kepada Perangkat Daerah / Masyarakat/ Dunia Usaha / Pihak Lainnya		
				Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP KEC SINDANGKERTA		
				Kecamatan Sindangkerta	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi		
				Kecamatan Batujajar	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kualitan dan Kuantiatas Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
				Dinas Pendidikan	
			Persentase pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan		
				Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan		
				Dinas Tenaga Kerja	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan		
				Dinas Tenaga Kerja	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan		
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Persentase penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	
			Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk		
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Persentase KB Aktif		
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	
			Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	
			Persentase UNMETNEED		
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
			Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan		
				Dinas Arsip dan Perpustakaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Evaluasi SAKIP Disarpus		
				Dinas Arsip dan Perpustakaan	
			Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Persentase data dan informasi bidang sosial yang di gunakan sebagai policy brief		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Penyusunan LPPD sesuai Ketentuan		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Regulasi yang di tetapkan		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase Diseminasi Hasil Kelitbangan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP KEC BATUJAJAR		
				Kecamatan Batujajar	
			Nilai SAKIP KEC. LEMBANG		
				Kecamatan Lembang	
			Nilai SAKIP KEC SAGULING		
				Kecamatan Saguling	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan		
				Kecamatan Batujajar	
				Kecamatan Padalarang	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi		
				Kecamatan Saguling	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi		
				Kecamatan Gununghalu	
				Kecamatan Cikalongwetan	
				Kecamatan Saguling	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya Pengetahuan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani		
				Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
			Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak		
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Jumlah ketersediaan ruang terbuka dan sarana olahraga		
				Dinas Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			0Prosentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Prosentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Evaluasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Nilai SAKIP KEC BATUJAJAR		
				Kecamatan Batujajar	
			Nilai SAKIP Kecamatan Rongga		
				Kecamatan Rongga	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan		
				Kecamatan Lembang	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Indeks Kapasitas Daerah		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terasilitasi		
				Kecamatan Cikalongwetan	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja		
				Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Cakupan ketentraman dan ketertiban umum		
				Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran		
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
			Persentase penduduk ber akta kelahiran 0-18 tahun		
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
			Persentase Penerbitan Akta Kematian		
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Nilai SAKIP DISKOPUKM		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Nilai SAKIP Sekretariat Daerah		
				Sekretariat Daerah	
			Nilai SAKIP Sekretariat DPRD		
				Sekretariat DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
				Sekretariat DPRD	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD		
				Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP KEC GUNUNGHALU		
				Kecamatan Gununghalu	
			Nilai SAKIP KEC. LEMBANG		
				Kecamatan Lembang	
			Nilai SAKIP KEC. Cipongkor		
				Kecamatan Cipongkor	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi		
				Kecamatan Gununghalu	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan		
				Kecamatan Gununghalu	
				Kecamatan Cikalongwetan	
			Tersedianya Pasilitas Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang PMD		
				Kecamatan Cikalongwetan	
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan		
				Kecamatan Cipongkor	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
				Kecamatan Gununghalu	
			Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi		
				Kecamatan Padalarang	
				Kecamatan Lembang	
				Kecamatan Cisarua	
				Kecamatan Cipongkor	
				Kecamatan Cihampelas	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi		
				Kecamatan Cipongkor	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

3.2. Perubahan PPAS Berdasarkan Program dan Kegiatan

Perubahan anggaran belanja dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan penyesuaian dari Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang didasarkan pada usulan perubahan dari masing-masing Perangkat Daerah, penyesuaian program dan kegiatan yang berasal dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan program kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang sudah jelas peruntukannya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang telah ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 serta merupakan penyesuaian terhadap target pencapaian kinerja setiap urusan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 yang bertujuan untuk penyempurnaan dalam pencapaian target kinerja.

Anggaran perubahan Perangkat Daerah per program dan kegiatan ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas
Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
54	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Tingkat Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang sesuai dengan standar			
				Dinas Pendidikan	28.700.000	28.700.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
			Persentase penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan			
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	586.730.700	586.730.700
			Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk			
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	586.730.700	586.730.700
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
			Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga			
				Dinas Pemuda dan Olahraga	30.440.600	30.440.600
			Jumlah ketersediaan ruang terbuka dan sarana olahraga			
				Dinas Pemuda dan Olahraga	30.440.600	30.440.600
55	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan			
				Dinas Kesehatan	55.091.600	55.091.600

				Dinas Kesehatan	66.500.000.000	89.453.417.778
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat			
				Dinas Kesehatan	8.975.170.795	10.477.533.964

				Dinas Kesehatan	35.603.316.234	40.025.858.437
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
			Persentase SDM yang memiliki kapasitas pelayanan kesehatan sesuai standar			
				Dinas Kesehatan	21.236.600	21.236.600
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				

				Dinas Kesehatan	63.990.000	63.990.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				

				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	101.000.000	101.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
			Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak			
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	419.119.150	419.119.150
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
			Persentase penanganan korban kekerasan terhadap anak			
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	78.950.000	78.950.000

				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	237.850.000	237.850.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
			Persentase pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang di evaluasi			
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	272.232.000	272.232.000
			Tersedianya data mikro keluarga dan terselenggaranya rekonsiliasi data, terbentuknya profil kependudukan, Terbentuknya Rumahdata			
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	272.232.000	272.232.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
			Persentase KB Aktif			
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	3.378.329.758	3.378.329.758
			Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	3.378.329.758	3.378.329.758
			Persentase UNMETNEED			
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan	3.378.329.758	3.378.329.758

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
				Perlindungan Anak (DP2KBP3A)		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
			Cakupan kelompok kegiatan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Sejahtera dan Cakupan Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten			
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	231.000.000	231.000.000
56	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja			
				Dinas Tenaga Kerja	189.484.600	189.484.600
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
			Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan			
				Dinas Tenaga Kerja	113.609.000	113.609.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
			Persentase peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan			
				Dinas Tenaga Kerja	400.000.000	400.000.000
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
			Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	51.177.950	51.177.950
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
			KoperasiPersentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi%			
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	9.492.000	9.492.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
			Jumlah kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi			
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.799.856.029	1.799.856.029
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
			Jumlah produksi Pertanian			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.202.025.724	4.438.156.224
			Jumlah produksi Pertanian (Tanaman Hias)			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.202.025.724	4.438.156.224
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
			Nilai Tukar Petani (NTP)			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	190.322.640	490.415.640
			Persentase penyuluh pertanian yang melaksanakan Diklat Teknis			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	190.322.640	490.415.640
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
			Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan			
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	49.190.000	0
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
			Prosentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan			
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	147.951.800	147.951.800
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
			Jumlah Monitoring Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	74.445.300	74.445.300
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
			Prosentase Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	451.525.600	451.525.600
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
			Jumlah Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota			
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	317.553.532	317.553.532
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
			Prosentase Pengembangan IKM			
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.099.304.408	1.774.368.450
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
			Pertumbuhan Industri yang terintegrasi ke dalam SIINAS			
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	211.696.750	211.696.750
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
			Penjabaran Konsistensi Program RKPd Ke Dalam APBD			
				Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	489.743.000	489.743.000
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
			Persentase Diseminasi Hasil Kelitbangan			
				Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	211.244.225	211.244.225
			Persentase Hasil Kelitbangan Yang Didesiminasikan Kepada Perangkat Daerah / Masyarakat/ Dunia Usaha / Pihak Lainnya			
				Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	339.761.075	339.761.075
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai SAKIP KEC SINDANGKERTA			
				Kecamatan Sindangkerta	21.162.600	21.162.600
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				

				Kecamatan Cipeundeuy	30.452.000	30.452.000
				Kecamatan Cililin	79.977.700	79.977.700
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi			
				Kecamatan Cikalongwetan	680.345.537	680.345.537
59	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				

				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	9.970.156.543	10.226.901.223
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
			Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi			
				Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	158.029.550	158.029.550
60	Gerakan Membangun Desa					
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
			Persentase pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang di evaluasi			
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan	388.996.350	388.996.350

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
				Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)		
			Tersedianya data mikro keluarga dan terselenggaranya rekonsiliasi data, terbentuknya profil kependudukan, Terbentuknya Rumahdata			
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	388.996.350	388.996.350
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan			
				Kecamatan Cipongkor	110.633.200	110.633.200
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Kecamatan Parongpong	340.340.000	340.340.000
					10000000	
				Kecamatan Parongpong	340.340.000	340.340.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				

				Kecamatan Parongpong	11.900.000	11.900.000
61	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial					
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
			Indeks Kapasitas Daerah			
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	199.751.250	199.751.250
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
			Cakupan kelompok kegiatan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Sejahtera dan Cakupan Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten			
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	380.120.000	380.120.000
62	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah					
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				

				Dinas Kesehatan	2.498.233.268	4.182.919.989
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.013.000	5.138.000
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Cakupan ketentraman dan ketertiban umum			
				Satuan Polisi Pamong Praja	18.890.000	18.890.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
			Persentase peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan			
				Dinas Tenaga Kerja	400.000.000	400.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Sakip			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	110.480.000	110.480.000
			Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	305.861.653	392.716.204

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
			Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	690.698.708	655.833.308
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
			Persentase penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan			
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	61.923.550	61.923.550
			Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk			
				Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	61.923.550	61.923.550
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	28.540.000	28.540.000
			Nilai SAKIP DISKOPUKM			
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	7.933.304.442	10.075.819.814
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	98.816.000	98.816.000
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
			Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan			
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	36.760.000	62.728.600
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
			Prosentase standarisasi dan perlindungan Konsumen			
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	267.012.000	274.012.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien			
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.461.869.259	15.972.486.795
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				
			Pertumbuhan Industri yang berizin			
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.750.000	25.750.000
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
			Persentase data dan informasi bidang sosial yang di gunakan sebagai policy brief			
				Sekretariat Daerah	668.074.050	668.074.050
			Persentase Penyusunan LPPD sesuai Ketentuan			
				Sekretariat Daerah	668.074.050	668.074.050
			Persentase Regulasi yang di tetapkan			
				Sekretariat Daerah	668.074.050	668.074.050
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai SAKIP Sekretariat DPRD			
				Sekretariat DPRD	42.248.900	42.248.900

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
			Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			
				Sekretariat DPRD	1.513.199.688	1.513.199.688
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Evaluasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah			
				Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	953.868.100	1.004.868.100
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
			Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD			
				Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	434.050.500	434.050.500
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
			Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD			
				Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	101.560.700	101.560.700
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				

				Badan Keuangan dan Aset Daerah	492.167.188.501	498.838.429.772
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
			Persentase Diseminasi Hasil Kelitbangan			
				Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	668.254.900	668.254.900
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai SAKIP KEC BATUJAJAR			
				Kecamatan Batujajar	31.956.179	31.956.179

				Kecamatan Cipeundeuy	34.160.000	34.160.000
			Nilai SAKIP KEC GUNUNGHALU			
				Kecamatan Gununghalu	80.874.900	97.374.900
			Nilai SAKIP KEC. LEMBANG			
				Kecamatan Lembang	211.264.850	211.264.850
			Nilai SAKIP KEC SINDANGKERTA			
				Kecamatan Sindangkerta	33.120.000	33.120.000
			Nilai SAKIP KEC. CISARUA			
				Kecamatan Cisarua	36.000.000	36.000.000

				Kecamatan Ngamprah	53.816.314	53.816.314
			Nilai SAKIP KEC. Cipongkor			
				Kecamatan Cipongkor	43.065.800	58.065.800

				Kecamatan Parongpong	24.560.200	24.560.200
				Kecamatan Cipatat	139.676.044	139.676.044
			Nilai SAKIP KEC. CIHAMPELAS			
				Kecamatan Cihampelas	46.800.000	46.800.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan			
				Kecamatan Batujajar	67.427.300	67.427.300

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
				Kecamatan Gununghalu	82.251.200	82.251.200
				Kecamatan Padalarang	54.980.000	54.980.000
				Kecamatan Lembang	99.999.800	99.999.800
				Kecamatan Sindangkerta	75.000.000	75.000.000
				Kecamatan Cisarua	81.058.300	81.058.300
				Kecamatan Cipongkor	159.143.400	159.143.400
				Kecamatan Saguling	75.450.000	75.450.000

				Kecamatan Parongpong	87.421.600	87.421.600
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan			
				Kecamatan Cihampelas	129.300.000	129.300.000

				Kecamatan Rongga	341.388.600	341.388.600
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
				Kecamatan Gununghalu	492.345.537	492.345.537
			Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi			
				Kecamatan Cipongkor	606.000.000	606.000.000

				Kecamatan Cipatat	597.731.458	597.731.458
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi			
				Kecamatan Cipatat	34.146.100	34.146.100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46.200.000	37.950.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
			Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	71.756.000	71.756.000
			Meningkatnya Pengetahuan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	71.756.000	71.756.000
64	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan					
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.358.089.648	1.358.089.648
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
			Penurunan Jumlah desa rawan pangan			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	124.316.648	124.316.648

Tabel 3.3

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengembangan Industri Pertanian (Agroindustri) yang Mencakup Sub Sektor Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Budidaya							
		1.3.1 : Mewujudkan ketahanan pangan						
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Ketersediaan informasi pasokan dan akses pangan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	251.668.800	251.668.800	
				Pencapaian Score Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.047.181.144	1.047.181.144	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Penurunan Jumlah desa rawan pangan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	124.316.648	124.316.648	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Jumlah Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	80.430.400	80.430.400	
		2.1.1 : Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan						
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Cadangan Pangan Pemerintah Daerah				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	208.455.296	208.455.296	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				Jumlah akan Produksi Ikan Kolam Air tenang				
					Dinas Perikanan dan Peternakan	5.625.485.478	5.486.501.478	
				Jumlah Produksi Benih Ikan				
					Dinas Perikanan dan Peternakan	5.625.485.478	5.486.501.478	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
				Persentase Pengawasan SDP				
					Dinas Perikanan dan Peternakan	228.893.628	272.143.628	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Jumlah produksi Pertanian				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.867.902.032	9.117.902.032	
				Jumlah produksi Pertanian (Tanaman Hias)				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.867.902.032	9.117.902.032	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Jumlah produksi Pertanian				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.202.025.724	4.572.023.524	
				Jumlah produksi Pertanian (Tanaman Hias)				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.202.025.724	4.572.023.524	
				Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan				
					Dinas Perikanan dan Peternakan	1.676.956.543	1.870.618.070	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Cakupan pelayanan kesehatan hewan (%)				
					Dinas Perikanan dan Peternakan	2.868.389.296	4.964.153.119	
				Prevalensi Brucellosis (%)				
					Dinas Perikanan dan Peternakan	2.868.389.296	4.964.153.119	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Kasus Wabah Zoonosis yang tertanggulangi				
					Dinas Perikanan dan Peternakan	57.675.100	57.675.100	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Persentase penyuluh pertanian yang melaksanakan Diklat Teknis				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.538.101.342	3.848.394.342	
				Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok				
					Dinas Perikanan dan Peternakan	674.945.128	761.645.128	

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.358.089.648	1.358.089.648	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan				
					Dinas Perikanan dan Peternakan	734.115.388	743.865.388	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi peternakan				
					Dinas Perikanan dan Peternakan	21.727.303.108	21.779.335.164	
				Persentase kelahiran Ternak				
					Dinas Perikanan dan Peternakan	21.727.303.108	21.779.335.164	
				Persentase Penyebaran Bibit unggul				
					Dinas Perikanan dan Peternakan	21.727.303.108	21.779.335.164	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
				Terfasilitasinya penerbitan izin usaha peternakan				
					Dinas Perikanan dan Peternakan	273.952.129	280.702.129	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Nilai Tukar Petani (NTP)				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.538.101.342	3.848.394.342	
2	Pengembangan Pariwisata yang Ramah Lingkungan Berbasis pada Kearifan dan Budaya Setempat serta Melibatkan Masyarakat Setempat							
		1.3.2 : Pengembangan objek pemajuan kebudayaan						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Jumlah nilai-nilai budaya lokal dan objek pemajuan budaya yang dilestarikan				
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	264.914.629	264.914.629	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
				Jumlah dokumentasi cagar budaya/peristiwa sejarah/tokoh sejarah				
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	66.788.000	66.788.000	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan				
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	529.839.895	529.839.895	
		2.1.1 : Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan						
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Persentase destinasi pariwisata yang memenuhi standar				
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.183.604.976	3.183.604.976	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Persentase kegiatan promosi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif yang efektif				
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.744.992.729	2.744.992.729	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
				Perluasan sub sektor ekonomi kreatif				
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	116.636.950	116.636.950	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
				Jumlah pelaku usaha industri kreatif, penggerak pariwisata dan budaya yang meningkat kompetensinya				
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	826.778.358	826.778.358	
		4.1.1 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan				
					Kecamatan Cikalongwetan	2.798.846.471	4.078.214.818	
		4.2.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi				
					Kecamatan Cikalongwetan	428.870.058	428.870.058	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan				
					Kecamatan Cikalongwetan	191.673.958	191.673.958	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi				
					Kecamatan Cikalongwetan	680.345.537	680.345.537	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi				
					Kecamatan Cikalongwetan	1.686.238.729	1.686.238.729	
		---	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	226.613.587	226.613.587	
				Jumlah Dokumen administrasi keuangan				
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.317.246.472	6.340.910.324	
				Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor				
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.150.000	5.150.000	
				n prosentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi				
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	288.419.097	288.419.097	
				prosentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi				
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	508.591.400	549.091.400	
				Tercapainya Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas				
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	207.215.787	207.215.787	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
				Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan				
					Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	51.740.000	51.740.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Tersedianya Pasilitas Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang PMD				
					Kecamatan Cikalongwetan	191.673.958	191.673.958	
3	Penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Bandung Barat							
		1.2.1 : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat				
					Dinas Kesehatan	99.452.525.864	117.634.744.908	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase SDMK yang memiliki kapasitas pelayanan kesehatan sesuai standar				
					Dinas Kesehatan	3.274.271.800	3.136.326.600	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi makanan/minuman yang memenuhi standar				
					Dinas Kesehatan	495.628.100	495.628.100	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase masyarakat yang menjalin kemitraan pelayanan bidang kesehatan				
					Dinas Kesehatan	1.119.798.400	871.007.100	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Persentase pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang di evaluasi				
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	1.055.719.179	1.055.719.179	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Persentase KB Aktif				
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	9.941.164.366	9.941.164.366	
				Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	9.941.164.366	9.941.164.366	
				Persentase UNMETNEED				
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	9.941.164.366	9.941.164.366	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Cakupan kelompok kegiatan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Sejahtera dan Cakupan Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten				
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	231.000.000	231.000.000	
		1.4.2 : Terwujudnya pemberdayaan, pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan						
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan ekonomi				
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	2.661.049.950	2.661.049.950	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	176.662.679	176.662.679	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				Persentase Keluarga yang memiliki kesadaran dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak				
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	797.978.200	797.978.200	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
				Persentase Data serta profil gender dan anak Hasil analisis				
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	85.163.750	85.163.750	
		1.4.3 : Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak						
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Persentase penanganan korban kekerasan terhadap anak				
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	268.787.350	268.787.350	
		4.1.1 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan				
					Dinas Kesehatan	103.508.535.438	137.481.583.897	
				Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan				
					Kecamatan Cikalongwetan	11.168.000	11.168.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Kesehatan	67.032.100.000	89.985.517.778	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

					Dinas Kesehatan	75.029.371.085	89.148.678.633	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					

					Dinas Kesehatan	257.339.000	257.339.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					

					Dinas Kesehatan	48.845.100	200.181.900	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					

					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	101.000.000	101.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket

					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	237.850.000	237.850.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Tersedianya data mikro keluarga dan terselenggaranya rekonsiliasi data, terbentuknya profil kependudukan, Terbentuknya Rumahdata				
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	1.055.719.179	1.055.719.179	
4	Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan							

			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					

					Dinas Lingkungan Hidup	151.885.600	151.885.600	
5	Penyediaan sistem perlindungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan							
		1.3.4 : Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana						
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Indeks Kapasitas Daerah				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.749.598.277	3.749.598.277	
		1.4.3 : Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak						
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak				
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	419.119.150	419.119.150	
		4.2.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik						
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terasilitasi				
					Kecamatan Cikalongwetan	20.719.800	20.719.800	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Sosial	6.276.463.038	7.673.799.895	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					

					Dinas Sosial	1.511.852.200	1.511.852.200	
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					

					Dinas Sosial	7.560.000	7.560.000	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					

					Dinas Sosial	1.785.368.532	1.785.368.532	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					

					Dinas Sosial	2.476.843.979	2.476.843.979	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					

					Dinas Sosial	280.050.000	280.050.000	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
6	Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalui pembangunan e-government							
		1.2.1 : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Persentase penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan				
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	61.923.550	61.923.550	
				Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk				
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	61.923.550	61.923.550	
		1.3.3 : Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani				
					Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12.437.378.848	12.437.378.848	
		1.3.5 : Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Tingkat pemahaman politik di masyarakat				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.181.006.800	1.806.026.800	
		1.4.1 : Meningkatnya kapasitas pemberdayaan Kelompok masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.670.592.800	8.970.592.800	
		4.1.1 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja				
					Satuan Polisi Pamong Praja	6.179.964.990	7.079.441.262	
				Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.598.412.158	6.885.207.719	
				Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
					Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.749.383.502	6.023.123.772	
				Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja				
					Dinas Tenaga Kerja	5.927.194.834	6.803.233.818	
				Nilai Sakip				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.461.550.813	19.256.170.753	
				Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11.311.637.427	13.480.750.568	
				Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.342.352.195	6.578.551.573	
				Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga	11.865.806.253	13.163.924.893	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
					Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)			
				Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	4.642.463.951	5.698.445.016	
				Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan				
					Dinas Arsip dan Perpustakaan	741.659.600	741.659.600	
				Nilai SAKIP Sekretariat Daerah				
					Sekretariat Daerah	41.546.297.997	45.062.607.826	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Persentase data dan informasi bidang sosial yang di gunakan sebagai policy brief				
					Sekretariat Daerah	26.408.177.778	26.422.085.778	
				Persentase Penyusunan LPPD sesuai Ketentuan				
					Sekretariat Daerah	26.408.177.778	26.422.085.778	
				Persentase Regulasi yang di tetapkan				
					Sekretariat Daerah	26.408.177.778	26.422.085.778	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP Sekretariat DPRD				
					Sekretariat DPRD	9.169.366.863	10.836.356.730	
				Nilai Evaluasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
					Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.310.557.692	12.670.403.966	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD				
					Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.990.547.300	3.990.547.300	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD				
					Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.837.969.150	2.837.969.150	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	46.776.768.428	13.746.979.709	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Presentase Aparatur yang mendapatkan Pembinaan Kepegawaian				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.900.422.958	4.900.422.958	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Persentase Aparatur yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.880.891.179	1.880.891.179	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase Hasil Kelitbangan Yang Didesiminasikan Kepada Perangkat Daerah / Masyarakat/ Dunia Usaha / Pihak Lainnya				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
					Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	521.475.075	521.475.075	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP KEC BATUJAJAR				
					Kecamatan Batujajar	2.871.900.380	3.653.277.103	
				Nilai SAKIP KEC GUNUNGHALU				
					Kecamatan Gununghalu	2.666.854.089	3.022.237.148	
				Nilai SAKIP Kecamatan Padalarang				
					Kecamatan Padalarang	3.310.658.209	3.663.060.271	
				Nilai SAKIP KEC. LEMBANG				
					Kecamatan Lembang	211.264.850	211.264.850	
				Nilai SAKIP KEC SINDANGKERTA				
					Kecamatan Sindangkerta	488.837.977	506.837.977	
				Nilai SAKIP KEC. CISARUA				
					Kecamatan Cisarua	2.988.357.374	3.713.143.545	
				Nilai SAKIP KEC. Cipongkor				
					Kecamatan Cipongkor	2.421.778.490	2.754.290.885	
				Nilai SAKIP KEC SAGULING				
					Kecamatan Saguling	2.309.207.585	2.854.365.459	
				Nilai SAKIP KEC. CIHAMPELAS				
					Kecamatan Cihampelas	3.120.383.266	3.747.073.087	
				Nilai SAKIP Kecamatan Rongga				
					Kecamatan Rongga	2.137.548.146	2.635.532.070	
				Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.881.164.724	2.202.073.924	
		4.2.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik						
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Persentase Anak Ber KIA				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	403.262.637	426.262.916	
				Persentase Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	403.262.637	426.262.916	
				Persentase Penduduk Ber KTP-EL				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	403.262.637	426.262.916	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	334.606.658	379.775.544	
				Persentase penduduk ber akta kelahiran 0-18 tahun				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	334.606.658	379.775.544	
				Persentase Penerbitan Akta Kematian				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	334.606.658	379.775.544	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Persentase Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.778.419.040	1.727.624.719	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				Profil Kependudukan yang terselesaikan				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	15.391.000	7.695.500	
			PROGRAM PENATAAN DESA					
				Jumlah Desa Pemekaran				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.483.910.729	1.483.910.729	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					
				Jumlah Kerjasama Desa yg Terfasilitasi				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	741.403.379	741.403.379	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Desa Cepat Berkembang				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.083.544.750	5.083.544.750	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				
					Sekretariat DPRD	30.871.356.670	30.871.356.670	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi				
					Kecamatan Batujajar	255.261.837	255.261.837	
					Kecamatan Gununghalu	209.841.995	209.841.995	
					Kecamatan Padalarang	264.890.300	264.890.300	
					Kecamatan Sindangkerta	372.224.237	372.224.237	
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan				
					Kecamatan Cisarua	358.828.058	358.828.058	
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Terfasilitasi				
					Kecamatan Cipongkor	412.840.216	412.840.216	
					Kecamatan Saguling	325.981.558	325.981.558	
					Kecamatan Cihampelas	619.471.182	619.471.182	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan kewilayahan				
					Kecamatan Batujajar	1.177.154.937	1.177.154.937	
					Kecamatan Gununghalu	303.601.600	303.601.600	
					Kecamatan Padalarang	228.325.479	228.325.479	
					Kecamatan Lembang	2.202.480.200	2.202.480.200	
					Kecamatan Sindangkerta	247.717.598	247.717.598	
					Kecamatan Cisarua	285.730.300	285.730.300	
					Kecamatan Cipongkor	269.776.600	269.776.600	
					Kecamatan Saguling	751.316.337	751.316.337	
					Kecamatan Cihampelas	215.500.000	215.500.000	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi				
					Kecamatan Batujajar	350.520.000	350.520.000	
					Kecamatan Padalarang	506.775.979	506.775.979	
					Kecamatan Sindangkerta	690.251.137	690.251.137	
					Kecamatan Cisarua	390.600.000	390.600.000	
					Kecamatan Cipongkor	642.805.200	642.805.200	
					Kecamatan Saguling	340.683.758	340.683.758	
					Kecamatan Cihampelas	461.950.000	461.950.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi				
					Kecamatan Batujajar	108.524.400	108.524.400	
					Kecamatan Gununghalu	1.433.688.458	1.433.688.458	
					Kecamatan Padalarang	1.929.931.458	1.929.931.458	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
					Kecamatan Sindangkerta	1.178.364.800	1.178.364.800	
					Kecamatan Cisarua	912.915.600	912.915.600	
					Kecamatan Cipongkor	1.115.855.200	1.115.855.200	
					Kecamatan Saguling	100.827.958	100.827.958	
					Kecamatan Cipatat	113.129.448	113.129.448	
					Kecamatan Cihampelas	1.186.700.000	1.186.700.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Tingkat Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang sesuai dengan standar				
					Dinas Pendidikan	642.655.546.969	678.056.230.604	

					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	19.169.302.422	22.268.624.034	
					Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	7.471.564.733	9.724.363.472	
				Nilai SAKIP Satpol PP				
					Satuan Polisi Pamong Praja	130.148.200	130.148.200	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Cakupan ketentraman dan ketertiban umum				
					Satuan Polisi Pamong Praja	5.288.638.800	5.297.834.000	
				Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum				
					Satuan Polisi Pamong Praja	160.508.800	351.058.450	
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
				dokumen perencanaan tenaga kerja daerah				
					Dinas Tenaga Kerja	11.518.400	11.518.400	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.972.662.679	5.712.541.036	
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.823.056.050	1.823.056.050	
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					
				Persentase Aplikasi Teknologi Informasi Pemerintahan yang termanfaatkan				
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6.865.267.845	11.871.438.845	
				Persentase Aplikasi Teknologi Informasi Pemerintahan yang Termanfaatkan				
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.529.045.579	3.529.045.579	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	93.683.850	93.683.850	
				Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	362.116.929	362.116.929	
				Nilai SAKIP DISKOPUKM				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	9.412.210.158	11.586.225.530	
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	520.439.000	551.939.000	
				Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.202.309.305	6.351.291.358	
				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	212.306.308	212.306.308	
				Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	107.609.000	107.609.000	
				Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	279.363.620	312.358.270	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	200.589.350	200.589.350	

					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78.360.358	78.360.358	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Persentase dokumen yang ditindaklanjuti				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92.512.100	92.512.100	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	434.872.558	434.872.558	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai SOP				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	298.189.387	298.189.387	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					

					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	838.781.537	838.781.537	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					

					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	144.857.479	144.857.479	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Pemuda dan Olahraga	13.444.600	13.444.600	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	529.857.950	529.857.950	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
				Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi				
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	325.974.229	325.974.229	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan				
					Dinas Arsip dan Perpustakaan	354.752.450	576.252.550	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
				Nilai Evaluasi SAKIP Disarpus				
					Dinas Arsip dan Perpustakaan	3.394.514.418	4.615.759.330	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				Persentase Arsip PD yang sudah di Kelola secara baku				
					Dinas Arsip dan Perpustakaan	1.309.693.800	1.299.693.800	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
				Persentase arsip yang sudah dilakukan penyelamatan				
					Dinas Arsip dan Perpustakaan	357.225.500	357.174.300	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP				
					Dinas Perikanan dan Pernakan	9.590.031.179	12.112.986.851	
				Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.461.869.259	15.972.486.795	

					Sekretariat Daerah	7.969.343.566	7.955.435.566	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					

					Sekretariat Daerah	7.683.204.024	11.718.539.824	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Sekretariat DPRD	8.963.869.186	8.963.869.186	
					Badan Keuangan dan Aset Daerah	77.505.267.267	80.227.197.520	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					

					Badan Keuangan dan Aset Daerah	498.731.122.725	505.402.363.996	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					

					Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.148.824.138	5.148.824.138	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					

					Badan Pendapatan Daerah	164.002.508	164.002.508	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase Diseminasi Hasil Kelitbangan				
					Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.894.520.900	1.894.520.900	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Inspektorat Daerah	14.399.025.187	17.197.852.354	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					

					Inspektorat Daerah	2.102.267.965	2.078.803.888	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					

					Inspektorat Daerah	1.213.297.900	1.213.297.900	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Kecamatan Cipeundeuy	34.160.000	34.160.000	
					Kecamatan Ngamprah	2.909.589.250	3.542.667.961	
					Kecamatan Cililin	2.991.621.500	3.125.108.976	
					Kecamatan Parongpong	3.171.120.435	3.897.733.046	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
					Kecamatan Cipatat	2.863.676.893	2.706.546.858	
					Kecamatan Rongga	524.484.400	536.484.400	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					

					Kecamatan Ngamprah	465.062.230	409.410.330	
					Kecamatan Cililin	339.757.637	339.757.637	
					Kecamatan Parongpong	479.163.590	479.163.590	
					Kecamatan Cipatat	292.716.916	292.716.916	
					Kecamatan Rongga	277.168.337	277.168.337	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					

					Kecamatan Cipeundeuy	30.452.000	30.452.000	
					Kecamatan Ngamprah	156.981.579	156.981.579	
					Kecamatan Cililin	202.083.400	202.083.400	
					Kecamatan Parongpong	1.105.651.600	1.105.651.600	
					Kecamatan Cipatat	182.193.337	182.193.337	
					Kecamatan Rongga	393.962.300	393.962.300	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
					Kecamatan Gununghalu	492.345.537	492.345.537	

					Kecamatan Ngamprah	498.000.000	498.000.000	
					Kecamatan Cililin	573.692.358	573.692.358	
					Kecamatan Cipatat	597.731.458	597.731.458	
					Kecamatan Rongga	471.331.550	471.331.550	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					

					Kecamatan Cipeundeuy	1.205.860.000	1.205.860.000	
					Kecamatan Ngamprah	1.720.305.279	1.720.305.279	
					Kecamatan Cililin	1.317.863.500	1.317.863.500	
					Kecamatan Parongpong	11.900.000	11.900.000	
					Kecamatan Rongga	1.221.713.129	1.221.713.129	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.653.429.228	3.798.267.785	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman kehidupan Berpolitik yang Demokratis				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.441.103.600	5.542.953.600	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Tercapainya Peningkatan Kualitas SDM pada setiap Organisasi Kemasyarakatan				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	828.745.100	1.124.301.300	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	982.213.300	982.213.300	
				Meningkatnya Pengetahuan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	982.213.300	982.213.300	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				Penyelesaian Jumlah Potensi Konflik Sosial di Daerah				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.054.287.403	4.181.500.000	
7	Pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi unggulan, pelayanan kawasan perkotaan dan pemerataan pembangunan dan wilayah, termasuk perluasan pelayanan irigasi							
		4.1.1 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP KEC. LEMBANG				
					Kecamatan Lembang	3.229.790.695	3.769.761.891	
				Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan				
					Kecamatan Cikalongwetan	11.826.000	11.826.000	

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					

					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7.625.320.552	8.025.320.552	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					

					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11.264.387.033	11.264.387.033	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					

					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	77.300.000	107.299.750	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					

					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7.914.575.378	7.914.575.378	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					

					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5.052.831.795	5.052.831.795	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					

					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	24.270.851.000	24.570.851.000	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					

					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	43.297.689.642	49.152.062.119	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					

					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	193.629.415.238	256.901.335.207	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					

					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	936.657.058	936.657.058	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					

					Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.583.648.154	3.581.878.104	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket

					Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	819.752.660	819.752.660	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					

					Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.644.874.133	5.724.722.433	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					

					Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	10.328.562.909	10.585.307.589	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					

					Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.199.900.051	943.270.271	
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					

					Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	75.993.129	75.993.129	
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					

					Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	282.607.179	282.607.179	
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					

					Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	200.018.329	200.018.329	
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					

					Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.285.449.908	1.285.449.908	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Perhubungan	9.875.302.034	11.259.891.047	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					

					Dinas Perhubungan	15.033.764.309	15.033.764.309	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					

					Dinas Perhubungan	282.956.100	282.956.100	
8	Pengembangan klaster ekonomi di Bandung Barat yang mengaitkan antara kegiatan ekonomi skala menengah dan besar (padat modal) dan usaha skala mikro dan kecil (UMKM dan koperasi), serta melalui pengembangan BUMD dan dukungan pengembangan BUMDes							
		2.1.3 : Meningkatnya partisipasi tenaga kerja setempat di kegiatan ekonomi yang ada						
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
			persentase pencari kerja terdaftar yang dilatih					
					Dinas Tenaga Kerja	5.169.430.670	5.455.980.320	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan					
					Dinas Tenaga Kerja	286.828.937	286.828.937	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan					
					Dinas Tenaga Kerja	2.234.403.458	2.234.403.458	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
			Persentase transmigran mandiri					
					Dinas Tenaga Kerja	37.199.700	37.199.700	
		2.1.4 : Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
			Pertumbuhan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro					
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	12.013.741.221	12.013.741.221	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Pertumbuhan pengembangan pelaku usaha mikro					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	859.171.712	859.171.712	
		4.1.1 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja				
					Dinas Tenaga Kerja	136.995.000	136.995.000	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD					
					Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	489.743.000	489.743.000	

			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					

					Dinas Tenaga Kerja	17.600.000	17.600.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Nilai SAKIP DISKOPUKM					
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	98.455.400	98.455.400	
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	98.455.400	98.455.400	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi					
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	223.376.350	223.376.350	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
			KoperasiPersentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi%					
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	108.627.579	108.627.579	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
			Persentase Peserta Diklat Perkoperasian					
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	330.198.300	330.198.300	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
			Jumlah kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi					
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.799.856.029	1.799.856.029	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
			Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan					
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	85.950.000	62.728.600	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Prosentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan					
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	147.951.800	147.951.800	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
			Jumlah Monitoring Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	74.445.300	74.445.300	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
			Prosentase Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota					
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	451.525.600	451.525.600	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Prosentase standarisasi dan perlindungan Konsumen					
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	267.012.000	274.012.000	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Jumlah Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota					
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	317.553.532	317.553.532	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Prosentase Pengembangan IKM				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.099.304.408	1.774.368.450	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					
				Pertumbuhan Industri yang berizin				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.750.000	25.750.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Pertumbuhan Industri yang terintegrasi ke dalam SIINAS				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	211.696.750	211.696.750	
9		Penyediaan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat untuk membentuk manusia Bandung Barat yang unggul, berdaya saing dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai lokal, agama dan kebangsaan, serta pengembangan perguruan tinggi						
		1.1.1 : Meningkatnya kualitas layanan pendidikan						
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kualitan dan Kuantiatas Pendidik dan Tenaga Kependidikan				
					Dinas Pendidikan	600.000.000	600.000.000	
		1.1.2 : Meningkatkan minat budaya baca						
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan				
					Dinas Arsip dan Perpustakaan	805.606.155	805.605.610	
		1.2.1 : Meningkatnya kualitas layanan kesehatan						
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Persentase penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan				
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	586.730.700	586.730.700	
				Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk				
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	586.730.700	586.730.700	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Persentase KB Aktif				
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	96.611.100	96.611.100	
				Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	96.611.100	96.611.100	
				Persentase UNMETNEED				
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan	96.611.100	96.611.100	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
					Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Cakupan kelompok kegiatan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Sejahtera dan Cakupan Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten				
					Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	1.094.999.000	1.094.999.000	
		1.4.1 : Meningkatkan kapasitas pemberdayaan Kelompok masyarakat						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Presentase Kapasitas Layanan Kepemudaan				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	3.163.913.800	3.163.913.800	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	13.183.411.703	13.183.411.703	
				Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provinsi				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	19.539.797.094	19.539.797.094	
				Jumlah ketersediaan ruang terbuka dan sarana olahraga				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	6.909.613.203	6.909.613.203	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Presentase peningkatan pemuda yang aktif pada organisasi kepramukaan				
					Dinas Pemuda dan Olahraga	204.025.000	204.025.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Tingkat Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang sesuai dengan standar				
					Dinas Pendidikan	28.700.000	28.700.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	290.983.960.160	249.475.000.818	
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI/ ke SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	290.983.960.160	249.475.000.818	
				Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA				
					Dinas Pendidikan	38.648.889.352	81.419.256.944	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A				
					Dinas Pendidikan	290.983.960.160	249.475.000.818	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B				
					Dinas Pendidikan	38.648.889.352	81.419.256.944	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	38.648.889.352	81.419.256.944	
				APK PAUD				
					Dinas Pendidikan	30.778.457.924	31.668.049.674	
				Jumlah Lembaga Non Formal Terakreditasi				
					Dinas Pendidikan	15.450.261.402	15.450.261.402	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				Persentase pemenuhan kurikulum muatan lokal				
					Dinas Pendidikan	753.816.092	753.816.092	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Persentase pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan				
					Dinas Pendidikan	1.200.000.000	1.200.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
				Persentase pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perizinan satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Nonformal				
					Dinas Pendidikan	46.893.344	46.893.344	
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					
				Persentase pengembangan bahasa dan sastra				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
					Dinas Pendidikan	246.183.908	246.183.908	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan				
					Dinas Arsip dan Perpustakaan	3.521.788.455	4.071.787.910	

Tabel 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						Lokasi Sub Kegiatan	Ket
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang sesuai dengan standar	100 %	100 %	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang dapat dipertanggungjawabkan	6 Dokumen	6 Dokumen	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat			
									1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Bandung Barat			
									1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyelenggaraan penyusunan dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat			
									1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyelenggaraan penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat			
									1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyelenggaraan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat			
									1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PTersusunnya dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan dan capaian kinerja serta Laporan Evaluasi, SIM, Dapodik, ATS, Laporan SPM, Laporan BOS	13 Kegiatan	13 Kegiatan	Kab. Bandung Barat			
					1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan	100 %	100 %	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	Kab. Bandung Barat			
									1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya fasilitas koordinasi dan konsultasi administrasi kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat			
									1.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat			
									1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat			
									1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat			

							1.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
			1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terdatanya seluruh aset Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
			1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan Alat Pendukung Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9 Kegiatan	9 Kegiatan	1.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	1 Set	1 Set	Kab. Bandung Barat	
							1.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							1.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersampaikannya peraturan perundang-undangan kepada masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersampaikannya tata cara implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
			1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Alat Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dapat digunakan	132 Item	132 Item	Kab. Bandung Barat	
							1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga di Dinas Pendidikan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1). Jumlah alat tulis kantor yang tersedia, 2). Terpenuhinya makan siang Pegawai/peserta rapat dan Tamu Dinas	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
							1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	21 Item	21 Item	Kab. Bandung Barat	
							1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan/buku bacaan/buku peraturan perundang-undangan	20 Buku	20 Buku	Kab. Bandung Barat	
							1.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk jamuan tamu dinas	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
							1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Menunjang pelaksanaan tugas kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	108 OH	108 OH	Kab. Bandung Barat	

					1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kelacaran surat menyurat	4027 Materai	4027 Materai	Kab. Bandung Barat	
									1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	berfungsinya sarana komunikasi, sumber daya air dan Listrik	20 %	20 %	Kab. Bandung Barat	
									1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor	20 %	20 %	Kab. Bandung Barat	
					1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1). Jumlah kendaraan dinas jabatan yang di rawat 2). Terpenuhinya kebutuhan untuk pemeliharaan rutin kendaraan untuk menunjang operasional dinas	5 Unit	5 Unit	Kab. Bandung Barat	
									1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya perbaikan alat pendukung pekerjaan	124 Unit	124 Unit	Kab. Bandung Barat	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	90.05 %	90.05 %	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar yang di kelola	90 %	90 %	1.01.02.2.01.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Terlaksananya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1 Unit	1 Unit	Kab. Bandung Barat	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI/ ke SMP/MTs	90.99 %	90.99 %										
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	98.31 %	98.31 %										
									1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru	2 Ruang	2 Ruang	Kab. Bandung Barat	
									1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Ruang	1 Ruang	Kab. Bandung Barat	
									1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terpenuhinya ketersediaan ratio ruang UKS dengan Tingkat Satuan Pendidikan	2 Unit	2 Unit	Kab. Bandung Barat	
									1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah SD/MI yang Terbangun	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir, Tersedianya kebutuhan sarana prasarana	32 Paket	32 Paket	Kab. Bandung Barat	

					ibadah, Terpenuhinya ketersediaan ratio sarana air bersih dan sanitary dengan Tingkat Satuan Pendidikan				
				1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Terealisasinya Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1 Unit	1 Unit	Kab. Bandung Barat	
				1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terealisasinya rehabilitasi sarana prasarana pendukung KBM	10 Ruang	10 Ruang	Kab. Bandung Barat	
				1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Ruang	1 Ruang	Kab. Bandung Barat	
				1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 Unit	1 Unit	Kab. Bandung Barat	
				1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1 Unit	1 Unit	Kab. Bandung Barat	
				1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpeliharanya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
				1.01.02.2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1 Unit	1 Unit	Kab. Bandung Barat	
				1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Peningkatan rasio jumlah siswa dengan kebutuhan meubelair	35 Unit	35 Unit	Kab. Bandung Barat	
				1.01.02.2.01.15 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Terlaksananya Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
				1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terpenuhinya perlengkapan belajar Sekolah Dasar (SD)	11 Paket	11 Paket	Kab. Bandung Barat	
				1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Terealisasinya Pengadaan Perlengkapan Siswa	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
				1.01.02.2.01.18 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	Terpeliharanya Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	1 Unit	1 Unit	Kab. Bandung Barat	
				1.01.02.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpeliharanya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 Ruang	1 Ruang	Kab. Bandung Barat	
				1.01.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Terpeliharanya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1 Unit	1 Unit	Kab. Bandung Barat	

							Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah					
							1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Terpenuhinya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terpenuhinya kebutuhan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Terlaksananya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terpenuhinya penyaluran Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SD/MI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terpenuhinya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Memperoleh gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan pengembangan dan peningkatan mutu	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Yang Menerima Dana BOS		146274 Siswa	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		30 Ruang		
								null		0 null		
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sarana Prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang di kelola	82.63 %	82.63 %	1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Terlaksananya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1 Unit	1 Unit	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Terpenuhinya Penambahan Ruang Kelas Baru	2 Ruang	2 Ruang	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terpenuhinya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Ruang	1 Ruang	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2 Unit	2 Unit	Semua Kab/Kota	

					1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
					1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium	1 Unit	1 Unit	Kab. Bandung Barat	
					1.01.02.2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1 Unit	1 Unit	Kab. Bandung Barat	
					1.01.02.2.02.10 Pembangunan Fasilitas Parkir	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Parkir	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
					1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 ruang	1 ruang	Semua Kab/Kota	
					1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	1 Ruang	1 Ruang	Kab. Bandung Barat	
					1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terpenuhinya sarana prasarana pendukung KBM	20 Ruang	20 Ruang	Kab. Bandung Barat	
					1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1 Ruang	1 Ruang	Kab. Bandung Barat	
					1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 Unit	1 Unit	Kab. Bandung Barat	
					1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1 Unit	1 Unit	Kab. Bandung Barat	
					1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1 Unit	1 Unit	Kab. Bandung Barat	
					1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1 Unit	1 Unit	Kab. Bandung Barat	
					1.01.02.2.02.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir		1 paket	1 paket	Kab. Bandung Barat	
					1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah di satuan pendidikan menengah	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
					1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Peningkatan rasio jumlah siswa dengan kebutuhan meubelair	22 paket	22 paket	Kab. Bandung Barat	

					1.01.02.2.02.26 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	"Terpenuhinya Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1 paket	1 paket	Kab. Bandung Barat	
					1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Terpenuhinya perlengkapan belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11 paket	11 paket	Kab. Bandung Barat	
					1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Terpenuhinya Pengadaan Perlengkapan Siswa	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota	
					1.01.02.2.02.29 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan		1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota	
					1.01.02.2.02.31 Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota	
					1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		1 kegiatan	1 kegiatan	Semua Kab/Kota	
					1.01.02.2.02.33 Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Terealisasinya Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
					1.01.02.2.02.34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Terealisasinya Perlengkapan Belajar Peserta Didik	1 paket	1 paket	Kab. Bandung Barat	
					1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Terpenuhinya ketersediaan buku-buku dan alat tulis pada Tingkat Satuan Pendidikan	1 set	1 set	Semua Kab/Kota	
					1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1 kegiatan	1 kegiatan	Semua Kab/Kota	
					1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terpenuhinya penyaluran Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SMP/MTs	1 kegiatan	1 kegiatan	Semua Kab/Kota	
					1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tertaksananya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
					1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tertaksananya kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
					1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	rsalurnannya dana pengembangan sekolah SMP/MTs, Tingkat pemahaman masyarakat terhadap program pendidikan dasar SMP/MTs	3 kegiatan	3 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
					1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa Yang Menerima Dana BOS		38953 Siswa	Kab. Bandung Barat	

			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah sarana prasarana, lembaga pendidikan PAUD dan sederajat, pendidik dan tenaga kependidikan, dan peserta didik pada jenjang PAUD yang dikelola.	63.01 %	63.01 %	1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Guru PAUD	3 Lembaga	3 Lembaga	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terpenuhinya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah lembaga penerima bantuan meubelair sekolah	10 Lembaga	10 Lembaga	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Tersedianya Perlengkapan PAUD untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Perluasan akses dalam peningkatan mutu pendidikan PAUD	19 Paket	19 Paket	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Terpenuhinya kebutuhan biaya personil peserta didik PAUD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Terlaksananya kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	31 Kegiatan	31 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah dokumen laporan pengelolaan BOP PAUD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
			1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keset araan	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	40 %	40 %	1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya fasilitas untuk pelaksanaan UNBK di lembaga PKBM	3 Lembaga	3 Lembaga	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya kebutuhan biaya personil peserta didik Non Formal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Tercapainya penuntasan buta aksara, Terwujudnya ketersediaan keterjangkauan kualitas layanan pendidikan keaksaraan yang terintegrasi	16 Kegiatan	16 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	

										dengan pendidikan kewirausahaan, Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup, Terselenggaranya elaksanaan PAKET A, B, C				
									1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Mengevaluasi kualitas layanan pada satuan pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terdapatnya tenaga pendidikan yang profesional dan visioner	76 Peserta	76 Peserta	Kab. Bandung Barat	
									1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya peningkatan kompetensi tenaga pendidik non formal	17 Orang	17 Orang	Kab. Bandung Barat	
									1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup komunitas masyarakat, Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pemenuhan kurikulum muatan lokal	85.00 %	85.00 %	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum muatan lokal jenjang pendidikan dasar yang ditetapkan	100 %	100 %	1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal di Pendidikan Dasar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									1.01.03.2.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									1.01.03.2.01.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersedianya Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Peningkatan jumlah guru dalam pemahaman tentang pengembangan kurikulum	631 Peserta	631 Peserta	Kab. Bandung Barat	
					1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum muatan lokal jenjang pendidikan PAUD dan Nonformal yang ditetapkan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	

									1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersusunnya Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									1.01.03.2.02.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersedianya Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kualitan dan Kuantiatas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	42.23 %	42.23 %	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terpenuhi kebutuhan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	95.2 %	95.2 %	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru, kepek, pengawas yang sudah tersertifikasi dan memiliki kompetensi yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar.	13942 Peserta	13942 Peserta	Kab. Bandung Barat	
		Persentase pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan	42,2 %	42,2 %										
		Persentase pemenuhan kebutuhan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan	42.2 %	42.2 %										
									1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya kegiatan pembelajaran di menggunakan kurikulum yang berlaku	5664 Peserta	5664 Peserta	Kab. Bandung Barat	
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perizinan satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Nonformal	60.00 %	60.00 %	1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah satuan pendidikan PAUD dan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah mendapat izin penyelenggaraan	30 Lembaga	30 Lembaga	1.01.05.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya pengawasan perizinan lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	Kab. Bandung Barat	
	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase pengembangan	80.05 %	80.05 %	1.01.06.2.01 Pembinaan.	Jumlah kegiatan pengembangan dan	80.05 %	80.05 %		Tersusunnya Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan		

	BAHASA DAN SASTRA	bahasa dan sastra			Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	pembinaan bahasa dan sastra daerah			1.01.06.2.01.01 Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota				Kab. Bandung Barat	
						Persentase pengembangan bahasa dan sastra melalui sektor pendidikan	100 %	100 %						
									1.01.06.2.01.03 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Tersampainya informasi mengenai Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									1.01.06.2.01.07 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	BB Poin	BB Poin	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya ketersediaan informasi perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang sesuai dengan standar	100 persen	100 persen	1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	5 doc	5 doc	Kab. Bandung Barat	
									1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA Dinas Kesehatan	5 doc	5 doc	Kab. Bandung Barat	
									1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan perubahan perangkat daerah	5 doc	5 doc	Kab. Bandung Barat	
									1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Kab. Bandung Barat	
									1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan perubahan perangkat daerah	5 doc	5 doc	Kab. Bandung Barat	
									1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	5 doc	5 doc	Kab. Bandung Barat	
					1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen keuangan yang akuntabilitas	100 Persen	100 Persen	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Capaian Kinerja Aparatur	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
									1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	10 doc	10 doc	Kab. Bandung Barat	
									1.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bimtek dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
									1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase jumlah laporan keuangan semesteran	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	

							Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD						
							1.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Evaluasi Prognosis	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat		
			1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100 persen	100 persen	1.02.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terpenuhinya sarana prasarana perangkat daerah	50 unit	50 unit	Kab. Bandung Barat		
							1.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	persentase jumlah ketersediaan pakaian khusus hari-hari tertentu	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat		
							1.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat		
			1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen (%)	100 Persen (%)	Kab. Bandung Barat		
							1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	21 jumlah	21 jumlah	Kab. Bandung Barat		
							1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia jumlah makanan dan minuman yang tersedia	61 jumlah 186 OK	61 jumlah 186 OK	Kab. Bandung Barat		
							1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	23 Jumlah	23 Jumlah	Kab. Bandung Barat		
							1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	6 jumlah	6 jumlah	Kab. Bandung Barat		
							1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi luar daerah	69 OK	69 OK	Kab. Bandung Barat		
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya prasarana kendaraan dinas	10 unit	10 unit	Kab. Bandung Barat		
							1.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya prasarana kendaraan dinas lapangan	10 unit	10 unit	Kab. Bandung Barat		

					1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 Persen (%)	100 Persen (%)	Kab. Bandung Barat	
									1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terselenggaranya jasa perlengkapan kantor	100 Persen (%)	100 Persen (%)	Kab. Bandung Barat	
					1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100 Persen	100 Persen	1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100 Persen (%)	100 Persen (%)	Kab. Bandung Barat	
									1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100 Persen (%)	100 Persen (%)	Kab. Bandung Barat	
									1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100 Persen (%)	100 Persen (%)	Kab. Bandung Barat	
					1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD				1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
										Terlaksananya pelayanan BLUD RSUD Cikalongwetan	100 Persen (%)	100 Persen (%)		
										Tersedianya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	100 %	100 %		
										Terselenggaranya pelayanan kesehatan rujukan masyarakat	100 %	100 %		
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi perorangan dan masyarakat	100 %	100 %	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan	0 Persen	0 Persen	1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Rujukan	2 unit	2 unit	Kab. Bandung Barat	
									1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	Terealisasi Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	3 unit	3 unit	Kab. Bandung Barat	
									1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	2 unit	2 unit		
									1.02.02.2.01.04 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terlaksananya pembangunan rumah dinas bagi tenaga kesehatan	5 unit	5 unit	Kab. Bandung Barat	
									1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit	Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan yang Dikembangkan Terlaksananya pengembangan fasilitas kesehatan rujukan	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	

							1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas	Terlaksananya pengembangan fasilitas kesehatan tingkat pertama	5 unit	5 unit	Kab. Bandung Barat	
							1.02.02.2.01.10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	80 Jumlah	80 Jumlah	Kab. Bandung Barat	
							1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhi sarana fasilitas pelayanan kesehatan	80 Jumlah	80 Jumlah	Kab. Bandung Barat	
							1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	84 Jumlah	84 Jumlah	Kab. Bandung Barat	
							1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya alat kesehatan di fasilitas kesehatan terkait	100 Persen (%)	100 Persen (%)	Kab. Bandung Barat	
							1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi					
							1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Ketersediaan obat dan vaksin	95 %	95 %	Kab. Bandung Barat	
								Persentase Puskesmas dan RSUD yang terdistribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan sesuai Kebutuhan	95 %	95 %		
								Persentase sediaan obat dasar dan perbekalan kesehatan dengan mutu yang terjaga baik	95 %	95 %		
							1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Terpenuhinya kebutuhan Bahan Habis Pakai di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 Persen (%)	100 Persen (%)	Kab. Bandung Barat	
							1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
							1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya					
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Persen	0 Persen	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Target SPM Pelayanan Ibu Hamil	100 %	100 %	Semua Kab/Kota	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0 Persen						

				Daerah Kabupaten/Kota								
				Tersedianya peralatan dan perbekalan kesehatan untuk UPT Laboratorium dan Penunjang Medik	35356 pemerik saan	35356 pemerik saan						
							1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terlaksananya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan bagi ibu bersalin	100 Persen (%)	100 Persen (%)	Semua Kab/Kota	
							1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Target SPM Pelayanan Bayi Baru Lahir	100 %	100 %	Semua Kab/Kota	
							1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
							1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Tingkat status Kesehatan anak usia sekolah sesuai standar SPM	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
							1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
							1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
							1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
							1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
							1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Gangguan Jiwa Berat	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
							1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
							1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Resiko Terpapar HIV	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
							1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Pelayanan Kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	100 Persen (%)	100 Persen (%)	Kab. Bandung Barat	
								Persentase pelayanan khitanan massal	100 Persen (%)	100 Persen (%)		
							1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	% balita stunting /pendek (TB/U)	14.2 (%)	14.2 (%)	Kab. Bandung Barat	
								% balita underweight (BB/U)	7.8 (%)	7.8 (%)		
								% balita wasting (BB/TB)	4.8 (%)	4.8 (%)		
								% ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang mendapat makanan tambahan	77.5 (%)	77.5 (%)		

						Peningkatan % rumah tangga mengkonsumsi garam beriodium	98 (%)	98 (%)		
						Penurunan % ibu hamil anemia	9.5 (%)	9.5 (%)		
					1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase penyelenggaraan pengukuran kebugaran calon jemaah haji tahunan	100 (%)	100 (%)	Kab. Bandung Barat	
						Persentase Puskesmas yang memiliki Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	40 (%)	40 (%)		
						Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan Kesehatan Olahraga di masyarakat	55 (%)	55 (%)		
						Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja sesuai standar	55 (%)	55 (%)		
					1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase desa dengan status STBM	85 (%)	85 (%)	Kab. Bandung Barat	
						Persentase SAB yang memenuhi syarat kesehatan	38.33 (%)	38.33 (%)		
						Persentase TPM (rumah makan dan jasaboga) yang memenuhi syarat kesehatan	65 (%)	65 (%)		
						Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	65 (%)	65 (%)		
						Tingkat Ketepatan Waktu puskesmas dalam pelaporan dan pelaksanaan program kesling secara lengkap & sesuai standar	100 (%)	100 (%)		
					1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	null		0 null	Kab. Bandung Barat	
					1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan persentase pelaporan surveilans kesehatan	95 (%)	95 (%)	Kab. Bandung Barat	
					1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Cakupan Pelayanan Kesehatan ODMK	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
					1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
					1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase Keberhasilan Tindak lanjut Intervensi dari hasil Pendataan Keluarga Sehat pada program PIS PK di 32 Puskesmas	75 (%)	75 (%)	Semua Kab/Kota	
						Persentase Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji sesuai standar	100 (%)	100 (%)		
						Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas dengan hasil Kategori 1	37.5 (%)	37.5 (%)		
						Persentase vaksinasi bayi dan balita	100 (%)	100 (%)		
						Persentase vaksinasi meningitis pada calon jemaah haji	100 (%)	100 (%)		
						Terpetakan Informasi Keluarga Sehat pada program PIS PK secara lengkap	100 (%)	100 (%)		

						Tingkat Pengembangan Puskesmas Dengan Nursing Center	22 (%)	22 (%)		
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kejadian DBD (insiden rate DBD)	49 %	49 %	Kab. Bandung Barat	
						Angka kematian DBD (Case FatalityRate DBD)	1 %	1 %		
						Cakupan pemberian obat pencegahan massal (POPM) kecacingan	90 %	90 %		
						Cakupan penanganan Covid 19	0 %	0 %		
					1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Masyarakat Kurang Mampu yang Terdaftar sebagai Peserta JKN	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
					1.02.02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Cakupan Pelayanan Deteksi Dini NAPZA	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
					1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Prosentase Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke LaboratoriumRujukan	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
					1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Tersedianya media promosi dan informasi untuk mendukung terwujudnya kabupaten bandung barat sehat	10 Jumlah	10 Jumlah	Kab. Bandung Barat	
					1.02.02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prosentase Fasilitas Telemedicine di Puskesmas dan RS yang tersedia	0.15 %	0.15 %	Kab. Bandung Barat	
					1.02.02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Persentase tersedianya data kesehatan melalui sistem informasidata profil kesehatan	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
					1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat di RSUD Cililin	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
						Presentase Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat di RSUD Cikalongwetan	100 %	100 %		
						Prosentase kualitas pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat	100 %	100 %		
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di wilayah Kerja Puskesmas Cibodas	100 %	100 %		
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di wilayah Kerja Puskesmas Cicangkanggirang	100 %	100 %		
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di wilayah Kerja Puskesmas Jayamekar	100 %	100 %		
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di wilayah Kerja Puskesmas Mukapayung	100 %	100 %		

						Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di wilayah Kerja Puskesmas Pataruman	100 %	100 %		
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di wilayah Kerja Puskesmas Rongga	100 %	100 %		
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di wilayah Kerja Puskesmas Sindangkerta	100 %	100 %		
						Capaian Layanan Kesehatan Masyarakat	100 %	100 %		
						Meningkatnya Jangkauan Pelayanan Kesehatan Dasar di PPK 1	84361 Orang	84361 Orang		
						Meningkatnya Pelayanan Kesehatan dasar di PPK I	100 %	100 %		
						null		0 null		
						Prosentase kualitas pelayanan kesehatan pertama bagi masyarakat	100 %	100 %		
						Prosentase kualitas pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat	100 (%)	100 (%)		
						Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Puskesmas DTP Cililin	100 %	100 %		
						Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Puskesmas DTP Jayagiri	100 %	100 %		
						Terlaksananya pelayanan promotif dan preventif kesehatan di wilayah kerja Puskesmas DTP Rajamandala	50388 orang	50388 orang		
						Terlaksananya Pelayanan Puskesmas	100 %	100 %		
					1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya pelayanan kesehatan di unit fasilitas kesehatan lainnya	100 Persen (%)	100 Persen (%)	Kab. Bandung Barat	
						Tersedianya peralatan dan perbekalan kesehatan untuk UPT laboratorium dan penunjang medik	35356 pemerik saan	35356 pemerik saan		
					1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terealisasinya akreditasi faskes	5 Jumlah	5 Jumlah		
					1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan pelayanan KIPI	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
					1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan penanganan wabah	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
					1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	null		0 null	Semua Kab/Kota	

				1.02.02.2.03 Penyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	-	0 Jumlah	0 Jumlah	1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Prosentase	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
								1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet					
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Persen	0 Persen	1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Terealisasinya pemantauan faskes	5 Jumlah	5 Jumlah	Kab. Bandung Barat	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK yang memiliki kapasitas pelayanan kesehatan sesuai standar	50 %	50 %	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	60 Persen	60 Persen	1.02.03.2.01.02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM berdasarkan Aplikasi Renbut SDM dan Anjab ABK	100 Persen	100 Persen	1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan					
								1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Prosentase Kegiatan pendataan dan pemenuhan SDM Kesehatan	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
								1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan	100 Persen (%)	100 Persen (%)	Kab. Bandung Barat	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Uji Kompetensi Bidang Kesehatan	50 Persen	50 Persen	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatah	1 Tahun	1 Tahun		

1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya kegiatan pengawasan perizinan apotek, toko obat, dll.	100 Persen (%)	100 Persen (%)	Kab. Bandung Barat	
							1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Prosentase	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
			1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1.02.04.2.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya pengawasan PKRT dan Produsen alat kesehatan kelas 1	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
			1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70 Persen	70 Persen	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terealisasinya pemantauan produk rumah tangga	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
			1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Industri Rumah Tangga	30 Persen	30 Persen	1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terealisasinya pemantauan produk rumah tangga	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	

					Minuman Industri Rumah Tangga									
									1.02.04.2.06.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Tersedianya data pemantauan produk rumah tangga	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat yang menjalin kemitraan pelayanan bidang kesehatan	0 %	0 %	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Persen	0 Persen	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terealsasinya Pemberdayaan Masyarakat dalam Promosi Kesehatan	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
					1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga	0 Persen	0 Persen	1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terealsasinya Pemberdayaan Masyarakat dalam Promosi Kesehatan	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
					1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	10 kegiatan	10 kegiatan		
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	

					1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
			1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	Kab. Bandung Barat	
					1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dalam satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
					1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
			1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dalam satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
			1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jenis Pakaian Khusus hari-hari tertentu	2 Jenis	2 Jenis	Kab. Bandung Barat	
					1.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan administrasi kepegawaian dalam satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
					1.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Formal	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
			1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	9 Jenis	Kab. Bandung Barat	
					1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Jenis	14 Jenis	Kab. Bandung Barat	

					1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	21 Jenis	21 Jenis	Kab. Bandung Barat	
					1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor dalam satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
					1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	10 Jenis	10 Jenis	Kab. Bandung Barat	
					1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
					1.03.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu dalam satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
					1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	3 Lokasi	3 Lokasi	Kab. Bandung Barat	
			1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebelair	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Bandung Barat	
			1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Administrasi dan Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
					1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
					1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terciptanya Lingkungan yang Bersih	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala	3 Unit	3 Unit	Kab. Bandung Barat	
					1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional lapangan yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala	89 Unit	89 Unit	Kab. Bandung Barat	

					1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dilakukan perbaikan	47 Unit	47 Unit	Kab. Bandung Barat	
					1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dilakukan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala	3 Unit	3 Unit	Kab. Bandung Barat	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen hasil perencanaan pembangunan reservoir	1 Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Perencanaan	Kab. Bandung Barat	
					1.03.02.2.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen perencanaan pengendalian banjir	1 Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Perencanaan	Kab. Bandung Barat	
					1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah lokasi tantaran dan tanggul sungai yang direhabilitasi dan dipelihara, berikut jumlah dokumen pengawasan	1 Dokumen Pengawasan	1 Dokumen Pengawasan	Kab. Bandung Barat	
					1.03.02.2.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
					1.03.02.2.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Pengelolaan SDA	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
			1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	

					1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan					
					1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		1 Dokumen Pengawasan	1 Dokumen Pengawasan	Kab. Bandung Barat	
						Jumlah lokasi jaringan irigasi yang direhabilitasi/dipelihara, berikut jumlah dokumen pengawasan	12 Lokasi	12 Lokasi		
					1.03.02.2.02.15 Rehabilitasi Bendung Irigasi		1 Dokumen Pengawasan	1 Dokumen Pengawasan	Kab. Bandung Barat	
						Jumlah lokasi reservoir yang direhabilitasi/ dipelihara, berikut jumlah dokumen pengawasannya	4 Lokasi	4 Lokasi		
					1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		1 Dokumen Pengawasan	1 Dokumen Pengawasan	Kab. Bandung Barat	
						Jumlah lokasi kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, berikut jumlah dokumen pengawasannya	3 Lokasi	3 Lokasi		
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	0.13 %	0.13 %	Kab. Bandung Barat	
					1.03.03.2.01.17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	63.72 %	63.72 %	Kab. Bandung Barat	
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah lokasi pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2 Lokasi	2 Lokasi	Kab. Bandung Barat	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Presentase kegiatan pembangunan/penyediaan sub sistem pengelolaan setempat	64.1 %	64.1 %	Kab. Bandung Barat	
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					

					1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang drainase lingkungan terbangun	1.6 Km	1.6 Km	Kab. Bandung Barat	
					1.03.06.2.01.14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang drainase lingkungan yang direhabilitasi	0.37 Km	0.37 Km	Kab. Bandung Barat	
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		1.03.07.2.01 Penyelenggaraa n Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pembangunan infrastruktur kawasan permukiman di daerah kab/kota	15 lokasi	15 lokasi	Kab. Bandung Barat	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		1.03.08.2.01 Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah dokumen izin mendirikan bangunan dan Sertifikat laik fungsi bangunan serta laporan data bangunan gedung.	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung Pemerintah terbangun dan jumlah dokumen perencanaan tersusun	2 DED 4 UNIT	2 DED 4 UNIT	Kab. Bandung Barat	
					1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Manual (Harga Satuan)	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	Kab. Bandung Barat	
					1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi kegiatan rehabilitasi dan renovasi bangunan gedung Pemerintah.	12 Lokasi	12 Lokasi	Kab. Bandung Barat	
					1.03.08.2.01.13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pemeliharaan dan perawatan bangunan Gedung	4 LOKASI	4 LOKASI	Kab. Bandung Barat	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A		1.03.09.2.01 Penyelenggaraa n Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	

	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN		1.03.10.2.01 Penyelenggaraa n Jalan Kabupaten/Kota		1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Dokumen Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	9 Dokumen Perencanaan	9 Dokumen Perencanaan	Semua Kab/Kota	
					1.03.10.2.01.03 Pengelolaan Leger Jalan	Panjang jalan hasil pengelolaan leger	94 Km	94 Km	Kab. Bandung Barat	
					1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan hasil survey kondisi jalan/jembatan	188 Km	188 Km	Kab. Bandung Barat	
					1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan hasil rekonstruksi	6 Km	6 Km	Kab. Bandung Barat	
					1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan hasil rehabilitasi	5 Km	5 Km	Kab. Bandung Barat	
					1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan hasil pemeliharaan berkala	44 Km	44 Km	Kab. Bandung Barat	
					1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan hasil pemeliharaan rutin	44 Km	44 Km	Kab. Bandung Barat	
					1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan hasil rehabilitasi	1 Jembatan	1 Jembatan	Kab. Bandung Barat	
					1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan hasil pemeliharaan rutin	1 Jembatan	1 Jembatan	Kab. Bandung Barat	
					1.03.10.2.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat		1 Jalan	1 Jalan	Kab. Bandung Barat	
						Kegiatan penanggulangan bencana/tanggap darurat	2 TPT	2 TPT		
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		1.03.11.2.01 Penyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
					1.03.11.2.01.06 Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga yang tersertifikasi jasa konstruksi	30 Peserta	30 Peserta	Kab. Bandung Barat	
			1.03.11.2.02 Penyelenggaraa n Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1.03.11.2.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
					1.03.11.2.02.02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung layanan informasi jasa konstruksi	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota	

			1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		1.03.11.2.03.03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan pembinaan pengusaha konstruksi di Kabupaten Bandung Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG		1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan RTRW yang ditetapkan	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RDTRK	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tata ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang RDTR	2 Kegiatan..	2 Kegiatan..	Kab. Bandung Barat	
			1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.12.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kordinasi dan sinkronisasi Penyusunan RTRW kabupaten	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
					1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana rinci tataruang	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
			1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen kajian pemanfaatan ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah dokumen sistem informasi penataan ruang	2 Dokumen	2 Dokumen		
			1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.03.12.2.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah alat peraga pengendalian tata ruang Kabupaten	20 UNIT	20 UNIT	Kab. Bandung Barat	

					1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundangan terkait pengendalian penataan ruang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
					1.03.12.2.04.03 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kegiatan pengendalian penataan ruang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.04.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					1.04.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					1.04.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					1.04.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
			1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Capaian Kinerja Aparatur	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
					1.04.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertaksananya Tertib Administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
					1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
					1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	3 dokumen	3 dokumen	Kab. Bandung Barat	
					1.04.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Tersedianya dokumen Pelaporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	

					Prognosis Realisasi Anggaran					
			1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Harian untuk Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
					1.04.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah 1 Kegiatan Terlaksananya sosialisasi SIPD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
			1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	15 Jenis	15 Jenis	Kab. Bandung Barat	
					1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis	8 Jenis	Kab. Bandung Barat	
					1.04.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Belanja Peralatan Rumah Tangga Penunjang Kegiatan	20 Jenis	20 Jenis	Kab. Bandung Barat	
					1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Teraksananya Belanja Dekorasi Penunjang Pameran Hari Besar	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
						Terlaksananya Belanja Alat Tulis Kantor	65 Jenis	65 Jenis		
						Terlaksananya Makan dan Minum Rapat Penunjang Kegiatan Rapat Internal dan Eksterna	12 Bulan	12 Bulan		
					1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Belanja Cetak Kantor dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12 Jenis	12 Jenis	Kab. Bandung Barat	
					1.04.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksana belanja publikasi media massa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
						Terlaksananya Belanja Surat Kabar	12 Bulan	12 Bulan		
					1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi/Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kab/Prov lain	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
			1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertibnya pelayanan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
					1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Jasa Telekomunikasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
					1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Dinas perumahan dan Permukiman	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	

			1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
					1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
					1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	50 Unit	50 Unit	Kab. Bandung Barat	
					1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	identifikasi perumahan rawan bencana	1 kecamatan	1 kecamatan	Kab. Bandung Barat	
					1.04.02.2.01.04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	identifikasi rumah terkena bencana dan kawasan rawan bencana	1 Kawasan	1 Kawasan	Kab. Bandung Barat	
					1.04.02.2.01.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	data rumah potensial untuk rehabilitasi dan relokasi	2 desa	2 desa	Kab. Bandung Barat	
			1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.02.03 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	peningkatan masyarakat yang dapat mengakses pembiayaan perumahan	25 orang	25 orang	Kab. Bandung Barat	
			1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	5 unit	5 unit	Kab. Bandung Barat	

					1.04.02.2.03.02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	dokumen perencanaan untuk penanganan bencana atau relokasi program kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
			1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	pelaksanaan koordinasi dalam distribusi rumah bagi korban bencana dan relokasi program kabupaten/kota	5 unit	5 unit	Kab. Bandung Barat	
			1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		1.04.02.2.06.01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	fasilitasi pelaksanaan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
					1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
			1.04.02.2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		1.04.02.2.07.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	fasilitasi pelaksanaan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		1.04.03.2.01.02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Tersedianya Dokumen Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	16 Kecamatan	16 Kecamatan	Kab. Bandung Barat	
					1.04.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Tersedianya Dokumen Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	16 Kecamatan	16 Kecamatan	Kab. Bandung Barat	
			1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan		1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Tersedianya Dokumen RP2KPKP	16 Kecamatan	16 Kecamatan	Kab. Bandung Barat	

				Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha									
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh	16 Kecamatan	16 Kecamatan	Kab. Bandung Barat	
								1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh	10 Hektar	10 Hektar	Kab. Bandung Barat	
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya rutihlu diluar kawasan permukiman	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
								1.04.04.2.01.02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Pembangunan PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 Ha	100 %	100 %	Semua Kab/Kota	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	penyusunan perencanaan PSU perumahan formal	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
								1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	pembangunan dan rehabilitasi PSU perumahan formal	1 lokasi	1 lokasi	Kab. Bandung Barat	
								1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	pelaksanaan sinkronisasi penyerahan dan penyediaan PSU perumahan formal	1 unit	1 unit	Kab. Bandung Barat	
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	BB Poin	BB Poin	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Bandung Barat	

	KABUPATEN/KOT A	Nilai Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	BB Poin	BB Poin	Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah tercapai 100%	100 persen	100 persen		Tersedianya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen		
		Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BB Poin	BB Poin		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evakuasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat	6 Dokumen	6 Dokumen		Tersusunnya Dokumen Renja	1 Dokumen	1 Dokumen		
									1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
										Tersedianya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen		
										Tersusunnya Dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen		
									1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
										Tersedianya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	2 dokumen	2 dokumen		
										Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
									1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
										Tersedianya koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	2 dokumen	2 dokumen		
										Tersusunnya Dokumen DPA	1 Dokumen	1 Dokumen		
									1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
										Tersedianya koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
										Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
									1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
										Tersedianya evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen		
										Tersusunnya Dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen		
					1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan	2 Jenis	2 Jenis	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	22 orang/bulan	Kab. Bandung Barat	
						Penggajian ASN dan pelaporan keuangan ASN terpenuhi	100 persen	100 persen		Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	11 Bulan	11 Bulan		
						Terlaksananya pengadministrasian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27 Dokumen	27 Dokumen		Tersedianya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	100 persen		
										Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		

						1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							T Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	2 dokumen		
						1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		
							Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
			1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan, Pengadaan dan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Jenis	2 Jenis	1.05.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Pakaian Olahraga Bagi pegawai BPBD	53 orang	53 orang	Kab. Bandung Barat
				Persentase Pengelolaan Administrasi kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %	100 %					
				TerlaksananyaPersentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen					
						1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
							Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	247 stell	247 stell		
							tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	161 stell	161 stell		
						1.05.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen	24 dokumen	24 dokumen	Kab. Bandung Barat	
						1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		90 orang	Kab. Bandung Barat	
							Meningkatnya Kapasitas Pegawai BPBD dalam Penanggulangan Bencana	53 orang	53 orang		
							Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tupoksi	1 kegiatan	1 kegiatan		

			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Bahan dan Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah	78 Jenis	78 Jenis	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Bandung Barat	
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %	100 %		TERSEDIAANYA KOMPONEN INSTALASI LISTRIK	7 JENIS	7 JENIS		
				Terlaksananya persentase administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen						
							1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	5 Jenis	Kab. Bandung Barat	
								TERSEDIAANYA PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11 JENIS	11 JENIS		
							1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	11 Jenis	11 Jenis	Kab. Bandung Barat	
								TERSEDIAANYA PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	17 JENIS	17 JENIS		
							1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
								Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	47 Jenis	47 Jenis		
								TERLAKSANANYA PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	48 JENIS	48 JENIS		
							1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
								Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	6 Jenis	6 Jenis		
								TERSEDIAANYA PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	10000 LEMBA R	10000 LEMBA R		
							1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	4 Jenis	4 Jenis		
								TERLAKSANANYA BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5 JENIS	5 JENIS		
							1.05.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minum tamu	300 Orang	300 Orang	Kab. Bandung Barat	
								TERSEDIAANYA FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	48 KALI	48 KALI		
							1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	28 Kali	28 Kali	Kab. Bandung Barat	
								Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	10 Kegiatan	10 Kegiatan		

						Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TERSEDIAANYA PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	40 KALI	40 KALI		
			1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2 Jenis	2 Jenis	1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	Kab. Bandung Barat
				Terlaksananya Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	100 Persen		TERSEDIAANYA PENGADAAN MEBEL	5 JENIS	5 JENIS	
						1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 Unit	43 Unit	Semua Kab/Kota	
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18 Jenis	18 Jenis	1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	1 Jenis	1 Jenis	Kab. Bandung Barat
				Terlaksananya jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	11 jenis	11 jenis		TERSEDIAANYA PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3 JENIS	3 JENIS	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	12 Bulan					
						1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Bandung Barat	
							Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	3 Jenis		
							TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3 JENIS	3 JENIS		
						1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum	14 jenis	14 jenis	Kab. Bandung Barat	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	5 Unit	1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	11 unit	Kab. Bandung Barat
				Kesiapan perangkat daerah dalam menunjang urusan pemerintah daerah	12 unit	12 unit		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	4 Unit	4 Unit	

					Terlaksananya Pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan dinas dan Operational Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30 Unit	30 Unit							
								1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	20 unit	Kab. Bandung Barat		
									TERSEDIAANYA PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	11 UNIT	11 UNIT			
								1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung	1 Unit	1 Unit	Kab. Bandung Barat		
									TESEDIAANYA PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1 UNIT	1 UNIT			
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	5 Jenis	5 Jenis	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah pelaksanaan patroli dan pengamanan pengendalian umum	43 Kegiatan	43 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
								1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah penindakan dan penanganan ketentraman dan ketertiban umum	30 Kegiatan	30 Kegiatan	Kab. Bandung Barat		
								1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota Satlinmas yang mendapatkan bimtek	345 orang	345 orang	Kab. Bandung Barat		
								1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota yang mengikuti pelatihan	180 orang	180 orang	Kab. Bandung Barat		

								1.05.02.2.01.08 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah unit pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	26 Unit	26 Unit	Kab. Bandung Barat		
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penegakan pelanggaran Perda dan Perkada	80 %	80 %	1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda/Perkada kepada kelompok/masyarakat		1 laporan	Kab. Bandung Barat		
								1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pengawasan pelaksanaan Perda	32 kegiatan	32 kegiatan	Kab. Bandung Barat		
								1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penyidikan/penanganan pelanggaran Perda	4 Kali	4 kegiatan	Kab. Bandung Barat		
				1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang mendapatkan pembinaan	11 orang	11 orang	1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan	11 orang	11 orang	Kab. Bandung Barat		
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Kapasitas Daerah	Sedang Indeks	Sedang Indeks	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	1.5 %	1.5 %	1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	400 Orang	400 Orang	Semua Kab/Kota		
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara dan aparaturnya yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	1.5 %	1.5 %	1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota		
								1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah apratur dan warga Negara yang ikut pelatihan	400 Orang	400 Orang	Semua Kab/Kota		
								1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota		

									1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun petugas	50 Unit	50 Unit	Semua Kab/Kota	
									1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabuoaten/Kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
									1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	25 Orang	25 Orang	Semua Kab/Kota	
									1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
									1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	200 Orang	200 Orang	Semua Kab/Kota	
					1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
									1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	1000 Orang	1000 Orang	Semua Kab/Kota	
									1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	180 Paket	180 Paket	Semua Kab/Kota	
									1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	100 %	100 %	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya SPM kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	69 Persen	69 Persen	1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	TERSEDIANYA PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	16 KECAMATAN	16 KECAMATAN	Kab. Bandung Barat	
									1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN PENANGGULAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	13 JENIS	13 JENIS		

			1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Presentase yang memenuhi standar kebakaran gedung	60 kegiatan	60 kegiatan	1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	60 Kegiatan	60 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
			1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap resiko kebakaran	1 kegiatan	1 kegiatan	1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Tersedianya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A		1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	50 orang	50 orang	Kab. Bandung Barat	
							1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Bandung Barat	
							1.06.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
							1.06.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
							1.06.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
			1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Kab. Bandung Barat	
							1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semeste ran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
			1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.06.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		80 orang	80 orang	Kab. Bandung Barat	
							1.06.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	terlaksananya kegiatan peraturan perundang - undangan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat	

			1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2 Gedung	2 Gedung	Kab. Bandung Barat	
					1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Jenis	2 Jenis	Kab. Bandung Barat	
					1.06.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Kab. Bandung Barat	
					1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	null		0 null	Kab. Bandung Barat	
					1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Kab. Bandung Barat	
					1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Kab. Bandung Barat	
					1.06.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu				Kab. Bandung Barat	
					1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Kab. Bandung Barat	
			1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.06.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubeler	2 Jenis	2 Jenis	Kab. Bandung Barat	
			1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3000 lembar	3000 lembar	Kab. Bandung Barat	
					1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2 unit gedung	2 unit gedung	Kab. Bandung Barat	
					1.06.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
			1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		18 unit mobil dan motor	18 unit mobil dan motor	Kab. Bandung Barat	

			Pemerintahan Daerah							
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tenaga Kesejahteraan 16 Orang	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
					1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Fakir Miskin	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		1.06.03.2.01.01 Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Tersedianya fasilitas pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi bagi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	4 orang	4 orang	Kab. Bandung Barat	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Tersedianya permakanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	130 orang	130 orang	Kab. Bandung Barat	
					1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Tersedianya sandang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	130 orang	130 orang	Kab. Bandung Barat	
					1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya Alat Bantu Kursi Roda untuk penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	70 orang	70 orang	Kab. Bandung Barat	
					1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Tersedianya pelayanan reunifikasi keluarga untuk penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	30 orang	30 orang	Kab. Bandung Barat	

					1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tersedianya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial untuk penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	75 orang	75 orang	Kab. Bandung Barat	
					1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Tersedianya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis untuk penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	50 orang	50 orang	Kab. Bandung Barat	
					1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Tersedianya fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	60 orang	60 orang	Kab. Bandung Barat	
					1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Tersedianya Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	30 orang	30 orang	Kab. Bandung Barat	
					1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersedianya pemberian layanan data dan pengaduan bagi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	16 kecamatan	16 kecamatan	Kab. Bandung Barat	
					1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya pemberian pelayanan kedaruratan bagi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	150 orang	150 orang	Kab. Bandung Barat	
					1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Tersedianya pemberian pelayanan penelusuran keluarga bagi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	30 orang	30 orang	Kab. Bandung Barat	
			1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan		1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan PPKS	150 Orang	150 Orang	Kab. Bandung Barat	

			NAPZA di Luar Panti Sosial							
					1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya pemberian layanan rujukan bagi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	30 orang	30 orang	Kab. Bandung Barat	
					1.06.04.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Tersedianya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	100 orang	100 orang	Kab. Bandung Barat	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Fakir Miskin	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
					1.06.05.2.02.03 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya fasilitas Sosial Kesejahteraan Keluarga	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
					1.06.05.2.02.04 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA		1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Tersedianya Makanan untuk Korban Bencana	150 Paket	150 Paket	Kab. Bandung Barat	
					1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	Tersedianya Penyediaan Sandang	200 Paket	200 Paket	Kab. Bandung Barat	
					1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Penampungan Pengungsi	100 Paket	100 Paket	Kab. Bandung Barat	
					1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terlaksananya Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	350 Paket	350 Paket	Kab. Bandung Barat	
					1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial	Terlaksananya Pelayanan Dukungan Psikososial	200 Paket	200 Paket	Kab. Bandung Barat	
			1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				Kab. Bandung Barat	
					1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	

	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja	BB Poin	BB Poin	2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersusunya dokumen perencanaan	5 dokumen	5 dokumen	2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Bandung Barat	
									2.07.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	penyusuna dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat
									2.07.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	penyusuna dokumen RKA perubahan	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat
									2.07.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	penyusuna dokumen DPA	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat
									2.07.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	penyusuna dokumen DPA perubahan	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat
									2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	penyusuna dokumen capaian kinerja	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat
									2.07.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Bandung Barat	
					2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya admistrasi keuangan	5 kegiatan	5 kegiatan	2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarkanya gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat
									2.07.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	penyusuna dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat
									2.07.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	pepenyediaan dokumen pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat
									2.07.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	penyusunan dokumen keuangan	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat
					2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada	dokumen pengolahan barang milik daerah	3 dokuem	3 dokuem	2.07.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Kab. Bandung Barat	

			Perangkat Daerah									
							2.07.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Kab. Bandung Barat	
							2.07.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Kab. Bandung Barat	
			2.07.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	terlaksananya administarsi pendapatan daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	2.07.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	penyusunan perencanaan retribusi	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
			2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya admistrasi kepegawaian	5 kegiatan	5 kegiatan	2.07.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				Kab. Bandung Barat	
							2.07.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Kab. Bandung Barat	
							2.07.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Kab. Bandung Barat	
							2.07.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				Kab. Bandung Barat	
							2.07.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Kab. Bandung Barat	
			2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya penunjang admistrasi umum	7 kegiatan	7 kegiatan	2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen listrik	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedinya perlengkapan kantor	4 jenis	4 jenis	Kab. Bandung Barat	
							2.07.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedinya perlengkapan rumah tangga	6 jenis	6 jenis	Kab. Bandung Barat	
							2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedia alat tulis kantor	10 jenis	10 jenis	Kab. Bandung Barat	
							2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya cetakan	10 jenis	10 jenis	Kab. Bandung Barat	
							2.07.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	6 media cetak	6 media cetak	Kab. Bandung Barat	

									2.07.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
									2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	rapat koordinasi	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pengadaan sarana penunjang	1 kegiatan	1 kegiatan		2.07.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	pengadaan mebel	4 jenis	4 jenis	Kab. Bandung Barat	
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang admistrasi	3 kegiatan	3 kegiatan		2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedia materai	800 lembar	800 lembar	Kab. Bandung Barat	
									2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa internet	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
									2.07.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya jasa pemeliharaan perlengkapan kantor	4 jenis	4 jenis	Kab. Bandung Barat	
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya oprasional Kantor	2 kegiatan	2 kegiatan		2.07.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan dan paja kendaraan dinas/oprasional	14 unit	14 unit	Kab. Bandung Barat	
									2.07.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantorl	1 gedung	1 gedung	Kab. Bandung Barat	
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	dokumen perencanaan tenaga kerja daerah	2 dokumen	2 dokumen	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	tersusunnya dokumen RTK	2 dokumen	2 dokumen	2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	tersusunnya dokumen RTKD makro	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro					
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja terdaftar yang dilatih	610 Orang	610 Orang	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	peningkatan keterampilan pencari kerja dalam pasar kerja	740 0	740 0	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	terlatihnya pencari kerja	1000 orang	1000 orang	Kab. Bandung Barat	
									2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta	tersertifikatnya instruktur	50 orang	50 orang	Kab. Bandung Barat	

								untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja					
								2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	tersedanya sarana pelatihan	1 paket	1 paket	Kab. Bandung Barat	
				2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	terciptanya wirausaha baru	50 orang	50 orang	2.07.03.2.04.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	terlatihnya wirausaha baru	50 orang	50 orang	Kab. Bandung Barat	
				2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	tersusunnya dokumen monev	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	15775 Orang	15775 Orang	2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	pelayanan antar keraja	1 kegiatan	1 kegiatan	2.07.04.2.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja				
								2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja	terlaksananya pelayanan antar kerja	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
								2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja					
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	tersedianya informasi pasar kerja	3 kegiatan	3 kegiatan	2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					
								2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja					
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	meningkatkan perlindungan PMI	1 kegiatan	1 kegiatan	2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	peningkatan pelayanan perlindungan PMI	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
								2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	pemberdayaan pekerja migran purna penempatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
				2.07.04.2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	diterbitkannya perpanjangan imta	1 kegiatan	1 kegiatan	2.07.04.2.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan perlindungan	100 %	100 %	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan	tersusunnya peraturan pemerintah agar terciptanya	3 0	3 0	2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				

		dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan			Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	kondisi hubungan industrial yang kondusif								
						tersusunnya peraturan pemerintah	3 kegiatan	3 kegiatan						
									2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	tersusunnya pkb	8 PKB	8 PKB	Kab. Bandung Barat	
									2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	terdanya sarana hubungan instrial	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
					2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	terselesaikannya perselisihan Hubungan Industrial	100 perse	100 perse	2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	mediator perselisihan	50 %	50 %	Kab. Bandung Barat	
									2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	mediator perselisihan	50 %	50 %	Semua Kab/Kota	
									2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	terekapnya keanggotaan serikat buruh dan perusahaan	35 perusahaan	35 perusahaan	Kab. Bandung Barat	
									2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya oprasional Tripartit	12 kali	12 kali	Kab. Bandung Barat	
									2.07.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	terlaksanan jaminan sosial bagi pekerja	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat	

									dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang memiliki komitmen pada peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan ekonomi	82,5 %	82,5 %	2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga layanan peningkatan ekonomi perempuan dalam keluarga	33 Kelompok	33 Kelompok	2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terlatih.	33 Kelompok	33 Kelompok	Kab. Bandung Barat		
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	100 %	100 %	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga yang mempunyai komitmen pencegahan Kekerasan terhadap perempuan	4 Lembaga	4 Lembaga	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah dan Mitra yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	75 Orang	75 Orang	Kab. Bandung Barat		
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang terlayani dalam rangka perlindungan korban kekerasan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan yang terlatih	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang memiliki kesadaran dalam mewujudkan kesetaraan	39 %	39 %	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan	Jumlah kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang terlayani dalam rangka peningkatan kualitas keluarga.	80 Orang	80 Orang	Kab. Bandung Barat		

		gender dan hak anak			Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
					2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	10	10	2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga Binaan yang mendapatkan pelayanan komprehensif	100 Kepala Keluarga	100 Kepala Keluarga	Kab. Bandung Barat	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data serta profil gender dan anak Hasil analisis	85 %	85 %	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen data terpilah gender dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data Gender dan Anak di Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Keikutsertaan organisasi atau lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	67 %	67 %	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga layanan dalam mewujudkan Pemenuhan Hak Anak yang terlatih	25 Orang	25 Orang	2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang teradvokasi dalam pemenuhan hak anak di daerah.	25 Orang	25 Orang	Kab. Bandung Barat	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan korban kekerasan terhadap anak	100 %	100 %	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mempunyai komitmen dalam pencegahan terhadap anak	340	340	2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah dan Mitra yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	75 Orang	75 Orang	Kab. Bandung Barat	
									2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mempunyai komitmen terhadap perlindungan khusus anak	16 Lembaga	16 Lembaga		
					2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan				2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah lembaga layanan pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	2 Kegiatan	2 Kegiatan		

			Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota							
			2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlatih	16 Orang	16 Orang				
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Nilai Sakip	71.3 poin	71.3 poin	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	71.3 poin	71.3 poin	2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum OPD DKPP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat
									Renja DKPP	1 Dokumen	1 Dokumen	
								2.09.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA DKPP Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat
								2.09.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RKAP DKPP Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat
								2.09.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA DKPP Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat
								2.09.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPPA DKPP Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat
								2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Monev DKPP Tahun 2022	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Bandung Barat
									LKPJ DKPP Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	
									RKPD DKPP Tahun 2022	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Bandung Barat
									LAKIP DKPP Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	
								2.09.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LPPD DKPP Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN DKPP Tahun 2022	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat
									Tunjangan ASN DKPP Tahun 2022	1 Tahun	1 Tahun	
								2.09.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jasa Administrasi	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat

						2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Akhir Tahun DKPP Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
						2.09.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Bandung Barat	
							Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Bandung Barat	
							Laporan Keuangan triwulan	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Bandung Barat	
			2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100 %	100 %	2.09.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kaos Olah Raga	330 Pcs	330 Pcs	Kab. Bandung Barat
							Pakaian Kerja Lapangan	255 Stel	255 Stel	Kab. Bandung Barat	
							2.09.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bahan PDH	660 Meter	660 Meter	Kab. Bandung Barat
								Kerudung	75 Pcs	75 Pcs	Kab. Bandung Barat
			2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya administrasi perkantoran	100 %	100 %	2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Harddisk Eksternal	5 Unit	5 Unit	Kab. Bandung Barat
								Komputer Desktop	5 Unit	5 Unit	Kab. Bandung Barat
								Laptop	8 Unit	8 Unit	Kab. Bandung Barat
								Smart TV	1 Unit	1 Unit	Kab. Bandung Barat
							2.09.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat
							2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat
							2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat
							2.09.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar/ majalah	720 eksemplar	720 eksemplar	Kab. Bandung Barat
							2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan minum Rapat	600 Box	600 Box	Kab. Bandung Barat
								Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat
								Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat
								Rakor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	200 orang	200 orang	Kab. Bandung Barat
			2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.09.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Roda Dua	3 Unit	3 Unit	Kab. Bandung Barat
								Kendaraan Roda empat	1 Unit	1 Unit	Kab. Bandung Barat
							2.09.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Kursi Kerja	24 Unit	24 Unit	Kab. Bandung Barat
								Meja Kerja	10 Unit	10 Unit	Kab. Bandung Barat

					2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasina administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	2.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jasa Administrasi Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
										Materai	500 Lembar	500 Lembar		
									2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Internet	3 Lokasi	3 Lokasi	Kab. Bandung Barat	
										Jasa Listrik	17 Lokasi	17 Lokasi		
										Jasa Sumber Daya Air	3 Lokasi	3 Lokasi		
									2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
					2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Roda Empat	1 Unit	1 Unit	Kab. Bandung Barat	
									2.09.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Operasional Roda Dua	104 Unit	104 Unit	Kab. Bandung Barat	
										Kendaraan Operasional Roda Empat	5 Unit	5 Unit		
									2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC	6 Unit	6 Unit	Kab. Bandung Barat	
										Laptop/ Komputer	13 unit	13 unit		
										Mesin Fotocopy	1 Unit	1 Unit		
										Printer	10 Unit	10 Unit		
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	84 Poin	84 Poin	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	7 unit	7 unit	2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	lumbung	4 unit	4 unit	Kab. Bandung Barat	
									2.09.02.2.01.02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Dokumen	1 Buah	1 Buah	Kab. Bandung Barat	
										lumbung	10 unit	10 unit		
										sosialisasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
									2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Dokumen	1 Buah	1 Buah	Kab. Bandung Barat	
										Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
										sosialisasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
									2.09.02.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Sosialisasi Lumbung Pangan	1 Kali	1 Kali	Kab. Bandung Barat	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	Ketersediaan informasi pasokan dan akses pangan	12 Laporan	12 Laporan	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok	Tersedianya Laporan Harga Pangan Kabupaten Bandung Barat	12 Bulan	12 Bulan	2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dokumen	2 Buah	2 Buah	Kab. Bandung Barat	

PANGAN MASYARAKAT				atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						sosialisasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan		
										Teknologi Informasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi		
								2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bantuan alat Pengolahan	1 Unit	1 Unit		Kab. Bandung Barat	
									sosialisasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
								2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Dokumen	1 Buah	1 Buah		Kab. Bandung Barat	
									Kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan			
									sosialisasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
								2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Laporan Harga	16 Kecamatan	16 Kecamatan		Kab. Bandung Barat	
									sosialisasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
								2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Dokumen	1 Buah	1 Buah		Kab. Bandung Barat	
									Kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan			
									sosialisasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
								2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Dokumen	1 Buah	1 Buah		Kab. Bandung Barat	
									sosialisasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
									TTI C	1 Unit	1 Unit			
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Bertambahnya Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	18 ton	18 ton	2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	1 Kali	1 Kali		Semua Kab/Kota	
								2.09.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen Kebutuhan Pangan Lokal	1 Buah	1 Buah		Kab. Bandung Barat	
									Kebutuhan Pangan Lokal	1 Kabupaten	1 Kabupaten			
									sosialisasi Dan Koordinasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
								2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	CPPD	20000 Kg	20000 Kg		Kab. Bandung Barat	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terfasilitasinya Pengembangan P2L	16 Kelompok	16 Kelompok	2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	bimtek penyusunan target konsumsi (PPH Konsumsi)	60 ok	60 ok		Kab. Bandung Barat	
									perjalanan dinas dalam daerah	12 kali	12 kali			
									perjalanan dinas ke kota bandung	5 kali	5 kali			
									Pengembangan P2L (DAK)	7 Kelompok	7 Kelompok			

									2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penumbuhan P2L	8 Kelompok	8 Kelompok	Kab. Bandung Barat	
									2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	evaluasi pencapaian konsumsi pangan	30 ok	30 ok	Kab. Bandung Barat	
								perjalanan dinas dalam daerah		60 kali	60 kali			
								perjalanan ke kota bandung		30 kali	30 kali			
								rapat koordinasi pencapaian konsumsi pangan		30 ok	30 ok			
								rapat sinkronisasi pencapaian konsumsi pangan		30 ok	30 ok			
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan Jumlah desa rawan pangan	30 Desa	30 Desa	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen SKPG	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
												Peta FSvA		1 dokumen
					2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Intervensi Rawan Pangan	5 Desa	5 Desa	2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	perjalanan dinas dalam daerah	12 kali	12 kali	Kab. Bandung Barat	
									2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	paket sembako	1000 Paket	1000 Paket	Kab. Bandung Barat	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	4 sertifikat	4 sertifikat	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan dan Sertifikasi Keamanan Pangan	100 %	100 %	2.09.05.2.01.02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat Prima 3	4 komoditas	4 komoditas	Kab. Bandung Barat	
									2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat Prima 3	20 Paket	20 Paket	Kab. Bandung Barat	
										Sertifikat PSAT	10 Paket	10 Paket		
									2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	pengadaan peralatan mini Lab	10 unit	10 unit	Kab. Bandung Barat	
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
	2.10.02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI				2.10.02.2.01 Pemberian Izin Lokasi Dalam 1				2.10.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman	Jumlah dokumen pemberian izin lokasi untuk penanaman modal dan kemudahan berusaha	1 Dokumen Koordinasi	1 Dokumen Koordinasi	Kab. Bandung Barat	

			(satu) Daerah Kabupaten/Kota		Modal dan Kemudahan Berusaha					
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen Mediasi	1 Dokumen Mediasi	Kab. Bandung Barat	
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah dokumen inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					2.10.06.2.01.02 Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah dokumen inventarisasi dan rekomendasi obyek redistribusi tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					2.10.06.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen Koordinasi	1 Dokumen Koordinasi	Kab. Bandung Barat	
					2.10.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		2.10.08.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penyelesaian tanah kosong	1 dokumen Koordinasi	1 dokumen Koordinasi	Kab. Bandung Barat	
			2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		2.10.08.2.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	jumlah dokumen inventarisasi tanah kosong	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
					2.10.08.2.02.02 Pemanfaatan Tanah Kosong	jumlah dokumen pemanfaatan tanah kosong	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang		2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah	1 Dokumen Koordinasi	1 Dokumen Koordinasi	Kab. Bandung Barat	

			Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Perencanaan Penggunaan Tanah					
					2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan konsolidasi tanah Kabupaten/Kota	1 Dokumen koordinasi	1 Dokumen koordinasi	Kab. Bandung Barat	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja	1 dok	1 dok	Kab. Bandung Barat	
					2.11.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	1 dok	1 dok	Kab. Bandung Barat	
					2.11.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA_P	1 dok	1 dok	Kab. Bandung Barat	
					2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Doumen DPA	1 dok	1 dok	Kab. Bandung Barat	
					2.11.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPPA	1 dok	1 dok	Kab. Bandung Barat	
					2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKIP;CALK	2 dok	2 dok	Kab. Bandung Barat	
			2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Penggajian dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
					2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen LAT	1 dok	1 dok	Kab. Bandung Barat	
					2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Triwulan	4 dok	4 dok	Kab. Bandung Barat	
					2.11.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen laporan Prognosis	2 dok	2 dok	Kab. Bandung Barat	
			2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian		2.11.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	pakaian seragam	100 stel	100 stel	Kab. Bandung Barat	

			Perangkat Daerah							
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	peralatan listrik	8 jenis	8 jenis	Kab. Bandung Barat	
					2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor	5 jenis	5 jenis	Kab. Bandung Barat	
					2.11.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat rumah tangga	10 jenis	10 jenis	Kab. Bandung Barat	
					2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor	10 jenis	10 jenis	Kab. Bandung Barat	
					2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak	5 jenis	5 jenis	Kab. Bandung Barat	
						Penggandaan	35000 lembar	35000 lembar		
					2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	media cetak	10 media	10 media	Kab. Bandung Barat	
					2.11.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	makan minum rapat	4 kali	4 kali	Kab. Bandung Barat	
					2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	makan minum rapat	20 orang	20 orang	Kab. Bandung Barat	
						perjalanan dinas	1 dok	1 dok		
			2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.11.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana pendukung gedung	1 unit	1 unit	Semua Kab/Kota	
			2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
			2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pajak kendaraan dinas dan BBM roda dua	8 unit	8 unit	Kab. Bandung Barat	
						pajak kendaraan dinas dan BBM roda empat	4 unit	4 unit		

						2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	servis peralatan kantor (komputer dan printer)	10 kali	10 kali	Kab. Bandung Barat	
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	IKPLHD	1 dok	1 dok		
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraa n Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	KLHS	1 dok	1 dok	Semua Kab/Kota	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen indeks kualitas lingkungan hidup kegiatan atau usaha yang dipantau Pemantauan kualitas air Pemantauan kualitas udara	1 dok 5 industri 1 dok 1 dok	1 dok 5 industri 1 dok 1 dok	Semua Kab/Kota	
						2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	pembinaan desa rintisan kampung iklim	1 desa	1 desa	Semua Kab/Kota	
				2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	dokumen indeks kualitas tutupan lahan penanaman non area hutan	1 dok 1 lokasi	1 dok 1 lokasi	Semua Kab/Kota	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				Semua Kab/Kota	
						2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Perawatan RTH	1 Tahun	1 Tahun		
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN			2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3		2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	data pengelolaan limbah B3 sektor industri industri penghasil limbah B3 yang dipantau	1 dok 5 industri	1 dok 5 industri	Semua Kab/Kota	

	BERACUN (LIMBAH B3)													
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.11.06.2.01.01 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	penilaian dan verifikasi dokumen lingkungan	30 dok	30 dok	Semua Kab/Kota	
									2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dokumen tindakan lanjut pengaduan (dok)	1 dok	1 dok	Semua Kab/Kota	
										pengujian emisi cerobong industri	5 cerobong	5 cerobong		
										pengujian IPAL industri	5 IPAL	5 IPAL		
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	fasilitas alat biopori	10 unit	10 unit	Semua Kab/Kota	
										fasilitas sumbu resapan	10 unit	10 unit		
										pembinaan desa disekitar sepadan sungai	1 lokasi	1 lokasi		
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	penilaian sekolah berbudaya lingkungan atau Adiwiyata	3 sekolah	3 sekolah	Semua Kab/Kota	
										sekolah atau PP yang dibina menjadi sekolah berbudaya lingkungan atau Adiwiyata	3 sekolah	3 sekolah		
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah				2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	kajian pengelolaan sampah kota	1 dok	1 dok	Semua Kab/Kota	
									2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	pembayaran KJP	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota	
										pengangkutan sampah kota 1 tahun	12 bulan	12 bulan		
									2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Monitoring atau pembinaan 3R	1 dok	1 dok	Semua Kab/Kota	

									2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	lahan	1 lokasi	1 lokasi	Semua Kab/Kota	
									Truck sampah		8 unit	8 unit		
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BB Angka Mutu	BB Angka Mutu	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Disdukcapil	15 Dokumen	15 Dokumen	2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Disdukcapil	6 dokumen	6 dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Disdukcapil	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.12.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan Disdukcapil	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Disdukcapil	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.12.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Disdukcapil	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Disdukcapil	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Bandung Barat	
					2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Disdukcapil	22 Laporan	22 Laporan	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Disdukcapil	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
									2.12.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Pelaksana Administrasi Tugas ASN	11 Orang	11 Orang	Kab. Bandung Barat	
									2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Disdukcapil	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Bandung Barat	
									2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Semesteran	18 Laporan	18 Laporan	Kab. Bandung Barat	
					2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Disdukcapil	87 Pegawai	87 Pegawai	2.12.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Pegawai	90 stel	90 stel	Kab. Bandung Barat	
									2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	90 stel	90 stel	Kab. Bandung Barat	

					2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	7 Kegiatan	7 Kegiatan	2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan Komponen Instalasi	7 Jenis	7 Jenis	Kab. Bandung Barat	
									2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis	9 Jenis	Kab. Bandung Barat	
									2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	30 Jenis	30 Jenis	Kab. Bandung Barat	
									2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	20 Jenis	20 Jenis	Kab. Bandung Barat	
									2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan (surat kabar)	1300 eksempl ar	1300 eksempl ar	Kab. Bandung Barat	
									2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
					2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penujang Pelaksanaan Urusan Disdukcapil	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dalam menunjang pelayanan administrasi perkantoran	750 buah	750 buah	Kab. Bandung Barat	
									2.12.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 unit	7 unit	Kab. Bandung Barat	
									2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 kegiatan	6 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
					2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Disdukcapil	24 Unit	24 Unit	2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional	24 unit	24 unit	Kab. Bandung Barat	
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase Anak Ber KIA	20 %	20 %	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Bulan	12 Bulan	2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
		Persentase Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	81 %	81 %										
		Persentase Penduduk Ber KTP-EL	92 %	92 %										

								2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraa n Pendaftaran Penduduk	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12 Bulan	12 Bulan	2.12.02.2.03.05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran	34 %	34 %	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil	12 bulan	12 bulan	2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	12 Kegiatan	12 Kegiatan		
	Persentase penduduk ber akta kelahiran 0-18 tahun	94 %	94 %										
	Persentase Penerbitan Akta Kematian	30 %	30 %										
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraa n Pencatatan Sipil	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12 Bulan	12 Bulan	2.12.03.2.02.01 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Terlaksananya Koordinasi Dengan Kementerian Yang Menyelenggarakan Urusan Bidang Agama yang Berkaitan Dengan Pencatatan Nikah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
								2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Urusan Pencatatan Sipil	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan	20 %	20 %	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Database Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
				2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	2.12.04.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Terkait Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraa n Pengelolaan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Informasi	12 Bulan	12 Bulan	2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Semua Kab/Kota	

				Informasi Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan				Pemanfaatan Data Kependudukan					
									2.12.04.2.03.06 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Terlaksananya Kerjasama dengan Lintas Sektoral	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
									2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Komunikasi dan Edukasi Inovasi Pelayanan Adminduk kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
				2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan PIAK	1 Kegiatan	1 Kegiatan		2.12.04.2.04.03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Profil Kependudukan yang terselesaikan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersusunnya Profil Perkembangan Kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota	
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BB Poin	BB Poin	2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	100 %	100 %	2.13.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.13.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Laporan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.13.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Laporan Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.13.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Laporan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.13.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Laporan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.13.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kinerja Aparatur Sipil Negara	23 ASN PNS	23 ASN PNS	Kab. Bandung Barat	
									2.13.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Bandung Barat	

							Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD						
			2.13.01.2.05 Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Persentase Kedisiplinan Aparatur sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	2.13.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	5 Jenis	5 Jenis	Kab. Bandung Barat		
							2.13.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya bimtek Penatausahaan Keuangan dan Bimtek Keuangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat		
			2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Perkantoran Yang Terpenuhi	100 %	100 %	2.13.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Bandung Barat		
							2.13.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Jasa Perbaikan Kantor	16 Unit	16 Unit	Kab. Bandung Barat		
							2.13.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	15 Jenis	15 Jenis	Kab. Bandung Barat		
							2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	32 Jenis	32 Jenis	Kab. Bandung Barat		
							2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan kebutuhan penggandaan	17 Jenis	17 Jenis	Kab. Bandung Barat		
							2.13.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	756 Eksemplar	756 Eksemplar	Kab. Bandung Barat		
							2.13.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasi Makanan dan Minuman Kegiatan	1404 Dus	1404 Dus	Kab. Bandung Barat		
							2.13.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya perjalanan koordinasi & konsultasi ke luar daerah	14 HOK	14 HOK	Kab. Bandung Barat		
			2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Perkantoran yang Terpenuhi	100 %	100 %	2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran jasa telepon, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat		
			2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	2.13.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya sarana Penunjang Operasional Dinas	26 Unit	26 Unit	Kab. Bandung Barat		

									2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52 Unit	52 Unit	Kab. Bandung Barat	
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa Pemekaran	0 Desa	0 Desa	2.13.02.2.01 Penyelenggaraa n Penataan Desa	Terbentuknya Desa Baru	100 %	100 %	2.13.02.2.01.01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terfasilitasinya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	1 Desa	Kab. Bandung Barat	
									2.13.02.2.01.02 Fasilitas Tata Wilayah Desa	Terlaksananya Fasilitas Tata Wilayah Desa	16 Desa	16 Desa	Semua Kab/Kota	
									2.13.02.2.01.03 Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Terlaksananya Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	30 Desa	30 Desa	Semua Kab/Kota	
									2.13.02.2.01.04 Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	Terlaksananya Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.13.02.2.01.06 Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya Sosialisasi, Pembinaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	165 Desa	165 Desa	Semua Kab/Kota	
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama Desa yg Terfasilitasi	5 Desa	5 Desa	2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Terlaksananya Fasilitasi Kerja sama antar Desa	0 Desa	0 Desa	2.13.03.2.01.01 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		12 BKAD, PD/PLD	12 BKAD, PD/PLD	Semua Kab/Kota	
											16 Kecamatan	16 Kecamatan		
											165 Desa	165 Desa		
											Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Desa	12 UPK		12 UPK
									2.13.03.2.01.02 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		12 UPK	12 UPK	Semua Kab/Kota	
										16 Kecamatan, PD/PLD	16 Kecamatan, PD/PLD			
										165 Desa	165 Desa			
										Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	12 BKAD, PD/PLD	12 BKAD, PD/PLD		
									2.13.03.2.01.03 Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Sosialisasi, Fasilitasi Kawasan Perdesaan dan penguatan Kawasan Perdesaan melalui Peraturan (Legal Drating)	1 Kawasan Perdesaan	1 Kawasan Perdesaan	Semua Kab/Kota	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Cepat Berkembang	32 %	32 %	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggarannya pembinaan dan pengawasan Administrasi Desa	100 %	100 %	2.13.04.2.01.01 Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Administrasi Desa sesuai dengan ketentuan permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa	165 Desa	165 Desa	Semua Kab/Kota	
									2.13.04.2.01.02 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya bimbingan teknis tentang tata cara penyusunan dan penetapan produk hukum desa	5 perbup	5 perbup	Semua Kab/Kota	
									2.13.04.2.01.03 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya fasilitasi penyusunan RAPBDes dan RKPDes	165 desa	165 desa	Semua Kab/Kota	
									2.13.04.2.01.04 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	165 desa	165 desa	Semua Kab/Kota	

									2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya bimbingan teknis tentang ketentuan perundang-undangan tentang desa	165 desa	165 desa	Semua Kab/Kota	
									2.13.04.2.01.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	terselenggaranya bimbingan teknis mengenai musyawarah desa	165 desa	165 desa	Semua Kab/Kota	
									2.13.04.2.01.07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Terlaksananya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi peraturan desa sesuai dengan kewenangan desa	165 desa	165 desa	Semua Kab/Kota	
									2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	165 desa	165 desa	Semua Kab/Kota	
									2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggaranya pemilihan kepala desa	12 desa	12 desa	Semua Kab/Kota	
									2.13.04.2.01.10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersusunnya database perangkat desa sebagai dasar pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	165 desa	165 desa	Semua Kab/Kota	
									2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Tersusunnya profile desa	165 desa	165 desa	Semua Kab/Kota	
									2.13.04.2.01.12 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya bimbingan teknis tentang ketentuan perundang-undangan tentang desa	165 desa	165 desa	Semua Kab/Kota	
									2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan aset desa	165 desa	165 desa	Semua Kab/Kota	
									2.13.04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terfasilitasinya program kerja Asosiasi BPD	165 desa	165 desa	Semua Kab/Kota	
									2.13.04.2.01.15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya penetapan tentang Penegasan Batas Desa pada masing-masing kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	Semua Kab/Kota	
									2.13.04.2.01.16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Terlaksananya Sosialisasi penyusunan LPD, LKPPD dan LPPD	165 desa	165 desa	Semua Kab/Kota	
									2.13.04.2.01.17 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Terlaksananya evaluasi urusan kewenangan kabupaten yang dilaksanana oleh Desa	165 desa	165 desa	Semua Kab/Kota	
									2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	terevaluasinya perkembangan desa dan penetapan juara lomba desa	16 kecamatan	16 kecamatan	Semua Kab/Kota	
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	82,34 %	82,34 %	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan	Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Membangun Desa	40 %	40 %	2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posvandu, LPM. dan	Penguatan lembaga masyarakat desa dan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan BSMSS dan TMMD	2 Desa	2 Desa	Kab. Bandung Barat	

	MASYARAKAT HUKUM ADAT				Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
									2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis lembaga kemasyarakatan desa, pendataan dan penataan lembaga kemasyarakatan desa, perlombaan LKD	165 Desa	165 Desa	Kab. Bandung Barat	
									2.13.05.2.01.04 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Kapasitas Pelaksana Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan di Desa	16 Kecamatan	16 Kecamatan	Kab. Bandung Barat	
										Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Kapasitas Pelaksana Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan di Desa	16 PDTI	16 PDTI		
										Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Kapasitas Pelaksana Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan di Desa	165 Desa	165 Desa		
										Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Kapasitas Pelaksana Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan di Desa	165 TPKD	165 TPKD		
									2.13.05.2.01.05 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	165 Desa	165 Desa	Kab. Bandung Barat	
									2.13.05.2.01.06 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Bimtek TTG dan Lomba TTG Kabupaten Gelar TTG TK Kabupaten, partisipasi Gelar TTG TK Provinsi dan TK Nasional	165 Posyantek Desa	165 Posyantek Desa	Kab. Bandung Barat	
									2.13.05.2.01.07 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Penguatan lembaga masyarakat desa dan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan BBGRM	1 Desa	1 Desa	Kab. Bandung Barat	

								2.13.05.2.01.09 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	165 TP PKK Desa	165 TP PKK Desa	Kab. Bandung Barat	
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B Poin	B Poin	2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan capaian kinerja tepat waktu	100 %	100 %	2.14.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah	100 orang	100 orang	Kab. Bandung Barat	
									Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 dan Renja T.A 2023	2 Dokumen	2 Dokumen		
								2.14.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								2.14.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya RKAP SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								2.14.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								2.14.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya DPAP SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								2.14.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								2.14.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis (Rakomis) DP2KBP3A	200 orang	200 orang	Kab. Bandung Barat	
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN di DPPKBPPPA	55 Orang	55 Orang	Kab. Bandung Barat	
								2.14.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								2.14.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	

							2.14.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	tersusunnya pelaporan dan prognosis	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
			2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen aset	1 Dokumen	1 Dokumen	2.14.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya laporan aset di Kantor Penyuluhan KB	16 Dokumen	16 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							2.14.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Sosialisasi Penataan Aset	53 Orang	53 Orang	Kab. Bandung Barat	
			2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kedisiplinan Aparatur sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	2.14.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Husus Hari - Hari Tertentu	210 Orang	210 Orang	Kab. Bandung Barat	
							2.14.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
							2.14.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
							2.14.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
			2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	4 Jenis	Kab. Bandung Barat	
							2.14.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor	3 kegiatan	3 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							2.14.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13 Jenis	13 Jenis	Kab. Bandung Barat	
							2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Koordinasi & Konsultasi SKPD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
			2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terpenuhi	100 0	100 0	2.14.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeuler Kantor	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Bandung Barat	
			2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase kebutuhan jasa kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	2.14.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	1 Jenis	1 Jenis	Kab. Bandung Barat	

				Pemerintahan Daerah									
								2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Cleaning service dan keamanan kantor	6 Orang	6 Orang	Kab. Bandung Barat	
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang yang terpenuhi	100 %	100 %	2.14.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	2 Unit	2 Unit	Kab. Bandung Barat	
								2.14.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								2.14.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	25 Unit	25 Unit	Kab. Bandung Barat	
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase penyelenggara an pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	5,11 %	5,11 %	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Sekolah Siaga Kependudukan di Bandung Barat	16 Kecamatan	16 Kecamatan	2.14.02.2.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	1 Dokumen Grand Design	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat
		Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	48 %	48 %									
								2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersusunnya Perbup Grand design	1 dokumen	1 dokumen		
								2.14.02.2.01.05 Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Madrasah Siaga Kependudukan (MSK)	33 Sekolah	33 Sekolah	Kab. Bandung Barat	
								2.14.02.2.01.09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal	Gerakan Santri siaga Kependudukan (GSSK)	16 Sekolah	16 Sekolah	Kab. Bandung Barat	

								di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal							
					2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data mikro keluarga dan terselenggaranya rekonsiliasi data	13 Dokumen	13 Dokumen	2.14.02.2.02.01 Perumusan Parameter Kependudukan	Tersusunnya Parameter Kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	Semua Kab/Kota		
									2.14.02.2.02.03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	tersedianya profil kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat		
									2.14.02.2.02.08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Terbentuknya Rumah Data Percontohan	1 Poktan	1 Poktan	Kab. Bandung Barat		
									Terlaksananya Sosialisasi Rumah Data Kependudukan	16 Kecamatan	16 Kecamatan				
									2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Seluruh Peserta SIGA	210 orang	210 orang			
									Seluruh Peserta Sosialisasi Update PK	200 orang	200 orang				
									2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya formulir data keluarga (beresiko stanting)	9090 Lembar	9090 Lembar	Kab. Bandung Barat		
									2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya dukungan SIGA di Balai Penyuluhan KB	16 Kecamatan	16 Kecamatan			
									2.14.02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Terlaksananya Evaluasi Program KKBPK	170 orang	170 orang	Kab. Bandung Barat		
									Terlaksananya Rekonsiliasi dan Evaluasi Data	12 bulan	12 bulan				
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase KB Aktif	73,75 %	73,75 %	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya kegiatan KIE Masa	32 0	32 0	2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	terlaksananya advokasi Program KKBPK	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20,73 %	20,73 %											
		Persentase UNMETNEED	10,24 %	10,24 %											
									2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Massa	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kab. Bandung Barat		
									2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan						

							Elektronik serta Media Luar Ruang					
							2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Mekanisme Operasional Program KKBPK	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
							2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kegiatan Pengelolaan Operasional di balai penyuluhan KKBPK	16 Kecamatan	16 Kecamatan	Kab. Bandung Barat	
							2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Audit Kasus Stunting	6 Kegiatan	6 Kegiatan		
			2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatnya kualitas Sumber daya manusia (SDM) Petugas lini lapangan	84 0	84 0	2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terbinanya Petugas di Lini Lapangan Operasional dan pembinaan Petugas lini lapangan non PNS	84 Orang	84 Orang	Kab. Bandung Barat	
							2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah IMP	17 Orang	17 Orang	Kab. Bandung Barat	
								Jumlah IMP	2466 orang	2466 orang		
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) di Faskes dan Jumlah Akseptor Baru	4663 0	4663 0	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pelaporan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dari Fasilitas Pelayanan KB ke Faskes dan Jejaringnya	35 Faskes	35 Faskes		
							2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB IUD Dan Implant	4.748 Akseptor	4.748 Akseptor	Semua Kab/Kota	
								Jumlah Peserta KB IUD Dan Implant	20.768 Akseptor	20.768 Akseptor		
							2.14.03.2.03.05 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersusunnya rencana kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) di Fasilitas Kesehatan (Faskes)	35 Faskes	35 Faskes	Semua Kab/Kota	
							2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya fasilitas Pelayanan KB	1 unit	1 unit		
							2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	Terlaksananya pelayanan KB di fasilitas kesehatan (faskes)	4 Kegiatan	4 Kegiatan		

									Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya					
									2.14.03.2.03.09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Anggota kelompok kegiatan (Poktan)	425 Orang	425 Orang	Semua Kab/Kota	
									2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Pelayanan KB Momentum melalui Tim KB Keliling Keliling (TKBK)	64 Kegiatan	64 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
									2.14.03.2.03.13 Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Motivator KB Pria	385 Orang	385 Orang	Semua Kab/Kota	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB	57 0	57 0	2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Pembinaan dan Pembentukan Kampung KB	7 Kegiatan	7 Kegiatan	Kab. Bandung Barat		
									Pembinaan dan Pembentukan Kampung KB - (DAK)	5 Kegiatan	5 Kegiatan			
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga	40 %	40 %	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	80 Kelompok	80 Kelompok	2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya pengadaan BKB Kit	12 Unit	12 Unit		
								Terlaksananya Pengadaan Catin KIT		1 Unit	1 Unit			
									2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orientasi Pencegahan Stunting oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)	768 orang	768 orang	Kab. Bandung Barat	
									2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Operasional bagi	Jumlah tenaga Pendukung Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	7 Orang	7 Orang	Semua Kab/Kota	

					Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Operasional Pendampingan Calon Pengantin	5048 orang	5048 orang		
						Terlaksananya Operasional Pendampingan Ibu Hamil di Desa	11799 Orang	11799 Orang		
						Terlaksananya Operasional Pendampingan Pasca Persalinan	3933 orang	3933 orang		
						Terlaksananya Operasional Surveillance tingkat Desa	47196 orang	47196 orang		
					2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jambore PIKR dan Saka Kencana	80 Orang	80 Orang		
						Promosi dan Sosialisasi Program Genre di Kampung KB	320 Orang	320 Orang		
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan (Renja dan Renja Perubahan)	2 Dok	2 Dok	Kab. Bandung Barat	
					2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat	
					2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP)	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat	
					2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat	
					2.15.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat	
					2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedianya dokumen pelaporan kinerja	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat	
					2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen LKPJ, LPPD dan LKIP	3 Dok	3 Dok	Kab. Bandung Barat	
			2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	Kab. Bandung Barat	
					2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya verifikasi keuangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
					2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat	

					2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	2 Dok	2 Dok	Kab. Bandung Barat	
			2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	170 Pegawai	170 Pegawai	Kab. Bandung Barat	
			2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersusunnya dokumen Perencanaan (Renja dan Renja Perubahan)	2 Dok	2 Dok	Kab. Bandung Barat	
					2.15.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya Peralatan rumah tangga perkantoran	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
					2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor tersedianya tunjangan THR bagi non ASN	1 Paket	1 Paket 1 bulan	Kab. Bandung Barat	
					2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
					2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan informasi	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
					2.15.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	tersedianya makan dan minuman operasional Dinas	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
					2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
			2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Kab. Bandung Barat	
					2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Tersusunnya dokumen Perencanaan (Renja dan Renja Perubahan)	2 Dok	2 Dok	Kab. Bandung Barat	
			2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya pengelolaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	

					2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya penyediaan listrik dan internet	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
					2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
			2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan jabatan	1 Kendaraan	1 Kendaraan	Kab. Bandung Barat	
					2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
					2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan rutin	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					
					2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Penerangan Jalan Umum	100 TC	100 TC	Kab. Bandung Barat	
					2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan PJU di wilayah Kabupaten Bandung Barat	16 Kec.	16 Kec.	Kab. Bandung Barat	
			2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya Pemeliharaan Terminal Tipe C	1 Terminal	1 Terminal	Kab. Bandung Barat	
					2.15.02.2.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Tersedianya Tenaga Penunjang Pengelolaan Terminal selama 12 Bulan	77 Orang	77 Orang	Kab. Bandung Barat	
			2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		2.15.02.2.04.01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Fasilitas Parkir Terintegrasi Elektronik	1 Ls	1 Ls	Kab. Bandung Barat	

					2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Fasilitas Parkir	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
			2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	Kab. Bandung Barat	
					2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya tenaga penguji kendaraan bermotor yang berkompetensi	4 Orang	4 Orang	Kab. Bandung Barat	
					2.15.02.2.05.03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	17000 Unit	17000 Unit	Kab. Bandung Barat	
					2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	12000 Dokumen	12000 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					2.15.02.2.05.05 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kendaraan Over Dimensi Over Load	40 Orang	40 Orang	Kab. Bandung Barat	
					2.15.02.2.05.06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah laporan identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji	3 laporan	3 laporan	Kab. Bandung Barat	
					2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	15 Unit	15 Unit	Kab. Bandung Barat	
					2.15.02.2.05.08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Bandung Barat	
					2.15.02.2.05.09 Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersusunnya perda retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
					2.15.02.2.05.10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya SKM Terhadap Pelayanan UPTD PKB	2 dokumen laporan	2 dokumen laporan	Kab. Bandung Barat	
			2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas di ruas jalan kabupaten	2 lokasi	2 lokasi	Kab. Bandung Barat	
					2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan	tersedianya perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	2 lokasi	2 lokasi	Kab. Bandung Barat	

					Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas					
					2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	terlaksananya uji coba dan sosialisasi	2 lokasi	2 lokasi	Kab. Bandung Barat	
					2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Arus Lalu lintas dan Angkutan Lebaran (Anggota)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
						Pengawasan Arus Lalu lintas dan Angkutan Lebran (Koordinator Lapangan, Pengawas Lapangan, Logistik)	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
						Pengawasan Harian Arus Lalu Lintas	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
			2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	terlaksananya evaluasi andalalin	10 dokumen	10 dokumen	Kab. Bandung Barat	
			2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		2.15.02.2.08.01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	tersedianya SDM sertifikat kompetensi keselamatan	1 orang	1 orang	Kab. Bandung Barat	
					2.15.02.2.08.02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	terlaksananya inspeksi, audit dan pemantauan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	3 lokasi	3 lokasi	Kab. Bandung Barat	
					2.15.02.2.08.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	terlaksananya inspeksi, audit dan pemantauan keselamatan di terminal	11 lokasi	11 lokasi	Kab. Bandung Barat	
					2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	terlaksananya penyelenggaraan inspeksi kompetensi pengemudi	15 orang	15 orang	Kab. Bandung Barat	
					2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	terlaksananya inspeksi, audit dan pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	6 lokasi	6 lokasi	Kab. Bandung Barat	
			2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang		2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1	Terlaksananya kegiatan sosialisasi Angkutan Barang di Wilayah KBB	1 Keg	1 Keg	Kab. Bandung Barat	
						Tersedianya Kajian Angkutan Barang	1 Dok	1 Dok		

				dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				(satu) Daerah Kabupaten/Kota						
				2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.15.02.2.12.01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring Pelayanan Angkutan Lebaran	1 keg	1 keg		Kab. Bandung Barat	
									Terlaksananya Monitoring Pelayanan Angkutan nataru	1 keg	1 keg			
									Tersedianya Kajian Rencana umum jaringan Trayek Trayek Angkutan Umum wilayah KBB	1 dok	1 dok			
								2.15.02.2.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya inspeksi,audit dan pemantauan kompetensi pengemudi	15 Orang	15 Orang		Kab. Bandung Barat	
				2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				2.15.03.2.12.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	terlaksananya sosialisasi keselamatan ASDP	1 Keg	1 Keg		Kab. Bandung Barat	
									tersedianya alat keselamatan asdp	1 keg	1 keg			
									tersedianya dokumen kajian	1 dok	1 dok			
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	11 dokumen	11 dokumen	2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Tersusunnya Dokumen Renja	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Terkoordinasinya dan Tersusunnya Dok RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Terkoordinasinya dan Tersusunnya Dok RKAP	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Terkoordinasinya dan Tersusunnya DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Terkoordinasi dan Tersusunnya DPPA	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Administrasi	28 Dokumen	28 Dokumen	2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan PNS	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Bandung Barat	

			Perangkat Daerah	Keuangan Perangkat daerah								
							2.16.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tersedianya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Terkoordinasi dan Tersusunnya	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah terkoordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
			2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.16.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tersusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
				Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen						
			2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.16.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah tersedianya Pakaian Hari hari tertentu	61 stell	61 stell	Kab. Bandung Barat	
							2.16.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	60 stell	60 stell	Kab. Bandung Barat	
							2.16.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							2.16.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Sosialisasi	1 Sosialisasi	Kab. Bandung Barat	
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis	10 jenis	Kab. Bandung Barat	
							2.16.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersedianya jenis Peralatan Rumah Tangga	15 Jenis	15 Jenis	Kab. Bandung Barat	
							2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah tersedianya jenis Bahan Logistik Kantor	2 Jenis	2 Jenis	Kab. Bandung Barat	
							2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah tersedianya Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	9 Jenis	9 Jenis	Kab. Bandung Barat	
							2.16.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tersedianya Jenis Bahan-Bacaan Dan PeraturanPerundang-Undangan	8 Jenis	8 Jenis	Kab. Bandung Barat	

							2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 HOK	45 HOK	Kab. Bandung Barat	
			2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	4 unit	4 unit	2.16.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit	3 unit	Kab. Bandung Barat	
							2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Jenis Mebeleur	4 Jenis	4 Jenis	Kab. Bandung Barat	
			2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
							2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
			2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 unit	10 unit	2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 unit	10 unit	Kab. Bandung Barat	
							2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit	Kab. Bandung Barat	
							2.16.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Terpeliharanya / Terehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	Kab. Bandung Barat	
	2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100 %	100 %	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Terkelola	100 %	100 %	2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Kab. Bandung Barat	
							2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	jumlah Dokumen data monitoring Opini dan Aspirasi publik	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							2.16.02.2.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Monitoring Informasi dan	0 0	0 0	Kab. Bandung Barat	

									Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi				
									2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	jumlah tersedianya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
									2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pelatihan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah tersedianya Pelayanan dan Informasi Publik	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
									2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	Jumlah media yang terlayani	4 Media	4 Media	Kab. Bandung Barat	
									2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah tersedianya pelayanan terhadap kemitraan dengan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
									2.16.02.2.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis				Kab. Bandung Barat	
									2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah kegiatan dalam Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	1 keg	1 keg	Kab. Bandung Barat	
									2.16.02.2.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Sosialisasi dalam Penguatan Tata kelola Komisi informasi daerah	0 0	0 0	Kab. Bandung Barat	
									2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Sosialisasi Terselenggaranya Hubungan Masyarakat, Media dan kemitraan Komunitas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Teknologi Informasi Pemerintahan yang Termanfaatkan	100 %	100 %	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan nama Domain	12 Bulan	12 Bulan	2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah terselenggaranya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
					2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pengelolaan e-Government di Pemerintah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah terkelolanya Pusat data pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
									2.16.03.2.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Aplikasi agar terkoordinasi dan tersinkronisasi serta terintegrasi data dan informasi elektronik	12 Jenis Aplikasi	12 Jenis Aplikasi	Kab. Bandung Barat	

									2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah pengembangan aplikasi dan proses bisnis Pemerintahan berbasis elektronik	12 Jenis Aplikasi	12 Jenis Aplikasi	Kab. Bandung Barat	
									2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten / kota Cerdas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sosialisasi / Bimtek untuk Pengembangan dan pengelolaan Sumber daya teknologi informasi dan komunikasi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									2.16.03.2.02.11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Kajian dalam Pengelolaan Government Chief information officer	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
		Nilai SAKIP DISKOPUKM		BB Nilai Mutu										
									2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.17.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.17.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 buku	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	22 orang/bulan	Kab. Bandung Barat	
						Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3 Dokumen						

				Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 kegiatan	3 kegiatan						
							2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Bandung Barat	
							2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dokumen	4 Laporan	Kab. Bandung Barat	
			2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	2.17.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 Laporan	1 Laporan	Kab. Bandung Barat	
			2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 jenis	3 jenis	Kab. Bandung Barat	
				Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3 Dokumen						
				Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 kegiatan	3 kegiatan						
							2.17.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	42 orang	42 orang	Kab. Bandung Barat	
			2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 kegiatan	8 kegiatan	2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat listrik dan komponen listrik kantor	41 unit	41 unit	Kab. Bandung Barat	
							2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 unit	9 unit	Kab. Bandung Barat	
							2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	19 jenis	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
							2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	43 jenis	43 jenis	Kab. Bandung Barat	
							2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetakan dan Penggandaan	11 jenis	1 Paket	Kab. Bandung Barat	

							2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 jenis	4 jenis	Kab. Bandung Barat	
							2.17.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
							2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
			2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	2 kegiatan	1 kegiatan	2.17.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	3 unit	3 unit	Kab. Bandung Barat	
							2.17.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Semua Kab/Kota	
			2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 kegiatan	1 kegiatan	2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
							2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, SD Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
			2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 unit	11 unit	Kab. Bandung Barat	
							2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	57 unit	57 unit	Kab. Bandung Barat	
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	39 %	39 %	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	140 koperasi	150 koperasi	2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimtek Pengawas Internal Koperasi	120 Koperasi	120 Koperasi	Semua Kab/Kota
								Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan	75 Koperasi	75 Koperasi		

									2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Koperasi	75 Koperasi	Semua Kab/Kota	
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	KoperasiPerse ntase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi%	26 %	26 %	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dilakukan Penilaian Kesehatan Koperasi		180 Koperasi	2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dilakukan Penilaian Kesehatan KSP/USP	120 Koperasi	180 Koperasi	Semua Kab/Kota	
						Jumlah sertifikat yang diterbitkan dari hasil penilaian kesehatan	115 sertifikat	180 Koperasi		Sosialisasi Penilaian Kesehatan Koperasi	60 Koperasi	60 Koperasi		
									2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penghargaan Koperasi Berprestasi	3 Koperasi	3 Koperasi	Semua Kab/Kota	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peserta Diklat Perkoperasian	19 %	19 %	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Diklat Perkoperasian yang dilaksanakan	6 kegiatan	4 kegiatan	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian	240 Peserta	240 Peserta	Semua Kab/Kota	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	9 Kegiatan	9 Kegiatan	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan koperasi	9 kegiatan	4 kegiatan	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	4 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro	100 %	100 %	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pemberdayaan	100 -	100 -	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	pengembangan usaha mikro	107 pelaku usaha	107 pelaku usaha	Semua Kab/Kota	

					dengan Para Pemangku Kepentingan									
									2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	terlaksananya pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	jumlah pelaku umkm sebagai peserta kegiatan	110 pelaku usaha mikro	110 pelaku usaha mikro	Kab. Bandung Barat	
									2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah paket bantuan untuk pemberdayaan umkm	455 paket bantuan	455 paket bantuan		
									2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan pengembangan pelaku usaha mikro	120 Kegiatan	120 Kegiatan	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pengembangan	120 -	120 -	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	terlaksananya Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1 subkegiatan	1 subkegiatan	Semua Kab/Kota	
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.18.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk PNS	14 bulan	14 bulan	Kab. Bandung Barat	

			Perangkat Daerah									
							2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
			2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.18.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian DPMPSTP	1 Unit	1 Unit	Kab. Bandung Barat	
							2.18.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian batik dinas	60 stell	60 stell	Kab. Bandung Barat	
								Jumlah pakaian dinas Marian	60 stell	60 stell		
							2.18.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi	120 orang	120 orang	Kab. Bandung Barat	
							2.18.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	60 orang	60 orang	Kab. Bandung Barat	
			2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
							2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	3 jenis	Kab. Bandung Barat	
							2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan Rumah tangga	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
							2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
							2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
							2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
							2.18.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan fasilitas tamu	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
							2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	

					2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Dokumen Melalui Jasa Pos	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
									2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Layanan Jaringan Internet	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
					2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2 Jenis	2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
									2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase dokumen yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Investasi	5 Dokumen	5 Dokumen	2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100 %	100 %	2.18.03.2.01 Penyelenggaraa n Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal	100 %	100 %	2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman 2 Kegiatan Modal	2 kegiatan	2 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase waktu proses pelayanan perizinan sesuai SOP	92 %	92 %	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan yang terbit	3500 izin/non izin	3500 izin/non izin	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Dasar dan Usaha/Operasional yang dilayani	3500 izin	3500 izin	Kab. Bandung Barat	
									2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dasar dan usage/operasional	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Bandung Barat	

									2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dasar dan Usaha/Operasional	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 perusahaan	20 perusahaan	Kab. Bandung Barat	
									2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah	9 perusahaan	9 perusahaan	Kab. Bandung Barat	
										Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	253 perusahaan	253 perusahaan		
									2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	16 perusahaan	16 perusahaan	Kab. Bandung Barat	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terpenuhinya kebutuhan Pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, maintenance jaringan dan penyebaran informasi sistem layanan online dan mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan dasar dan usaha/operasional melalui media cetak, elektronik dan sosialisasi/workshop sistem informasi	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga	BB Poin	BB Poin	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100 persen	100 persen	2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renja Dispora 2023 dan Renja Perubahan Dispora 2022	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.19.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan RKA Dispora 2023	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.19.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan RKA Dispora 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.19.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan DPA Dispora 2023	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	

							2.19.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	enyusunan DPA Perubahan Dispora 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan LPPD dan LKPJ Dispora T.A 2021, Penyusunan LAKIP dan Laporan monev Triwulan T.A 2022	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
			2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan	100 Persen	100 Persen	2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Dispora	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
							2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK) Dispora T.A 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							2.19.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan laporan keuangan triwulan dan semesteran Dispora T.A 2022	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
			2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertibnya Adminitrasi Perangkat Daerah	10 persen	10 persen	2.19.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian Pegawai	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							2.19.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyusunan dan pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian ASN (pangkat, berkala, epresisi dll)	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
							2.19.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksanya Sosialisasi Peningkatan Kinerja Pegawai	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
			2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Perangkat daerah	100 persen	100 persen	2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Laptop, Komputer PC dan Printer	3 jenis	3 jenis	Kab. Bandung Barat	
							2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan alat tulis kantor	13 atk	13 atk	Kab. Bandung Barat	
							2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan 7 jenis cetakan dinas dan cetakan spanduk, banner, balogo	7 jenis	7 jenis	Kab. Bandung Barat	
							2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran langganan 3 media surat kabar selama 12 bulan	3 media	3 media	Kab. Bandung Barat	
							2.19.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitasi dan Penyediaan mamin tamu	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
							2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat	tersedianya perjalan Dinas	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	

							Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
			2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.19.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Lemari	2 unit	2 unit	Kab. Bandung Barat		
								Meja	20 unit	20 unit			
			2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Pekerjaan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	2.19.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan materai	500 buah	500 buah	Kab. Bandung Barat		
									Pengelolaan administrasi surat menyurat dinas	1 tahun		1 tahun	
							2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	engadaan bahan dan alat pembersih	10 item	10 item	Kab. Bandung Barat		
								Pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor	1 tahun	1 tahun			
			2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Baraang Milik Daerah Kondisi Baik	10 Persen	10 Persen	2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan pembayaran pajak roda 2	8 un	8 un	Kab. Bandung Barat		
									Pemeliharaan dan pembayaran pajak roda 4	4 unit		4 unit	
							2.19.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Partisi Ruangan Kantor	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat		
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Kapasitas Layanan Kepemudaan	7,41 %	7,41 %	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang telah dibina, dilatih dan dikembangkan	2315 orang	2315 orang	2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Fasilitasi dan Pelatihan pemuda pelopor	1 pelatihan	1 pelatihan	Kab. Bandung Barat
							2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Pelatihana kewirasusahaan bagi pemuda pemula	1 pelatihan	1 pelatihan	Kab. Bandung Barat		

									2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pengembangan kapasitas kemampuan pemuda Kader	1 pelatihan	1 pelatihan	Kab. Bandung Barat	
									2.19.02.2.01.05 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan Koordinasi lintas sektoral pelayanan kepemudaan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									Tersusunya Rencana Aksi Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
									2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Monitoring dan evaluasi pelayanan kepemudaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									Tersedianya Sarana Prasana Kepemudaan	4 kecamatan	4 kecamatan			
									Tersusunya Perbup Kepemudaan	1 Dokumen	1 Dokumen			
									2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Fasilitasi pemuda pelopor	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 pelatihan	1 pelatihan			
									2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Penyelenggaraan seleksi, pembinaan, pelaksanaan dan purna tugas Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Tingkat Kab. Bandung Barat	2 kegiatan	2 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
					2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan	86 Organisasi	86 Organisasi	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	koordinasi peningkatan dan pembinaan organisasi kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga	10 %	10 %	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ruang terbuka yang tersedia untuk melaksanakan aktifitas olahraga	2500 Lokasi	2500 Lokasi	2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Pengadaan sarana olahraga dayung untuk menghadapi Porprov XIV Jabar	4 Item	4 Item	Kab. Bandung Barat		
	Jumlah Atlet Berprestasi Tk. Nasional/Provi nsi	50 Atlet	50 Atlet		Pembangunan Lapangan Sepak Bola Standar Nasioanal Dicitilin	1 Lapang	1 Lapang		Peningkatan dan penataan prasarana olahraga untuk mendukung Tuan rumah Porprov XIV Jabar di KBB	2 item	2 item			
	Jumlah ketersediaan ruang terbuka dan sarana olahraga	2500 Lokasi	2500 Lokasi		Pengadaan sarana olahraga dayung untuk menghadapi Porprov XIV Jabar	4 item	4 item		Penyediaan sarana olahraga	11 jenis	11 jenis			
					Peningkatan dan penataan prasarana olahraga untuk mendukung Tuan	11 Jenis	11 Jenis		Sewa dan penataan venue ski air	12 bulan	12 bulan			

				rumah Porprov XIV Jabar di KBB								
			2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event / kejuaraan olahraga yang diikuti dan dilaksanakan	3 Event/Kejuaraan	3 Event/Kejuaraan	2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dukungan penyelenggaraan kejuaraan multievent dan single event	2 kegiatan	2 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
								terselenggaranya Festival Olahraga	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
							2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Keikutsertaan pada penyelenggaraan POR PEMDA Tk. Prov.	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
								Keikutsertaan pada Popwilda Tk. Prov Jabar	1 kegiatan	1 kegiatan		
								Penyelenggaraan tuan rumah Porprov Jabar XIV 2022	1 kegiatan	1 kegiatan		
			2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi minimal tingkat Prov.	50 Atlet	50 Atlet	2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Keolahragaan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Verifikasi Pemberian penghargaan bagi atlet/klub olahraga berprestasi tingkat Kabupaten	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							2.19.03.2.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Penyusunan analisis Indeks Pembangunan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								Penyusunan dan Pengumpulan Data Sektoral Olahraga dan pengelolaan Sistem informasi Keolahragaan	1 Dokumen	1 Dokumen		
			2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Presentase peningkatan SDM Pelaku Olahraga	20 Persen	20 Persen	2.19.03.2.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan	terumuskannya Stadarisasi Keolahragaan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pengembangan dan peningkatan pengelolaan organisasi keolahragaan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga (Porprov, Paralimpih, dan Olahraga Rekreasi)	3 induk Organisasi	3 induk Organisasi	Kab. Bandung Barat	
							2.19.03.2.04.03 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Fasilitasi kerjasama dan kemitraan keolahragaan dengan destinasi wisata	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Bandung Barat	
								Fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan prasarana olahraga selaku tuan rumah Porprov Jabar	2 dokumen	2 dokumen		
			2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga	10 Persen	10 Persen	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Festival Olahraga Tradisional Tk. Kabupaten dan Tk. Provinsi	1 kegiatan	1 kegiatan	Semua Kab/Kota	
								Festival Pencak Silat tingkat Kabupaten dan Tk. Provinsi	1 kegiatan	1 kegiatan		
							2.19.03.2.05.02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya Pemberdayaan Olahraga Rekreasi	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat	

								2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Peningkatan dan penataan prasarana olahraga rekreasi	16 kecamatan	16 kecamatan	Kab. Bandung Barat	
								2.19.03.2.05.04 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Teridentifikasinya Olahraga Petualangan	16 kecamatan	16 kecamatan	Kab. Bandung Barat	
								2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
								2.19.04.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1 organisasi	1 organisasi	Kab. Bandung Barat	
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
								2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Pengumpulan dan pengolahan Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
								2.20.02.2.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah kegiatan Sosialisasi untuk meningkatkan Kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
								2.20.02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
								2.20.02.2.01.06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
								2.21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
								2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat daerah yang dianalisa kebutuhan dan dikelola Sumber daya Keamanan informasi	20 kegiatan	20 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
								2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	

								2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedianya Aplikasi Layanan Keamanan Informasi	4 Aplikasi	4 Aplikasi	Kab. Bandung Barat	
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah nilai-nilai budaya lokal dan objek pemajuan budaya yang dilestarikan	3 kegiatan	3 kegiatan	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kajian nilai-nilai budaya lokal dan pelestarian ritual budaya	3 Karya Budaya	3 Karya Budaya	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kajian nilai-nilai budaya lokal dan pelestarian ritual budaya	4 Karya Budaya	4 Karya Budaya	Kab. Bandung Barat	
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan pergelaran Objek Pemajuan Kebudayaan	6 Pagelaran	6 Pagelaran	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah penyelenggaraan pergelaran Objek Pemajuan Kebudayaan	4 Pagelaran	4 Pagelaran	Kab. Bandung Barat	
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Pengikutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi sarana/alat kesenian	63 Orang	63 Orang	2.22.02.2.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat					
								2.22.02.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah fasilitasi sarana/alat kesenian	65 Orang	65 Orang	Semua Kab/Kota	
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah dokumentasi cagar budaya/peristiwa sejarah/tokoh sejarah	1 dokumen	1 dokumen	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Cagar Budaya yang meningkatkan Kompetensinya	6 orang	6 orang	2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Cagar Budaya yang meningkatkan Kompetensinya	20 Orang	20 Orang	Kab. Bandung Barat	
								2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah dokumentasi cagar budaya/peristiwa bersejarah/tokoh sejarah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	30 Cagar Budaya	30 Cagar Budaya	2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumentasi Cagar budaya yang dilestarikan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah register Cagar Budaya Yang Berada Dalam Keadaan rusak/baik/ terlindungi	20 Cagar Budaya	20 Cagar Budaya	Kab. Bandung Barat	
								2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Dokumentasi Cagar budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditata/direvitalisasi	6 Cagar Budaya	6 Cagar Budaya	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi	20 Cagar Budaya	20 Cagar Budaya	Kab. Bandung Barat	
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													

	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Perpustakaan	B Predikat	B Predikat	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang terbentuk	27 sekolah	27 sekolah	2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan jejaring kerjasama dan pengembangan perpustakaan	1 dok kajian	1 dok kajian	Kab. Bandung Barat	
									2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah pembinaan perpustakaan sekolah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan perpustakaan khusus	16 kecamatan	16 kecamatan	Kab. Bandung Barat	
									2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kompetensi SDM perpustakaan	45 Orang	45 Orang	Kab. Bandung Barat	
									2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka perpusda	2500 eksemplar	2500 eksemplar	Kab. Bandung Barat	
					2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah pertahun	28800 orang	28800 orang	2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah satuan pendidikan/masyarakat yang memahami pentingnya budaya baca	1 keg	1 keg	Kab. Bandung Barat	
									2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan sarpras perpustakaan	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
									2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah lomba minat baca	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									2.23.02.2.02.05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gerakan motivasi minat baca melalui pelajar dan mahasiswa	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan	BB Poin	BB Poin	2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	2.24.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Penganggaran SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
										Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah	16 Kecamatan	16 Kecamatan		
									2.24.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									2.24.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	

							2.24.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							2.24.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							2.24.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
			2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhiya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	2.24.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terpenuhi	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
				Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen						
							2.24.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
			2.24.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur	100 %	100 %	2.24.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	173 Stel	173 Stel	Kab. Bandung Barat	
							2.24.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	173 Stel	173 Stel	Kab. Bandung Barat	
							2.24.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 org	90 org	Kab. Bandung Barat	
			2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Perkantoran yang Terpenuhi	100 %	100 %	2.24.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik kantor	5 jenis	5 jenis	Kab. Bandung Barat	
							2.24.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 jenis	14 jenis	Kab. Bandung Barat	
							2.24.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	10 jenis	10 jenis	Kab. Bandung Barat	
							2.24.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	31 jenis	31 jenis	Kab. Bandung Barat	
								Jumlah Penerima THR Non PNS		141 orang	Kab. Bandung Barat	
							2.24.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	4 jenis	4 jenis	Kab. Bandung Barat	
							2.24.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2 jenis	2 jenis	Kab. Bandung Barat	

								2.24.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu	240 Box	240 Box	Kab. Bandung Barat		
								2.24.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	10 org	10 org	Kab. Bandung Barat		
				2.24.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Mendukung Tugas dan fungsi Aparatur	100 %	100 %	2.24.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	5 jenis	5 jenis	Kab. Bandung Barat		
				2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Perkantoran yang Terpenuhi	100 %	100 %	2.24.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat		
				2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang Terpelihara untuk Mendukung Tugas dan fungsi Aparatur	100 %	100 %	2.24.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara	8 unit	8 unit	Kab. Bandung Barat		
								2.24.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional lapangan yang terpelihara	8 unit	8 unit	Kab. Bandung Barat		
								2.24.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat		
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip PD yang sudah di Kelola secara baku	46 %	46 %	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sosialisasi dan Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengurusan dan pengendalian arsip dinamis sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan	47 PD	47 PD	Kab. Bandung Barat	
								2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Perangkat Daerah yang menjamin arsip dinamis bernilai guna, autentik, utuh dan dapat digunakan	47 PD	47 PD	Kab. Bandung Barat		
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah	47 PD	47 PD	2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penyerahan arsip statis	30 PD	30 PD	Kab. Bandung Barat		

				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah informasi arsip statis yang di entry dan diakses	1 jenis	1 jenis	2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah informasi arsip statis dan dinamis tingkat Daerah yang dapat diakses	1 Sistem	1 Sistem	Kab. Bandung Barat		
								2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah menerima sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkup Perangkat Daerah	47 PD	47 PD	Kab. Bandung Barat		
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang sudah dilakukan penyelamatan	100 %	100 %	2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah dokumen arsip Perangkat Daerah yang digabung, dibubarkan dan pemekaran kecamatan/desa	3 dok	3 dok	2.24.03.2.03.01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang digabung, dibubarkan dan pemekaran kecamatan/desa	3 PD	3 PD	Kab. Bandung Barat	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP	BB Nilai	BB Nilai	3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								3.25.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat		
								3.25.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat		
								3.25.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat		
								3.25.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat		
								3.25.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Bandung Barat		
								3.25.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Bandung Barat		
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi	100 %	100 %	3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat		

			Perangkat Daerah	Keuangan Perangkat Daerah								
							3.25.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaporan akuntansi	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
							3.25.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunya laporan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							3.25.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya penyusunan bahan tanggapan pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							3.25.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunya Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
			3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.25.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya sarana dan prasarana pegawai	1 paket	1 paket	Kab. Bandung Barat	
							3.25.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan pakaian dinas harian pegawai	29 Orang	29 Orang	Kab. Bandung Barat	
							3.25.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pengolahan data kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
							3.25.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja pegawai	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
							3.25.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan pengetahuan sumberdaya pegawai	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
			3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen listrik sebagai pemenuhan kebutuhan UPTD	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
							3.25.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penunjang kantor	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Bandung Barat	
							3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
							3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
							3.25.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan media cetak dan elektronik	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	

									3.25.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan jamuan makan dan snack untuk tamu dinas	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
									3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan jamuan makan dan snack untuk peserta rapat dinas	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
									3.25.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis dinas	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
									3.25.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelaksanan pembangunan sistem informasi pengolahan data SKPD	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %		3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan jasa telepon dan internet	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Perangkat Daerah	100 %	100 %		3.25.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	2 Unit/Tahun	2 Unit/Tahun	Kab. Bandung Barat	
									3.25.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	4 Unit/Tahun	4 Unit/Tahun	Kab. Bandung Barat	
									3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan pemeliharaan peralatan dan perlenngkapan kantor	24 Unit/Tahun	24 Unit/Tahun	Kab. Bandung Barat	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					3.25.03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksana nya Temu Teknis Pembudidaya Ikan	80 OH	80 OH	Kab. Bandung Barat	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah akan Produksi Ikan Kolam Air tenang	4652 Ton	4652 Ton	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya SDM Pembudidaya Ikan	85 Kelompok	85 Kelompok	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlisedianya Ember Budikdamber	200 Buah	200 Buah	Kab. Bandung Barat	
		Jumlah Produksi Benih Ikan	196.7 Juta ekor	196.7 Juta ekor						Tersedianya Benih Ikan Arwana Banjar	292 Ekor	292 Ekor		
										Tersedianya Benih Ikan Gurame	10881 Ekor	10881 Ekor		
										Tersedianya Benih Ikan Koi	1070 Ekor	1070 Ekor		
										Tersedianya Benih Ikan Lele	382807 Ekor	382807 Ekor		
										Tersedianya Benih Ikan Mas	1350 Kg	1350 Kg		
										Tersedianya Benih Ikan Nila	16106 Kg	16106 Kg		

								Tersedianya Benih Ikan Patin	79320 e	79320 e		
								Tersedianya Benih Kangkung	20 Kg	20 Kg		
								Tersedianya Calon Induk Lele Sangkuriang	10 Set	10 Set		
								Tersedianya EM4 Perikanan	20 Botol	20 Botol		
								Tersedianya Indukan Nila	1 Set	1 Set		
								Tersedianya Pakan Ikan	68142 Kg	68142 Kg		
							3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksanaan Bimbingan Teknis Budidaya Ikan	100 Orang	100 Orang	Kab. Bandung Barat	
								Terlaksananya Bimbingan Teknis Alih Usaha dan Wirausaha	55 Orang	55 Orang		
			3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SDM Pembudidaya Ikan	85 Kelompok	85 Kelompok	3.25.04.2.03.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring TDPIK	16 Kecamatan	16 Kecamatan	Kab. Bandung Barat	
								Temu Teknis Kemitraan	40 Orang	40 Orang		
								Temu Teknis TDPIK	30 Orang	30 Orang		
			3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya Saran dan Prasarana Perikanan	20 %	20 %	3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Statistik	16 Kecamatan	16 Kecamatan	Kab. Bandung Barat	
							3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan perbaikan/rehabilitasi kolam air tawar	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
								Penyediaan bahan obat-obatan dan kimia	1 Paket	1 Paket		
								Penyediaan Induk Lele Sangkuriang dan Induk Lele Mutiara	10 Set	10 Set		
								Penyediaan pakan benih, pakan induk terapung, dan pakan induk tenggelang	8950 Kilogram	8950 Kilogram		
								Penyediaan pakan cacing sutera	200 Liter	200 Liter		
								Penyediaan penunjang operasional UPT Pembenuhan Ikan	1 Paket	1 Paket		
							3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Batu Aerasi	1080 Buah	1080 Buah	Kab. Bandung Barat	
								Tersedianya Benih Ikan Gurame	24160 Kg	24160 Kg		
								Tersedianya Benih Ikan Lele	236736 Ekor	236736 Ekor		
								Tersedianya Benih Ikan Nila	474 Kg	474 Kg		
								Tersedianya High Blow	54 Buah	54 Buah		
								Tersedianya Kapur Pertanian	440 Kg	440 Kg		
								Tersedianya Kolam Terpal Bulat Terpasang	270 Set	270 Set		
								Tersedianya Molase	270 Kg	270 Kg		
								Tersedianya Pakan Ikan	44450 Kg	44450 Kg		
								Tersedianya Selang Aerasi	6966 Meter	6966 Meter		
								Terlaksanaan Bimbingan Teknis Hama Penyakit Ikan	20 OH	20 OH		

									3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terujinya Hama Penyakit Ikan	20 Sample	20 Sample	Kab. Bandung Barat	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan SDP	20 %	20 %	3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	pelestarian SDP	2 SDP	2 SDP	3.25.05.2.01.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksana nya Bersih Waduk	50 OH	50 OH	Kab. Bandung Barat	
										Terlaksana nya Restocking (Penebaran) Ikan Endemik di Perairan Umum Darat	36000 Ekor	36000 Ekor		
										Terlaksana nya Sosialisasi Pokmaswas di Perairan Umum Daerah	30 Orang	30 Orang		
										Tersedianya Papan Himbauan	7 Unit	7 Unit		
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	86 Kelompok	86 Kelompok	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tersusunya Dokumen Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Usaha Pengolahan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
										Terdistribusinya Booklet Tanda Daftar Usaha Pengolah Hasil Perikanan	500 Buah	500 Buah		
										Terlaksananya Rapat FGD Kelompok Pengolah Hasil Perikanan Tentang SKP	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
										Terlaksananya Sosialisasi Persyaratan Penerbitan SKP	1 Dokumen	1 Dokumen		
					3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya sosialisasi , bimtek dan pelatihan bagi pelaku usaha pengolahan perikanan	3 Kali	3 Kali	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Bimbingan Teknis Perizinan PIRT dan BPOM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
										Terlaksananya Perayaan Hari Ikan Nasional	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
										Terlaksananya Safari/Roadshow FORIKAN/Gemarikan	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
										Terlaksananya Sosialisasi Pengukuhan FORIKAN Kabupaten Bandung Barat	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
					3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Saran dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan	2 Paket	2 Paket	3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bedah UPI Skala Mikro dan Kecil	2 Kelompok	2 Kelompok	Kab. Bandung Barat	
										Terlaksananya Rapat Sosialisasi Bedah UPI Skala Mikro dan Kecil	40 Orang	40 Orang		
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														

3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	0 0	0 0	3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di Evaluasi	15 Dokumen	15 Dokumen	3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renja, Renja Perubahan, Perjanjian Kinerja & Perjanjian Kinerja Perubahan	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
	Tercapainya Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas	15 Dokumen	15 Dokumen										
								3.26.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								3.26.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								3.26.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								3.26.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								3.26.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang di Evaluasi	3 Dokumen	3 Dokumen	3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Capaian Kinerja Aparatur	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
								3.26.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								3.26.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan/ Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
				3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase Destinasi Wisata yang memenuhi standar	100 %	100 %	3.26.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu	120 stel	120 stel	Kab. Bandung Barat	
					Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur Dinas	100 %	100 %						
								3.26.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	umlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	60 stel	60 stel	Kab. Bandung Barat	
								3.26.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sumber daya aparatur yang mendapatkansosialisasi	60 Orang	60 Orang	Kab. Bandung Barat	
								3.26.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah sumber daya aparatur yang mendapatkanpeembinaan	60 Orang	60 Orang	Kab. Bandung Barat	

							Peraturan Perundang-Undangan					
			3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	100 %	3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan Komponen Instalasi Listrik	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
							3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
							3.26.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
							3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
							3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Dinas Serta Terlaksananya Penggandaan Dokumen Dinas	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
							3.26.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan dan Buku Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
							3.26.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan makan dan minum tamu	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
							3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas di dalam provinsi dan perjalanan di luar provinsi	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
			3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	prosentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	100 %	3.26.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeulair	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
			3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	100 %	3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon dan Internet Kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
			3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n prosentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100 %	100 %	3.26.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	

									3.26.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata yang memenuhi standar	60 %	60 %	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi Wisata di KBB dalam skala prioritas untuk dikembangkan	2 Destinasi	2 Destinasi	3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi Wisata di KBB dalam skala prioritas untuk dikembangkan	1 Destinasi	1 Destinasi	Kab. Bandung Barat	
					3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang memenuhi standar	100 %	100 %	3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi wisata yang dikembangkan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah objek wisata yang dipelihara/ dibangun	3 Destinasi	3 Destinasi	Kab. Bandung Barat	
									3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pokdarwis yang terbentuk	5 Pokdarwis	5 Pokdarwis	Kab. Bandung Barat	
									3.26.02.2.03.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan dari Objek Wisata yang Dikelola oleh Pemerintah	30000 Orang	30000 Orang	Kab. Bandung Barat	
					3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Industri wisata yang memenuhi standar	85 Industri	85 Industri	3.26.02.2.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Industri wisata yang berinvestasi	85 industri	85 industri	Kab. Bandung Barat	
									3.26.02.2.04.04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah pembinaan usaha jasa pariwisata	85 industri	85 industri	Kab. Bandung Barat	
									3.26.02.2.04.05 Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Industri dan usaha pariwisata yang memenuhi standar	85 industri	85 industri	Kab. Bandung Barat	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase kegiatan promosi pariwisata, kebudaya dan ekonomi kreatif yang efektif	100 %	100 %	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan promosi pariwisata, budaya, Kemitraan dan ekonomi kreatif yang efektif	100 %	100 %	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media sebaran informasi mengenai potensipariwisata, budaya dan ekonomi kreatif	5 Media	5 Media	Kab. Bandung Barat	

									3.26.03.2.01.02 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi pariwisata dan budaya	3 event	3 event	Kab. Bandung Barat	
									3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah data dan informasi mengenai Pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata	1 Kemitraan	1 Kemitraan	Kab. Bandung Barat	
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Perluasan sub sektor ekonomi kreatif	1 Sub Sektor	1 Sub Sektor	3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif	1 Zona Kreatif	1 Zona Kreatif	3.26.04.2.01.01 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah zona ekonomi kreatif	1 Zona Kreatif	1 Zona Kreatif	Kab. Bandung Barat	
					3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.26.04.2.02.08 Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Produk Kreativitas yang dilindungi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									3.26.04.2.02.09 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rencana Aksi	1 Kajian	1 Kajian	Kab. Bandung Barat	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku usaha industri kreatif, penggerak pariwisata dan budaya yang meningkat kompetensinya	100 Orang	100 Orang	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku usaha industri kreatif, penggerak pariwisata dan budaya yang meningkat kompetensinya	100 Orang	100 Orang	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pelaku penggerak pariwisata yang meningkat kompetensinya	50 Orang	50 Orang	Kab. Bandung Barat	
									3.26.05.2.01.05 Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku kreatif yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan produksi	2 keg/event	2 keg/event	Kab. Bandung Barat	
									3.26.05.2.01.06 Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang meningkat Kompetensinya	50 Orang	50 Orang	Kab. Bandung Barat	

			3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi dan mengalami kekuatan jejaring	75 Orang	75 Orang	3.26.05.2.02.01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengalami kekuatan jejaring	50 Orang	50 Orang	Kab. Bandung Barat	
							3.26.05.2.02.03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan sertifikat profesi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi peternakan	20 Kelompok	20 Kelompok	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	terfasilitasinya bantuan sarana produksi pertanian	100 %	100 %	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Bimbingan Teknis	2 Kali	2 Kali	Kab. Bandung Barat
	Jumlah produksi Pertanian	444368 ton	444368 ton		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Peternakan	16 Kecamatan	16 Kecamatan		Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	12 Kali	12 Kali	
	Jumlah produksi Pertanian (Tanaman Hias)	100468791 tan gkai	100468791 tan gkai						Sarana produksi pertanian (pupuk nonsubsidi dan pestisida)	1 Paket	1 Paket	
	Persentase kelahiran Ternak	78 %	78 %									
	Persentase Penyebaran Bibit unggul	15 %	15 %									
								3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Bantuan Sarana Alat Mesin Pertanian	11 Paket	11 Paket	Kab. Bandung Barat
									Bantuan Sarana Pasca Panen	3 paket	3 paket	
									Bimbingan Teknis	2 Kali	2 Kali	
									Jaket	70 Pasang	70 Pasang	
									N2 Cair	1500 Liter	1500 Liter	
									Peningkatan Penggunaan Sarana Peternakan	1 paket	1 paket	
									peningkatan peralatan Petugas Inseminasi Buatan (IB)	1 paket	1 paket	
									Plastik Gloves	50 box	50 box	
									Plastik sheet	50 Pack	50 Pack	
									Sepatu Boot	70 Pasang	70 Pasang	
									Straw Grade A	1500 Dosis	1500 Dosis	
									Topi Kerja	70 Buah	70 Buah	
									Wear Pack	70 Pasang	70 Pasang	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	terfasilitasinya penyaluran benih unggul pertanian dan sertifikasi benih	100 %	100 %	3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Sertifikasi Tanaman Hortikultura	1 komoditi	1 komoditi	Kab. Bandung Barat
									Sertifikasi Tanaman Perkebunan	1 Komoditi	1 Komoditi	

			Kewenangan Kabupaten/Kota									
							3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Pelatihan Penangkar benih Persediaan Bibit Tanaman Sertifikasi Benih Tanaman	3 Kegiatan 1 Paket 1 Komoditas	3 Kegiatan 1 Paket 1 Komoditas	Kab. Bandung Barat	
							3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Bantuan Bibit Tanaman Bimbingan Teknis SIPDPS Sosialisasi Pemetaan Poligon	20 Paket 1 Kali 4 Kali	20 Paket 1 Kali 4 Kali	Kab. Bandung Barat	
			3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	3.27.02.2.03.02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Peningkatan, Pengawasan Mutu Pakan Peningkatan Sumber Daya Peternak Di Kabupaten Bandung Barat	40 Sample 200 Peserta	40 Sample 200 Peserta	Kab. Bandung Barat	
			3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Terlaksananya Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	16 Kecamatan	16 Kecamatan	3.27.02.2.04.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Terlaksananya uji laboratorium sensitifitas antibiotika sebanyak Tersedianya cetak buku seputar obat hewan dan herbal untuk ternak sebagai sarana KIE tentang mutu, khasiat dan keamanan obat hewan Tersedianya obat-obatan sebagai bahan uji laboratorium sensitifitas antibiotika	140 Sampel 165 Buku 140 Sampel	140 Sampel 165 Buku 140 Sampel	Kab. Bandung Barat	
			3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	16 Kecamatan	16 Kecamatan	3.27.02.2.05.01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak					
							3.27.02.2.05.04 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Peningkatan Ketersediaan Bibit Tanaman Hijauan Pakan Ternak (HPT) Peningkatan Ketersediaan Pakan Ternak Ayam Petelur Peningkatan Ketersediaan Pakan Ternak Sapi Perah Peningkatan Ketersediaan Pakan Ternak Sapi Potong	1 paket 2000 Kg 29000 Kg 5000 Kg	1 paket 2000 Kg 29000 Kg 5000 Kg	Kab. Bandung Barat	
							3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan	Peningkatan Kualitas Benih/ Bibit Ternak dan HPT Terdistribusikannya ternak ayam pedaging	16 Kecamatan 2250 Ekor	16 Kecamatan 2250 Ekor	Kab. Bandung Barat	

[illegible]

										Terlaksananya perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan	1 Paket	1 Paket				
										Tersedianya peralatan penunjang operasional RPH	1 paket	1 paket				
										Tersedianya sertifikat halal juru sembelih dan RPH	5 paket	5 paket				
									3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Pembangunan BPP	2 Unit	2 Unit	Kab. Bandung Barat			
										Rehabilitasi BPP	1 Unit	1 Unit				
									3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Bimbingan Teknis	1 Kali	1 Kali	Kab. Bandung Barat			
										Embung (Bangub)		2 Unit				
										Pembangunan Green House	2 Unit	2 Unit				
										pembangunan packing house	1 unit	1 unit				
										Peningkatan Rehabilitasi Sarana Pendukung Peternakan	2 paket	2 paket				
										Tersedianya Beban Listrik P1 daya 1300 VA	15000 KWH	15000 KWH				
										Tersedianya Pakan Hewan Konsentrat Sapi Perah	30000 KG	30000 KG				
										Tersedianya Pakan Hewan Konsentrat Sapi potong	30000 KG	30000 KG				
										Tersedianya pakan hijauan	200000 Batan g Pohon	200000 Batan g Pohon				
										UPH Tembakau (DBHCHT)		3 Unit				
				3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit	1 Wilayah	1 Wilayah	3.27.03.2.03.01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Peningkatan Soaialisai Calon Penerima Bantuan	69 Peserta	69 Peserta	Kab. Bandung Barat				
										TPeningkatan SDM Petugas IB	15 Peserta		15 Peserta			
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan pelayanan kesehatan hewan (%)	63 %	63 %	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terlaksananya pendataan Hewan Penular Rabies	16 Kecamatan	16 Kecamatan	Kab. Bandung Barat			
		Prevalensi Brucellosis (%)	4 %	4 %							Terlaksananya pengendalian populasi Hewan Penular Rabies	16 Kecamatan		16 Kecamatan		
											Terlaksananya vaksinasi Hewan Penular Rabies	16 Kecamatan		16 Kecamatan		
								3.27.04.2.01.02 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan PMK		16 Kecamatan	Kab. Bandung Barat				
									Terlaksananya upaya pembebasan helminthiasis	700 ekor	700 ekor					
									Terlaksananya upaya pembebasan penyakit AI	16 Kecamatan	16 Kecamatan					
									Terlaksananya upaya pembebasan penyakit anthrax	16 Kecamatan	16 Kecamatan					
								3.27.04.2.01.03 Penanggulangan Daerah	Terlaksananya penanggulangan brucellosis pada pedet	1000 ekor	1000 ekor	Kab. Bandung Barat				

							Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular					
			3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	3.27.04.2.02.01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Terlaksananya kegiatan penilaian resiko penyakit hewan	6 IKHS	6 IKHS		
								Terlaksananya Penanganan PMK		16 Kecamatan		
								Terlaksananya rapat persiapan Penilaian resiko penyakit hewan	6 IKHS	6 IKHS		
							3.27.04.2.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya pemenuhan syarat dan kesehatan hewan kurban	16 Kecamatan	16 Kecamatan	Kab. Bandung Barat	
								Terlaksananya pengawasan dan penerapan persyaratan teknis keluar masuk hewan	8 Pasar Hewan	8 Pasar Hewan		
								Terlaksananya sosialisasi hewan kurban	165 Orang	165 Orang		
							3.27.04.2.02.03 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi lalu lintas hewan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	Semua Kab/Kota	
								Terlaksananya koordinasi pemeriksaan hewan di perbatasan	4 Instansi	4 Instansi		
								Terlaksananya sosialisasi pengawasan perdagangan ternak antar daerah	25 orang	25 orang		
			3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik veteriner	16 Kecamatan	16 Kecamatan	3.27.04.2.03.01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Terlaksananya koordinasi surveilans penyakit Hewan dengan Balai Veteriner Subang	10 Orang	10 Orang	Kab. Bandung Barat	
								Terlaksananya koordinasi surveilans penyakit Hewan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat	10 Orang	10 Orang		
								Terlaksananya pengambilan sampel	60 Sampel	60 Sampel		
								Tersedianya kajian data epidemiologi penyakit hewan menular strategis	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
							3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Terlaksananya alat dan bahan pelayanan jasa medik veteriner	16 Kecamatan	16 Kecamatan	Semua Kab/Kota	
								Terlaksananya belanja oprasional selama 12 bulan di unit pelayanan	3 unit	3 unit		
			3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengawasan Persyaratan Teknis Kesmavet	16 Kecamatan	16 Kecamatan	3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Terlaksanakannya rapat kerja Unit Usaha Produk Hewan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya rapat kerja evaluasi pengambilan sampel	27 orang	27 orang		
								Terlaksananya rapat kerja evaluasi pengawasan pangan asal hewan	27 orang	27 orang		
								Terlaksananya rapat kerja rencana pengambilan sampel	27 orang	27 orang		

									Terlaksananya rapat kerja rencana pengawasan keamanan pangan asal hewan	27 orang	27 orang			
									Terlaksananya rapat peningkatan Higine dan Sanitasi	27 orang	27 orang			
								3.27.04.2.04.03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Terlaksanakannya Sosialisasi ijin edar produk hewan skala rumah tangga (IPRT)	30 unit usaha	30 unit usaha	Semua Kab/Kota		
					3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya Pengawasan Persyaratan Teknis Kesrawan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	3.27.04.2.05.01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya rapat evaluasi pengawasan pemotongan hewan qurban	30 orang	30 orang	Kab. Bandung Barat	
										Terlaksananya rapat penerapan kesejahteraan hewan pada peternakan domba / kambing	30 orang	30 orang		
										Terlaksananya rapat penerapan kesejahteraan hewan pada peternakan sapi perah	30 orang	30 orang		
										Terlaksananya rapat penerapan kesejahteraan hewan pada tempat pemotongan ternak	30 orang	30 orang		
										Terlaksananya rapat rencana pengawasan pemotongan hewan qurban	30 orang	30 orang		
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah produksi Pertanian	444368 ton	444368 ton	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Bantuan sarana produksi pertanian	100 %	100 %	3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Sarana Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	2 Paket	2 Paket	Kab. Bandung Barat	
		Jumlah produksi Pertanian (Tanaman Hias)	100468792 tan gkai	100468792 tan gkai		Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Zoonosis	100 %	100 %						
		Kasus Wabah Zoonosis yang tertanggulangi	100 %	100 %										
								3.27.05.2.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Sarana Produksi Pertanian untuk Recovery Dampak Perubahan Iklim	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat		
								3.27.05.2.01.04 Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Terlaksananya penanggulangan mastitis pada sapi perah	600 ekor	600 ekor	Kab. Bandung Barat		
	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Nilai Tukar Petani (NTP)	110.50 Poin	110.50 Poin	3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	100 %	100 %	3.27.06.2.01.03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Monitoring Perizinan Usaha Pertanian	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota	
					3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan,	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan,	16 Kecamatan	16 Kecamatan	3.27.06.2.02.01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan,	Terlaksananya bimbingan teknis penatausahaan penerbitan izin usaha pelayanan kesehatan hewan	25 Peserta	25 Peserta	Kab. Bandung Barat	

					Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan			Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan					
									3.27.06.2.02.04 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Terlaksananya koordinasi pengawasan izin usaha fasilitas pelayanan kesehatan hewan/pasar hewan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	Kab. Bandung Barat	
										Terlaksananya sosialisasi perizinan dokter hewan praktek	25 Orang	25 Orang		
					3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Terlaksananya Fasilitas dan Pengawasan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	3.27.06.2.03.01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terlaksananya fasilitasi perizinan bagi pedagang obat	10 Orang	10 Orang	Kab. Bandung Barat	
										Terlaksananya sosialisasi fasilitas pemenuhan komitmen izin usaha toko dan depo obat hewan/ petshop	1 kali	1 kali		
									3.27.06.2.03.02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terlaksananya Pemetaan Usaha Pengecer Obat hewan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	Kab. Bandung Barat	
										Terlaksananya Pengawasan Izin Usaha Pengecer Obat hewan	16 Kecamatan	16 Kecamatan		
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	terfasilitasinya Penyuluhan Pertanian	100 %	100 %	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	bimtek programa Tk Kabupaten	1 Kali	1 Kali	Kab. Bandung Barat	
		Nilai Tukar Petani (NTP)	25 orang	25 orang		Terlaksananya Penyuluhan Peternakan	16 Kecamatan	16 Kecamatan		bimtek programa Tk Kecamatan	16 kali	16 kali		
		Persentase penyuluh pertanian yang melaksanakan Diklat Teknis	25 orang	25 orang						BOP penyuluh	1 tahun	1 tahun		
										BOP Penyuluh Pertanian (DAK)	16 Kecamatan	16 Kecamatan		
										Terlaksannya pelatihan penyuluh	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
									3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatnya Kapasitas (SDM) Kelompok Tani Ternak	300 Peserta	300 Peserta	Kab. Bandung Barat	
										Meningkatnya Penanggulangan Limbah Peternakan untuk mendukung Program CITARUM HARUM	3 paket	3 paket		
										Pelatihan Kelompok Tani	2 Kelompok	2 Kelompok		
									3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Pembangunan Kantor BPP	2 Unit	2 Unit	Kab. Bandung Barat	
										Peralatan Penunjang Kantor BPP	3 Paket	3 Paket		
										Rehabilitasi Kantor BPP	1 Unit	1 Unit		
										Sewa Kantor BPPPK	4 Unit	4 Unit		
										Sewa Lahan BPPPK	5 Unit	5 Unit		
									3.27.07.2.01.05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah	Sekolah Lapang Kelompok Tani	7 Kali	7 Kali		

								Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota					
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan	4268 Jumlah	4268 Jumlah	3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Terlaksananya Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.30.02.2.01.01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah perolehan IUPPT, IUPP dan IUTS dalam Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Semua Kab/Kota	
				3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.30.02.2.02.01 Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
				3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Terlaksananya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dari Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3.30.02.2.03.01 Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
								3.30.02.2.03.02 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
				3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Terlaksananya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3.30.02.2.04.01 Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri					
								3.30.02.2.04.02 Fasilitas Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri					
				3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Terlaksananya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.30.02.2.05.01 Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	

					C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	penjual langsung minum di tempat							
					3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kabupaten/kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3.30.02.2.06.01 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat
									3.30.02.2.06.02 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Fasilitas pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat
									3.30.02.2.06.03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat
					3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi daerah Kabupaten/Kota)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.30.02.2.07.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Layanan Penerbitan SKA	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	0Prosentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan	33 Persen	33 Persen	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat
		Prosentase Peningkatan Sarpras dan Distribusi Perdagangan	33 Persen	33 Persen		Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana	4 Kegiatan	4 Kegiatan					

						Distribusi Perdagangan											
									3.30.03.2.01.02 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat				
					3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat				
									3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat				
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Monitoring Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	150 Monitoring	150 Monitoring	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3.30.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat				
									3.30.04.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat				
									3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat				
					3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat				
									3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat				

									Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					
									3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan		3.30.04.2.03.01 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									3.30.04.2.03.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Prosentase Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	50 Persen	50 Persen	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	6 Kegiatan	3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
									3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang Nasional	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									3.30.05.2.01.04 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
									3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Peningkatan Citra Produk Ekspor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase standarisasi dan perlindungan Konsumen	40 Persen	40 Persen	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Ulang, dan Pengawasan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Ulang	Jumlah pelayanan Metrologi Legal dalam pelayanan tera dan tera ulang UTP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	

					Tera Ulang, dan Pengawasan										
									3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat		
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota	7 Promosi/Kegiatan	7 Promosi/Kegiatan	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat		
									3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat		
									3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat		
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	100 Persen	100 Persen	3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	3.31.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat		
									3.31.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Kab. Bandung Barat		
									3.31.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan DPA SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat		
									3.31.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				Kab. Bandung Barat		
									3.31.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Kab. Bandung Barat		
					3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	3.31.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat		
									3.31.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat		

			3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3.31.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100 Persen	100 Persen	Kab. Bandung Barat	
							3.31.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 Persen	100 Persen	Kab. Bandung Barat	
			3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3.31.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
							3.31.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
							3.31.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
							3.31.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
							3.31.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Tamu	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
							3.31.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	100 Persen	Kab. Bandung Barat	
			3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	3.31.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
			3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	3.31.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
							3.31.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
							3.31.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							3.31.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 Persen	100 Persen	Kab. Bandung Barat	

					3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	3.31.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
						Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen						
									3.31.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
									3.31.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 Persen	100 Persen	Kab. Bandung Barat	
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase Pengembang an IKM	40 Persen	40 Persen	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	6 Kegiatan	3.31.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					
									3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					
									3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					
									3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					
									3.31.02.2.01.06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Terlaksananya Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Kawasan Industri Hijau)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA	Pertumbuhan Industri yang berizin	2240 Jumlah	2240 Jumlah	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di	Jumlah Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	

	INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				(IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)			Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota				
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pertumbuhan Industri yang terintegrasi ke dalam SIINAS	300 Jumlah	300 Jumlah	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									3.31.04.2.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industri di Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														
	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran mandiri	5 KK	5 KK	3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	transmigran yang mandiri	80 Persen	80 Persen	3.32.04.2.01.01 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	transmigrasi mandiri	5 kk	5 kk	Kab. Bandung Barat	
4.01 SEKRETARIAT DAERAH														
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	BB Huruf Mutu	BB Huruf Mutu	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(RKT,RENJA,RENSTRA, RKA-DPA)	4 DOK	4 DOK	Kab. Bandung Barat	
									4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 keg	2 keg	Kab. Bandung Barat	
									4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 keg	2 keg	Kab. Bandung Barat	

							4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 keg	2 keg	Kab. Bandung Barat	
							4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 keg	2 keg	Kab. Bandung Barat	
							4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 DOK	2 DOK	Kab. Bandung Barat	
			4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Temuan BPK dan Inspektorat	40 %	40 %	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	Kab. Bandung Barat	
							4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 DOK	1 DOK	Kab. Bandung Barat	
							4.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd	4 Dok	4 Dok	Kab. Bandung Barat	
							4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan kaporan keuangan akhir tahun skpd	2 DOK	2 DOK	Kab. Bandung Barat	
							4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan /triwulan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	17 DOK	17 DOK	Kab. Bandung Barat	
							4.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 DOK	1 DOK	Kab. Bandung Barat	
			4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	100 %	100 %	4.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat	
			4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian sesuai standar dan Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Bererta Atributnya	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
							4.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 DOK	1 DOK	Kab. Bandung Barat	

					4.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	100 Orang	Kab. Bandung Barat	
			4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
					4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
					4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
					4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Kab. Bandung Barat	
					4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Kab. Bandung Barat	
					4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50 Dok	50 Dok	Kab. Bandung Barat	
					4.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Bandung Barat	
					4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Bandung Barat	
			4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	Kab. Bandung Barat	
					4.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit	23 Unit	Kab. Bandung Barat	
			4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Bandung Barat	
					4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Bandung Barat	

						4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Bandung Barat	
						4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Bandung Barat	
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik	80 %	80 %	4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan di Bayar Pajaknya	45 Unit	45 Unit	Kab. Bandung Barat
						4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jyang Dipelihara dan di Bayar Pajaknya	15 Unit	15 Unit	Kab. Bandung Barat	
						4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Kantor	10 Jenis	10 Jenis	Kab. Bandung Barat	
						4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Gedung	1 Gedung	Kab. Bandung Barat	
			4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Bulan	14 Bulan	Kab. Bandung Barat	
						4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Kab. Bandung Barat	
						4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Chek up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	Kab. Bandung Barat	
						4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Tunjangan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	Kab. Bandung Barat	
			4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Bandung Barat	
						4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Bandung Barat	

									4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Bandung Barat	
					4.01.01.2.13 Penataan Organisasi				4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen Evaluasi Anjab. ABK dan Evjab	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat	
								Dokumen Evaluasi dan Pengembangan Kelembagaan Perangkat Daerah		1 Dok	1 Dok			
								Dokumen Evaluasi Tupoksi Kelembagaan		1 Dok	1 Dok			
								Dokumen Standar Kompetensi Manajerial PNS		1 Dok	1 Dok			
								4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen IKM Kabupaten Bandung Barat	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat		
							Dokumen Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah		1 Dok	1 Dok				
							Dokumen SOP		1 Dok	1 Dok				
								4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat		
							Dokumen Pengendalian Reformasi Birokrasi		1 Dok	1 Dok				
								4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen Monev Pelayanan Publik	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat		
							Dokumen Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah		1 Dok	1 Dok				
								4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen LAKIP Kabupaten Bandung Barat	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat		
					4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Layanan Keprotokolan, Persentase Press Realease yang diangkat menjadi berita, Persentase Kegiatan Daerah yang terdokumentasikan	100 %	100 %	4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	keprotokolan	1 tahun	1 tahun	Semua Kab/Kota	
								4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Naskah Sambutan dan Press realease	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat		
								4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumentasi Pimpinan	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat		
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT	Persentase data dan informasi bidang sosial yang di gunakan sebagai policy brief	50 %	50 %	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPM, Persentase Penyusunan dan Penyampaian LPPD Tepat Waktu, Persentase Batas Wilayah, dan Persentase Kecamatan berkinerja baik	100 %	100 %	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	SPM.LLPD,Rakor sinergitas	6 DOK	6 DOK	Kab. Bandung Barat	

		Persentase Penyusunan LPPD sesuai Ketentuan	100 %	100 %										
		Persentase Regulasi yang di tetapkan	70 %	70 %										
								4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumentasi Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 DOK	1 DOK	Kab. Bandung Barat		
								4.01.02.2.01.03 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumentasi Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 DOK	1 DOK	Kab. Bandung Barat		
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Keagamaan, dan Jumlah Usulan Kebijakan berkaitan dengan Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan Masyarakat	25 Dok	25 Dok	4.01.02.2.02.01 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitas Jemaah Haji	3 Keg	3 Keg	Kab. Bandung Barat		
									Fasilitas Kegiatan Keagamaan	25 Keg	25 Keg			
									Tersedianya Data Penerima Hibah	1 Dok	1 Dok			
								4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Tersedianya Data Kesejahteraan Sosial	2 Dok	2 Dok	Kab. Bandung Barat		
								4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Tersedianya Data Kesejahteraan Masyarakat	2 Dok	2 Dok	Kab. Bandung Barat		
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Penyelesaian Produk Hukum Tepat Waktu, Persentase Pendampingan Hukum, dan Persentase Produk Hukum yang tersosialisasikan	100 %	100 %	4.01.02.2.03.01 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Peraturan Daerah, Peraturan Bupati	22 DOK	22 DOK	Kab. Bandung Barat		
								4.01.02.2.03.02 Fasilitas Bantuan Hukum	Pendampingan Penanganan Hukum	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat		
								4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	sosialisasi dan publikasi peraturan	4 keg	4 keg	Kab. Bandung Barat		
				4.01.02.2.04 Fasilitasi	Persentase Implementasi Kerjasama Daerah	60 %	60 %	4.01.02.2.04.01 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumentasi Rekapitulasi Kerjasama dalam negeri	1 DOK	1 DOK	Kab. Bandung Barat		

			Kerjasama Daerah									
							4.01.02.2.04.02 Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Dokumentasi Rekapitulasi Kerjasama luar negeri	1 DOK	1 DOK	Kab. Bandung Barat	
							4.01.02.2.04.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Regulasi, Monitoring, Sosialisasi dan bimtek	1 DOK	1 DOK	Kab. Bandung Barat	
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Tersedianya Data Perkembangan Usaha Daerah/BUMD	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat	
							4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tersedianya Data Produksi dan Distribusi Kebutuhan Pokok Masyarakat	1 Dok	2 Dok	Kab. Bandung Barat	
							4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Tersedianya Data Potensi Perekonomian	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat	
							4.01.03.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Tersedianya Data Perkembangan Usaha Daerah/BUMD	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat	
							4.01.03.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Tersedianya Data Perkembangan Usaha Daerah/BUMD	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat	
			4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				4.01.03.2.02.01 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan administrasi pembangunan daerah	2 Dok	2 Dok	Kab. Bandung Barat	
							4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan administrasi pembangunan daerah	14 Dok	14 Dok	Kab. Bandung Barat	
							4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan administrasi pembangunan daerah	26 Dok	26 Dok	Kab. Bandung Barat	
			4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Semua Kab/Kota	
							4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Layanan Pengadaan secara Elektronik	100 Persentase	100 Persentase	Kab. Bandung Barat	
							4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Personil (occupasi) barang jasa yang memiliki lisensi	21 Org	21 Org	Kab. Bandung Barat	
			4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		5 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD											

4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB Huruf Mutu	BB Huruf Mutu	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								4.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Bandung Barat	
								4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Bandung Barat	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/Bulan	35 orang/Bulan	Kab. Bandung Barat	
								4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Bandung Barat	
								4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Bandung Barat	
								4.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya Administrasi	100 Persen	100 Persen	4.02.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	4 Unit	Kab. Bandung Barat	

			Perangkat Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah								
							4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	Kab. Bandung Barat	
							4.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang	60 orang	Kab. Bandung Barat	
							4.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	10 orang	Kab. Bandung Barat	
							4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	5 orang	Kab. Bandung Barat	
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
							4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Kab. Bandung Barat	
							4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
							4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat	
							4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Kab. Bandung Barat	
							4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	55 Dokumen	55 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							4.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	44 Laporan	44 Laporan	Kab. Bandung Barat	
							4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Bandung Barat	
			4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	0 unit	Kab. Bandung Barat	

			Pemerintah Daerah									
							4.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	5 unit	Kab. Bandung Barat	
			4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yant Tersedia	100 Persen	100 Persen	4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32 Laporan	32 Laporan	Kab. Bandung Barat	
							4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Bandung Barat	
							4.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Bandung Barat	
							4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Bandung Barat	
			4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 unit	25 unit	Kab. Bandung Barat	
							4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	5 unit	Kab. Bandung Barat	
							4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 unit	107 unit	Kab. Bandung Barat	
							4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	Kab. Bandung Barat	
							4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0 unit	Kab. Bandung Barat	
			4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang/bulan	50 orang/bulan		
							4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Semua Kab/Kota	

								4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	50 orang	Semua Kab/Kota	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD				4.02.01.2.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0 Dokumen	0 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								4.02.01.2.16.02 Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan		
								4.02.01.2.16.03 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	45 Laporan	45 Laporan	Semua Kab/Kota	
								4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota	
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	100 %	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	Semua Kab/Kota	
					Terlaksananya Layanan Anggota DPRD	100 Persen	100 Persen						
								4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dokumen	6 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								4.02.02.2.01.04 Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	6 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	100 %	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					Terlaksananya Layanan Anggota DPRD	100 Persen	100 Persen						
								4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen		
								4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen		
								4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang terlaksana	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	

			4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	umlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	14 Laporan	14 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	3 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Kali	1 Kali	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya pembahasan LKPJ	1 keg	1 keg		
			4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	100 Persen	100 Persen	4.02.02.2.04.01 Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	7 Dokumen	7 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4 orang	4 orang	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	8 orang	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
			4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen	100 Persen	4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	2 Laporan	2 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4 dok	4 dok		

									4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik	1 Dokumen	1 Dokumen	4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota		
				Jumlah Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik	1 Kegiatan	1 Kegiatan								
				Persentase pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	100 %	100 %								
				4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah	100 Persen	100 Persen	4.02.02.2.07.01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota		
								4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota		
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasinya Tugas DPRD	100 Persen	100 Persen	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	"Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD"	22 Laporan	22 Laporan	Semua Kab/Kota		
								4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota		
								4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	"Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah"	10 Dokumen	10 Dokumen	Semua Kab/Kota		
								4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	14 Dokumen	14 Dokumen	Semua Kab/Kota		
5.01 PERENCANAAN														
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	BB Angka Mutu	BB Angka Mutu	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	3 dokumen	3 dokumen	Kab. Bandung Barat	
								5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	30 eksemplar	30 eksemplar	Kab. Bandung Barat		
								5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	30 eksemplar	30 eksemplar	Kab. Bandung Barat		
								5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	30 eksemplar	30 eksemplar	Kab. Bandung Barat		
								5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA perubahan	30 eksemplar	30 eksemplar	Kab. Bandung Barat		
								5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Bandung Barat		

							5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	Kab. Bandung Barat	
			5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100 %	100 %	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
							5.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan verifikasi keuangan	12 dokumen	12 dokumen	Kab. Bandung Barat	
							5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	Kab. Bandung Barat	
							5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 laporan	2 laporan	Kab. Bandung Barat	
							5.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
			5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %	5.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	JUMLAH KEGIATAN KEBUTUHAN BMD	2 KEGIATAN	2 KEGIATAN	Kab. Bandung Barat	
							5.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Penatausahaan BMD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
			5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur	55 %	55 %	5.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksana nya rapat koordinasi	7 Kegiatan	7 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Bahan Pakaian Dinas PDH	85 Stel	85 Stel	Kab. Bandung Barat	
							5.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							5.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	75 orang	75 orang	Kab. Bandung Barat	

			5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran	40 %	40 %	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat listrik dan komponen listrik kantor	5 jenis	5 jenis	Kab. Bandung Barat	
							5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan pengadaan kantor	6 jenis	6 jenis	Kab. Bandung Barat	
							5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga / perabot	8 jenis	8 jenis	Kab. Bandung Barat	
							5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor	5 Jenis	5 Jenis	Kab. Bandung Barat	
							5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	2 jenis	2 jenis	Kab. Bandung Barat	
							5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	2 jenis	Kab. Bandung Barat	
							5.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan yang terfasilitasi	200 Org	200 Org	Kab. Bandung Barat	
							5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi	6 kegiatan	6 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
							5.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen arsip dinamis	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
			5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran	40 %	40 %	5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya kegiatan surat menyurat	100 dokumen	100 dokumen	Kab. Bandung Barat	
							5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jaringan internet	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
							5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran	40 %	40 %	5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional	22 Unit	22 Unit	Kab. Bandung Barat	
							5.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12 bulan	12 bulan		

									5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan terlaksananya perbaikan peralatan kerja	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
									5.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD	100 %	100 %	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersediannya Dokumen Analisis	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terlaksanakannya Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Konsultasi Publik	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Forum Perangkat Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kabupaten	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tesedianya Dokumen Pagu Indikatif Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen RKPD, Dokumen RKPD Perubahan dan Dokumen Teknokratis RPJPD	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	tersedianya dokumen makro perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	3 dokumen	Kab. Bandung Barat	
									5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Termanfaatkannya data dan informasi SKPD untuk perencanaan pembangunan	2 kegiatan	2 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
					5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	Terwujudnya Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pembangunan	100 %	100 %	5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dan SPM	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	

					Pembangunan Daerah	Daerah yang Efektif dan Akuntabel								
									5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaaan Pembangunan Daerah	tersedianya dokumen evaluasi RKPD,Renja dan RPJMD Dokumen evaluasi SPM Dokumen laporan TP/UB dan DAK	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD	100 %	100 %	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	100 %	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	30 Dokumen	30 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	Kab. Bandung Barat	
									5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	10 Laporan	Kab. Bandung Barat	
									5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	30 Laporan	30 Laporan	Kab. Bandung Barat	
									5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya	10 Dokumen	10 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
									5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	Kab. Bandung Barat	
									5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	Kab. Bandung Barat	
									5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	10 Laporan	Kab. Bandung Barat	

			5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	100 %	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	2 koordinasi	2 koordinasi	Kab. Bandung Barat	
							5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Perekonomian	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
							5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Perekonomian	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
							5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal	3 koordinasi	3 koordinasi	Kab. Bandung Barat	
							5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	jumlah penyusunan dokumen Asistensi perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
							5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Bandung Barat	
			5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	keterpaduan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana dalam pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat Terwujudnya Pengembangan Wilayah yang Komprehensif Terwujudnya Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
							5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	
							5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat	

						5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Terciptanya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat				
						5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat				
						5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat				
						5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat				
						5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terciptanya Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang KewilayahanKoordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	100 %	100 %	Kab. Bandung Barat				
5.02 KEUANGAN														
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
										Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dok	3 Dok		
									5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	1 Buku	1 Buku	Kab. Bandung Barat	
										Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok		
									5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA	1 Buku	1 Buku	Kab. Bandung Barat	
										Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok		
									5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	1 Buku	1 Buku	Kab. Bandung Barat	
										Jumlah dokumen DPA - SKPD	1 Dok	1 Dok		
									5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubaha DPA SKPD	1 Buku	1 Buku	Kab. Bandung Barat	
										Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok		
									5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKPJ	1 Buah	1 Buah	Kab. Bandung Barat	
										Jumlah dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	1 Dok		
										Evaluasi Kinerja SKPD	1 Tahun	1 Tahun		

					5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja PD	4 triwulan	4 triwulan	Kab. Bandung Barat	
		5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
						Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	65 Orang	65 Orang	Kab. Bandung Barat	
					5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	47 PD	47 PD	Kab. Bandung Barat	
					5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat	
						Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Buku	1 Buku	Kab. Bandung Barat	
					5.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan	1 Buku	1 Buku	Kab. Bandung Barat	
					5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan, laporan realisasi fisik dan non fisik (bulanan, triwulanan dan semesteran)	13 Dok	13 Dok	Kab. Bandung Barat	
						Laporan Keuangan Triwulan/Semesteran	2 Buku	2 Buku	Kab. Bandung Barat	
		5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Terlaksananya rekonsiliasi dan tersedianya laporan bulanan barang milik SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
					5.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik SKPD	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat	
		5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.02.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pakaian, Seragam KORPRI, pakaian OR dan batik	106 Orang	106 Orang	Kab. Bandung Barat	
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Jenis	1 Jenis	Kab. Bandung Barat	
					5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	106 Orang	106 Orang	Kab. Bandung Barat	
						Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai	16 Buah	16 Buah	Kab. Bandung Barat	
					5.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
					5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	270 Orang	270 Orang	Kab. Bandung Barat	
						Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
		5.02.01.2.06 Administrasi			5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15 Jenis	15 Jenis		

			Umum Perangkat Daerah				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	5 Jenis	5 Jenis	Kab. Bandung Barat	
							5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	1 Jenis	Kab. Bandung Barat	
								Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	5 Jenis	Kab. Bandung Barat	
							5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	25 Jenis	25 Jenis	Kab. Bandung Barat	
								Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5 Jenis	5 Jenis	Kab. Bandung Barat	
							5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistic kantor	30 Jenis	30 Jenis	Kab. Bandung Barat	
								Tersedianya Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
							5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13 Jenis	13 Jenis	Kab. Bandung Barat	
								Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
							5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
								Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
							5.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu selama 1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
								Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
							5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
								Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
							5.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Arsip Dinamis	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
							5.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah SPBE pada SKPD	1 SPBE	1 SPBE	Kab. Bandung Barat	
			5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Jumlah kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	1 unit	1 unit	Kab. Bandung Barat	
							5.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas	5 Mobil	5 Mobil	Kab. Bandung Barat	
							5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair kantor yang terpenuhi	9 Jenis	9 Jenis	Kab. Bandung Barat	
								Tersedianya mebelair	1 Jenis	1 Jenis	Kab. Bandung Barat	
			5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Jumlah penyediaan jasa dan surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
							5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Perangko	10000 Lembar	10000 Lembar	Kab. Bandung Barat	
								Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan		

					5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
					5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	Kab. Bandung Barat	
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah sarana dan prasarana kendaraan perorangan/kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	1 unit	1 unit	Kab. Bandung Barat	
						Pajak Kendaraan Dinas	20 Kendaraan	20 Kendaraan	Kab. Bandung Barat	
					5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
						Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	1 Jenis	1 Jenis	Kab. Bandung Barat	
					5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15 Ruangan	15 Ruangan	Kab. Bandung Barat	
						Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Gedung	1 Gedung	Kab. Bandung Barat	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA PD yang terverifikasi	48 PD	48 PD	Kab. Bandung Barat	
					5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA PD yang terverifikasi	48 PD	48 PD	Kab. Bandung Barat	
					5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA PD yang terverifikasi	48 PD	48 PD	Kab. Bandung Barat	
					5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA PD yang terverifikasi	48 PD	48 PD	Kab. Bandung Barat	
					5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen peraturan daerah tentang APBD dan dokumen Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	

					5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Standar Biaya Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					5.02.02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen Rencana Anggaran Pendapatan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen Rencana Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					5.02.02.2.01.13 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Perencanaan Penganggaran PD	48 PD	48 PD	Kab. Bandung Barat	
			5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
					5.02.02.2.02.02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah pelaksanaan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
					5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SP2D	240 Kartu Pengendalian	240 Kartu Pengendalian	Kab. Bandung Barat	
						Jumlah dokumen pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SP2D	5300 Dok SP2D	5300 Dok SP2D		
					5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah pelaksanaan pengelolaan dana transfer	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
					5.02.02.2.02.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Raperbup	1 Raperbup	Kab. Bandung Barat	
						Jumlah Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Laporan	2 Laporan		
						Jumlah Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Keg. Koordinasi	4 Keg. Koordinasi		
						Jumlah Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan	4 Rapat	4 Rapat		

						Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				
					5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah kegiatan pengelolaan data dan arsip perbendaharaan/Terlaksananya penataan dan pengendalian administrasi perbendaharaan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
						Jumlah kegiatan pengelolaan data dan arsip perbendaharaan/Terlaksananya penataan dan pengendalian administrasi perbendaharaan	12 Rapat	12 Rapat		
						Jumlah kegiatan pengelolaan data dan arsip perbendaharaan/Terlaksananya penataan dan pengendalian administrasi perbendaharaan	14 Cetak LedgerGaji	14 Cetak LedgerGaji		
					5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Rapat	12 Rapat	Kab. Bandung Barat	
					5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah pengelolaan administrasi kas daerah	12 Rekon	12 Rekon	Kab. Bandung Barat	
						Jumlah pengelolaan administrasi kas daerah	15000 SP2D	15000 SP2D		
					5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen peraturan/keputusan kepala daerah tentang pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, terwujudnya penatausahaan administrasi perbendaharaan	1 Sistem	1 Sistem	Kab. Bandung Barat	
						Jumlah dokumen peraturan/keputusan kepala daerah tentang pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, terwujudnya penatausahaan administrasi perbendaharaan	150 SK/KepBu p	150 SK/KepBu p		
						Jumlah dokumen peraturan/keputusan kepala daerah tentang pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, terwujudnya penatausahaan administrasi perbendaharaan	10000 SP2D	10000 SP2D		
					5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan/perbendaharaan	1 Sosialisasi	1 Sosialisasi	Kab. Bandung Barat	
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi penerimaan dan belanja daerah	12 Dok. Rekon	12 Dok. Rekon	Kab. Bandung Barat	
						Jumlah dokumen rekonsiliasi penerimaan dan belanja daerah	12 LO	12 LO		
						Jumlah dokumen rekonsiliasi penerimaan dan belanja daerah	12 LRA	12 LRA		
						Jumlah dokumen rekonsiliasi penerimaan dan belanja daerah	12 Neraca	12 Neraca		

							Jumlah dokumen rekonsiliasi penerimaan dan belanja daerah	840 Dok BA	840 Dok BA		
						5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat	
						5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan tersusunnya peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Perda	1 Perda	Kab. Bandung Barat	
						5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
						5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat	
			5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			5.02.02.2.04.04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota	
						5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	null		0 null		
						5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					
						5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota					
			5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan SI Pemda Bidang Keuangan Daerah	1 Sistem Aplikasi	1 Sistem Aplikasi	Kab. Bandung Barat	

					5.02.02.2.05.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan SI Pemda Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	3 Sosialisasi	3 Sosialisasi	Kab. Bandung Barat	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					5.02.03.2.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan terkait BMD	1 Perbup	1 Perbup	Kab. Bandung Barat	
					5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi Penatausahaan BMD	1 Sosialisasi	1 Sosialisasi	Kab. Bandung Barat	
					5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah KIB dan PD yang diinventarisasi	6 KIB	6 KIB	Kab. Bandung Barat	
						Jumlah KIB dan PD yang diinventarisasi	47 PD	47 PD	Kab. Bandung Barat	
					5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Bidang Tanah yang diamankan	1 Sosialisasi	1 Sosialisasi	Kab. Bandung Barat	
						Jumlah Bidang Tanah yang diamankan	75 Plang	75 Plang	Kab. Bandung Barat	
						Jumlah Bidang Tanah yang diamankan	120 Sertifikat	120 Sertifikat	Kab. Bandung Barat	
						Jumlah Bidang Tanah yang diamankan	400 Patok	400 Patok	Kab. Bandung Barat	
					5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Penilaian BMD	2 Penilaian	2 Penilaian	Kab. Bandung Barat	
					5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rakor terkait Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	4 Kali	4 Kali	Kab. Bandung Barat	
					5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Rakor Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	5 Kali	5 Kali	Kab. Bandung Barat	
					5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi Pencatatan BMD	4 Kali	4 Kali	Kab. Bandung Barat	
					5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BMD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi ttg Pembinaan Pengelolaan BMD	1 Kali	1 Kali	Kab. Bandung Barat	

5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Pajak	10 Jenis	10 Jenis	Kab. Bandung Barat	
				5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Pajak	10 Jenis	10 Jenis	Kab. Bandung Barat	
				5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pajak	10 Jenis	10 Jenis	Kab. Bandung Barat	
				5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pajak	10 Jenis	10 Jenis	Kab. Bandung Barat	
				5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pajak	10 Jenis	10 Jenis	Kab. Bandung Barat	
				5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pajak	10 Jenis	10 Jenis	Kab. Bandung Barat	
				5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Pajak	10 Jenis	10 Jenis	Kab. Bandung Barat	
				5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Pajak	10 Jenis	10 Jenis	Kab. Bandung Barat	
				5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pajak	10 Jenis	10 Jenis	Kab. Bandung Barat	
				5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Pajak	10 Jenis	10 Jenis	Kab. Bandung Barat	
				5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Pajak	10 Jenis	10 Jenis	Kab. Bandung Barat	
				5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pajak	10 Jenis	10 Jenis	Kab. Bandung Barat	
				5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pajak	10 Jenis	10 Jenis	Kab. Bandung Barat	
				5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pajak	10 Jenis	10 Jenis	Kab. Bandung Barat	
5.03 KEPEGAWAIAN									

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BB Angka Mutu	BB Angka Mutu	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja PD yang dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	Kab. Bandung Barat	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	14 Bulan	14 Bulan	Kab. Bandung Barat	
								5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
								5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100 %	100 %	5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terpenuhi	12 Jenis	12 Jenis	Kab. Bandung Barat	
								5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	6 Jenis	6 Jenis	Kab. Bandung Barat	
								5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	25 Buah	25 Buah	Kab. Bandung Barat	

									5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang terpenuhi	56 Jenis	56 Jenis	Kab. Bandung Barat	
									5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan yang Terpenuhi	30 Jenis	30 Jenis	Kab. Bandung Barat	
									5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang terpenuhi	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Bandung Barat	
									5.03.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
									5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	55 Kegiatan	55 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
					5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
									5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
					5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Kondisi Baik	100 %	100 %	5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	22 Unit	22 Unit	Kab. Bandung Barat	
									5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	6 Jenis	6 Jenis	Kab. Bandung Barat	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase Aparatur yang mendapatkan Pembinaan Kepegawaian	70 %	70 %	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Terfasilitasinya Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	75 %	75 %	5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Kegiatan Pengadaan PNS dan PPPK yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Administrasi Pemberhentian Yang terselesaikan	450 Orang	450 Orang	Kab. Bandung Barat	
									5.03.02.2.01.08 Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Kegiatan Lembaga Profesi Fasilitas ASN yang Terfasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terlaksana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	

								5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Yang Terlaksana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kab. Bandung Barat			
			5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Terfasilitasinya Mutasi dan Promosi ASN	75 %	75 %		5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Proses Mutasi ASN yang Terfasilitasi	4 Kali	4 Kali	Kab. Bandung Barat			
								5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Periode Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Periode	2 Periode	Kab. Bandung Barat			
								5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Proses Promosi ASN yang Terfasilitasi	4 Kali	4 Kali	Kab. Bandung Barat			
			5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Berkompeten	75 %	75 %		5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Kegiatan Assesment yang Terfasilitasi	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Kab. Bandung Barat			
								5.03.02.2.03.12 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Informasi Jabatan Fungsional ASN yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat			
								5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Pembinaan Jabatan Fungsional ASN yang Dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	Kab. Bandung Barat			
			5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	75 %	75 %		5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat			
								5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat			
								5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat			
								5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Pembinaan Disiplin ASN yang Dilaksanakan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	Kab. Bandung Barat			
								5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Jenis Pelanggaran Disiplin ASN yang Terselesaikan	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Bandung Barat			
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Aparatur yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	70 %	70 %		5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	75 %	75 %	5.04.02.2.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang Dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
						5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial	75 %	75 %	5.04.02.2.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi. Pengelolaan	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial yang Dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	

					Manajerial dan Fungsional				Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan					
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Diseminasi Hasil Kelitbangan	100 %	100 %	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100 %	100 %	5.05.02.2.01.01 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen kelitbangan lingkup otonomi daerah	6 Dok	6 Dok	Kab. Bandung Barat	
									5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kelitbangan	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat	
					5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang sosial dan kependudukan	100 %	100 %	5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen kelitbangan lingkup aspek aspek sosial	4 Dok	4 Dok	Kab. Bandung Barat	
									5.05.02.2.02.05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen kelitbangan lingkup kepariwisataan	2 Dok	2 Dok	Kab. Bandung Barat	
									5.05.02.2.02.10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen kelitbangan lingkup partisipasi masyarakat	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat	
					5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan	100 %	100 %	5.05.02.2.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen kelitbangan lingkup koperasi dan UMKM	2 Dok	2 Dok	Kab. Bandung Barat	

							5.05.02.2.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen kelitbangan lingkup pertanian, perkebunan dan pangan	1 Dok	1 Dok	Kab. Bandung Barat	
							5.05.02.2.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kajian kelitbangan lingkup lingkungan hidup	2 Dok	2 Dok	Kab. Bandung Barat	
			5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif untuk menunjang proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi pembangunan di bidang inovasi dan teknologi	100 %	100 %	5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen kelitbangan lingkup inovasi dan teknologi	3 Dok	3 Dok	Kab. Bandung Barat	
							5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah dokumen sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	2 Dok	2 Dok	Kab. Bandung Barat	
6.01 INSPEKTORAT DAERAH												
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A		6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
			6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	69 Orang	69 Orang	Kab. Bandung Barat	
							6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	

					Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD					
			6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	0 Stel	0 Stel	Kab. Bandung Barat	
					6.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	0 Stel	0 Stel	Kab. Bandung Barat	
					6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	-	0 -	0 -	Kab. Bandung Barat	
			6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	5 Jenis	Kab. Bandung Barat	
					6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	4 Jenis	4 Jenis	Kab. Bandung Barat	
					6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
					6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	19 Jenis	19 Jenis	Kab. Bandung Barat	
					6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Surat Kabar	166 Eksemplar	166 Eksemplar	Kab. Bandung Barat	
					6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
			6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	400 Materai	400 Materai	Kab. Bandung Barat	
					6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	0 -	0 -	Kab. Bandung Barat	
					6.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
			6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	

			Pemerintahan Daerah							
					6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	Kab. Bandung Barat	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP	8 LHP	8 LHP	Kab. Bandung Barat	
					6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP	68 LHP	68 LHP	Kab. Bandung Barat	
					6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Bandung Barat	
					6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Bandung Barat	
					6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa	Jumlah LHP	165 LHP	165 LHP	Kab. Bandung Barat	
					6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
			6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Kasus	20 Kasus	20 Kasus	Kab. Bandung Barat	
					6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Kasus	18 Kasus	18 Kasus	Kab. Bandung Barat	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
					6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
			6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi		6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Bandung Barat	
					6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Bandung Barat	

						6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Bandung Barat		
						6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat		
7.01 KECAMATAN												
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP Kecamatan Cikalongwetan	BB Angka Mutu	BB Angka Mutu	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 dokume	10 dokume	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Bandung Barat
	Nilai SAKIP Kecamatan Padalarang	BB Angka Mutu	BB Angka Mutu		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	12 Dokumen	12 Dokumen		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
	Nilai SAKIP KEC BATUJAJAR	BB Angka Mutu	BB Angka Mutu		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %		Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Nilai SAKIP KEC. CIHAMPELAS	BB Angka Mutu	BB Angka Mutu		Presentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan		100 %		Jumlah Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Nilai SAKIP KEC. Cipongkor	BB Angka Mutu	BB Angka Mutu		Terpenuhinya Laporan Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Lembang	100 %	100 %		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Peanatausahaan Keuangan Tepat Waktu	10 Dokumen	10 Dokumen	
	Nilai SAKIP KEC. CISARUA	BB Angka Mutu	BB Angka Mutu		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggrnan	1 Tahun	1 Tahun		Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	
	Nilai SAKIP KEC GUNUNGHAL U	BB Angka Mutu	BB Angka Mutu		Tersusunnya Dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dok	6 Dok		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja dan Renja Perubahan)	2 Dokumen	2 Dokumen	
	Nilai SAKIP KEC. LEMBANG	BB Angka Mutu	BB Angka Mutu		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen		Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	
	Nilai SAKIP KEC SAGULING	BB Angka Mutu	BB Angka Mutu		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaaran, dan	7 Dokumen	7 Dokumen		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	

						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Nilai SAKIP KEC SINDANGKER TA	BB Angka Mutu	BB Angka Mutu		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %		Tersusunnya Dokumen Renja	2 Dokumen	2 Dokumen		
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %		tersusunnya dokumen Renstra, Renja dan Renja Perubahan	3 dokumen	3 dokumen		
										tersusunnya perencanaan renja dan renja perubahan	2 dokumen	2 dokumen		
										Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Terkordinasi dan tersusunnya perubahan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
										Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
										terpenuhi nya penyusunan RKA	1 dokumen	1 dokumen		
										Tersusunnya dokumen perencanaan RKA 2022	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Tersusunnya Dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen		
										Tersusunnya dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
										Tersusunnya Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Tersusunnya RKA, DPA, RKAP, dan DPPA	1 Dok	1 Dok		
										Tersusunnya RKA	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Duman	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
										Terkordinasi dan tersusunnya dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
										Terlaksananya Koordinasi dokumen Rka Perubahan	1 dokumen	1 dokumen		
										Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
										Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD tepat waktu	1 Dok	1 Dok		

					Tersusunnya dokumen perencanaan RKA Perubahan 2022	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Tersusunnya dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
					Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen		
					Tersusunnya RKA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Jumlah Dokumen DPA_SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Jumlah Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
					Terkordinasi dan tersusunnya DPA	1 dokumen	1 dokumen		
					Terlaksanannya koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Kab.	
					Terlaksananya Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Bandung	
					Terlaksananya Penyusunan DPA	1 dokumen	1 dokumen	Barat	
					Tersedianya dokumen DPA SKPD Tepat waktu	1 Dok	1 Dok		
					Tersusunnya Dokumen DPA	1 dokumen	1 dokumen		
					Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	12 Bulan	12 Bulan		
					Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Tersusunya dokumen perencanaan DPA Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Tersusunya DPA	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Jumlah dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Jumlah Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab.	
					null		0 null	Bandung	
					Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Barat	
					Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
					Terlaksananya Penyusunan perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen		

							Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen		
							Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
							Tersusunnya DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen		
							Tersusunnya dokumen perencanaan Perubahan DPA Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen		
						7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen / Jumlah Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD (LAKIP)	1 Dokumen	1 Dokumen		
							Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen		
							Tersusunnya Dokumen Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen		
							Tersusunnya LAKIP, LKPJ dan LPPD	3 Dokumen	3 Dokumen		
						7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD,LKPJ,LPPD dan Evaluasi SPM	4 Dokumen	4 Dokumen		
							Jumlah Dokumen / Jumlah Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen		
							Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
							Jumlah Kegiatan Kinerja Perangkat Daerah yang terevaluasi	12 Kegiatan	12 Kegiatan		
							telaksananya penyusunan laporan LPPD,LAKIP,SAKIP,E-MONEV	4 dokumen	4 dokumen		
							Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		
							Terlaksananya evaluasi perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen		
							Terlaksananya Rapat Epaluasi Kinerja	4 Kali	4 Kali		
							Terlasananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %		
							Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja SKPD	3 dokumen	3 dokumen		
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	8 Dokumen	8 Dokumen	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Tahun	1 Tahun	
				Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 layanan	2 layanan		gaji dan tunjangan asn	14 bulan	14 bulan	

				Persentase Administrasi Keuangan	100 %	100 %		Jumlah ASN	11 Orang	11 Orang		
				Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %		Jumlah ASN	14 ASN	14 ASN		
				Prosentase Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	1 Tahun	1 Tahun		Jumlah ASN	14 Bulan	14 Bulan		
				Terpenuhiya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %		Jumlah ASN	18 ASN	18 ASN		
				Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %		Jumlah ASN Kecamatan Cisarua	18 Orang	18 Orang		
				Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %		Jumlah ASN Kec Sindangkerta	12 ASN	12 ASN		
				Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %		Terlaksanannya Pembayaran gaji dan tunjangan kinerja ASN	14 bulan	14 bulan		
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan		Terlaksanannya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan		
				Tersusunya Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %		"Terpenuhiya Gaji dan Tunjangan ASN"	14 Bulan	14 Bulan		
								Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan		
								Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan		
								Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang	13 orang		
								Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan		
								Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS Kecamatan Rongga	1 Tahun	1 Tahun		
							7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (CALK)	1 Dokumen	1 Dokumen		
								Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan		
								Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
								Terkoordinasi dan tersusunnya laporan keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen		
								Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat	

[illegible]

				Prosentase kebutuhan yang terpenuhi	1 Tahun	1 Tahun		Tersedianya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	50 Stel	50 Stel		
				Terlaksananya Koordinasi Intern Kantor Kecamatan Lembang	12 Kegiatan	12 Kegiatan						
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %						
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %						
				Tersedianya Pakaian Khusus	40 Orang	40 Orang						
							7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian	27 Stel	27 Stel		
								Jumlah Pakaian Dinas	20 Stel	20 Stel		
								Jumlah Pakaian Dinas	30 Setel	30 Setel		
								Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45 Stel	45 Stel		
								Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Atributnya	8 Stel	8 Stel		
								Jumlah Stel	27 Stel	27 Stel		
								Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur kecamatan	36 stel	36 stel		
								Tersedianya atribut	33 Bulan	33 Bulan		
								Tersedianya Pakaian Batik	24 Stel	24 Stel		
								Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Jenis	4 Jenis		
								Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	40 Orang	40 Orang		
								Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH)	28 Stel	28 Stel		
								Tersedianya Seragam Aparatur	4 Jenis	4 Jenis		
							7.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
								Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan		
								Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
								Jumlah Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		
								Terfasilitasinya Penyusunan Laporan dan Koordinasi Pelaporan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan		
								Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pegawai	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
								terlaksananya koordinasi internal bagi kantor kecamatan lembang	12 Kegiatan	12 Kegiatan		
								Terlaksananya Koordinasi Sistem Informasi Kepegawaian	1 Kegiatan	1 Kegiatan		

							7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 layanan	5 layanan	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Barang	7 Unit	7 Unit	Kab. Bandung Barat	
				Persentase Administrasi Umum	100 %	100 %		Jumlah Jenis	5 Jenis	5 Jenis		
				Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		Jumlah Komponen Instalasi Listrik	7 Jenis	7 Jenis		
				Prosentase kebutuhan Kantor yang terpenuhi	1 Tahun	1 Tahun		Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 Jenis	3 Jenis		
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %		penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 jenis	2 jenis		
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		Terfasilitasinya Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11 Jenis	11 Jenis		
				Terpenuhinya kebutuhan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan		Tersedianya cadangan penerangan kantor	3 Jenis Barang	3 Jenis Barang		
				Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 %	100 %		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	6 Jenis	6 Jenis		
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum Perkantoran	100 %	100 %		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	6 Jenis	6 Jenis		
				Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %		Tersedianya Komponen Instalsi Listrik / Penerangan Kantor	2 Jenis	2 Jenis		
							7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang	5 Jenis	5 Jenis	Kab. Bandung Barat	
								Jumlah Barang	12 Unit	12 Unit		
								Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis		
								Jumlah KJumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantoregiatan	3 Jenis	3 Jenis		
								Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis	8 Jenis		
								Jumlah Peralatan dan perlengkapan kaantor	9 Jenis	9 Jenis		
								penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	4 jenis		
								Terlaksanannya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	2 jenis		
Tersedianya peralatan dan perlenokapan kantor	4 Jenis	4 Jenis										

						Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan		
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	4 Jenis		
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	6 Jenis		
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
						Tersedianya Peralatan Kantor dan perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis		
					7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Barang	5 Unit	5 Unit		
						Jumlah Barang	9 Jenis	9 Jenis		
						Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis	10 Jenis		
						Jumlah KJumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantoregitan	2 Jenis	2 Jenis		
						Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	8 Jenis	8 Jenis		
						Jumlah Peralatan Rumah Tangga	3 Jenis	3 Jenis		
						penyediaan peralatan rumah tangga	8 jenis	8 jenis		
						Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga	5 jenis	5 jenis		
						Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	11 Jenis	11 Jenis		
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5 Jenis	5 Jenis		
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	16 Jenis	16 Jenis		
					7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK	22 Atk	22 Atk		
						Jumlah Bahan Logistik Kantor	21 Jenis	21 Jenis		
						Jumlah Bahan Logistik Kantor	24 Jenis	24 Jenis		
						Jumlah Bahan Logistik Kantor	35 Jenis	35 Jenis		
						Jumlah Barang	23 Jenis	23 Jenis		
						Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	20 Jenis	20 Jenis		
						Jumlah Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan		
						Jumlah Kegiatan Rapat	12 Kegiatan	12 Kegiatan		
						null		0 null		
						penyediaan bahan logistik kantor	12 jenis	12 jenis		
						Terfasilitasinya Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan	12 Bulan		
						Terlaksananya pengadaan logistik kantor	1 tahun	1 tahun		
						Terpenuhinya Alat Tulis kantor, Tersedianya Materai	12 Bulan	12 Bulan		
						Tersedianya Alat Tulis Kantor	17 Jenis	17 Jenis		
						Tersedianya Alat Tulis Kantor	32 Jenis	32 Jenis		
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan		
						Tersedianya Kebutuhan ATK	10 Jenis Barang	10 Jenis Barang		

					7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	4 Jenis	Kab. Bandung Barat	
						Jumlah pengadaan kebutuhan barang cetak dan Penggandaan	2 Jenis	2 Jenis		
						Jumlah Penggandaan	10000 Lembar	10000 Lembar		
						Jumlah Penggandaan	5000 Lembar	5000 Lembar		
						Jumlah Penggandaan	30345 Lembar	30345 Lembar		
						penyediaan barang cetak dan pengadaan	12 bulan	12 bulan		
						Terlaksananya pengadaan barang cetak dan pengadaan	1 Tahun	1 Tahun		
						Tersedianya Barang Cetak dan Kebutuhan Pengadaan	13 Jenis	13 Jenis		
						Tersedianya Barang Cetak dan Kebutuhan Penggandaan	4 Jenis	4 Jenis		
						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	3 Jenis		
						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan		
					7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	1 Jenis	1 Jenis	Kab. Bandung Barat	
						Jumlah Kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan		
						Tersedianya Bahan Bacaan	1 Tahun	1 Tahun		
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun		
					7.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
						Jumlah Kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan		
						Jumlah Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		
						Jumlah Kegiatan Kunjungan Tamu	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
						Jumlah Kunjungan Tamu	12 kali	12 kali		
						Kunjungan Tamu yang terfasilitasi	11 Bulan	11 Bulan		
						Persentase Fasilitas Kunjungan Tamu	12 keg	12 keg		
						persentase memfasilitasi kunjungan pimpinan ke kecamatan	100 %	100 %		
						Terfasilitasinya kunjungan tamu	1 tahun	1 tahun		
						Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan		
						Tersedianya makanan dan minuman tamu	100 %	100 %		
						Terfasilitasinya Kegiatan Kunjungan Tamu	1 Tahun	1 Tahun		
					7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
						Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan		
						Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun		
						Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Koordinasi Laporan Kegiatan	12 Bulan	12 Bulan		

			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dibeli dalam satu tahun	1 Jenis	1 Jenis	7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan	0 Unit	0 Unit	Kab. Bandung Barat	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %						
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	1 Unit						
				Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %						
							7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase tersedianya kendaraan dins / operasional kantor	4 Unit	4 Unit	Kab. Bandung Barat	
							7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Barang	6 Unit	6 Unit	Kab. Bandung Barat	
								Jumlah Jenis Mebel	2 Jenis	2 Jenis		
								Jumlah mebel	2 Jenis	2 Jenis		
								tersedianya mebel kantor	2 jenis	2 jenis		
								Tersedianya mebeuler	2 Jenis	2 Jenis		
								Tersedianya Pengadaan Mebel	1 Unit	1 Unit		
							7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 Unit	2 Unit	Kab. Bandung Barat	
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang kebutuhan Kantor dalam satu tahun	2 layanan	2 layanan	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan peningkatan kapasitas kinerja ASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %						
				Persentase Terfasilitasinya Kebersihan Kantor	100 %	100 %						
				Prosentase kebutuhan Kantor yang terpenuhi	1 Tahun	1 Tahun						
				Terfasilitasinya Jasa Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	100 %	100 %						

				Terfasilitasinya Kebersihan Kantor	100 %	100 %						
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	2 Jenis Pemeliharaan	2 Jenis Pemeliharaan						
				Terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %						
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan						
							7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Tahun	1 Tahun		
							Jumlah Bulan	12 Bulan	12 Bulan			
							Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
							null		0 null			
							terlaksananya pembayn internet dan air/listrik telepon	12 bulan	12 bulan			
							Terlaksananya Pembayaran Jasa Internet	1 Jenis	1 Jenis			
							Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
							Tersedianya Jasa Komunikasi Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
							Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
							Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	100 %	100 %			
							7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
							Jumlah Barang	3 unit	3 unit			
							Jumlah Barang	3 Unit	3 Unit			
							Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	4 Jenis	4 Jenis			
							Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	100 Persen			
							Terpeliharanya peralatan kantor	2 Jenis Pemeliharaan	2 Jenis Pemeliharaan			
							Tersedianya Peralatan Kebersihan	23 Jenis	23 Jenis			
							7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
							Jumlah Barang	11 Unit	11 Unit			
							Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Orang	1 Orang			
							Jumlah Orang Petugas Kebersihan	1 Orang	1 Orang			
							Tersedianya alat kebersihan dan pembayaran petugas kebersihan	1 Tahun	1 Tahun			
							Tersedianya Bahan Kebersihan	12 Jenis	12 Jenis			
							Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan	Jumlah Asset Kantor dalam keadaan baik	2 Jenis	2 Jenis	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan	3 unit	3 unit		

			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Unit	6 Unit	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	5 Unit	5 Unit		
				Persentase Pemeliharaan Asset Kantor	100 %	100 %		Jumlah Kendaraan	6 Unit	6 Unit		
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		Jumlah Kendaraan	7 Unit	7 Unit		
				Persentase Terpenuhi Pemeliharaan Asset Kantor	100 %	100 %		Jumlah Kendaraan	8 Unit	8 Unit		
				Prosentase kebutuhan Kantor yang terpenuhi	1 Tahun	1 Tahun		Terfasilitasinya Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kedaraan Dinas Roda 4	1 unit	1 unit		
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Kantor	100 %	100 %		Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan 2	7 unit	7 unit		
				Terlaksananya Pemeliharaan Asset Kantor	100 %	100 %		Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (empat)	1 Unit	1 Unit		
				Terpenuhi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor KECamatan	100 %	100 %		terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	9 unit	9 unit		
								Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2	7 unit	7 unit		
								Terlaksananya Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	3 unit	3 unit		
								Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit		
								Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit		
								Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	8 Unit	8 Unit		
								Tersedianya Pemeliharaan STNK, Motor dan Mobil Kendaraan Dinas	3 Jenis Pemeliharaan	3 Jenis Pemeliharaan		
							7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
								Jumlah Barang	9 Unit	9 Unit		

[illegible]

				Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang terkoordinasikan	100 %	100 %		Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
				Terlaksananya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	7 Kegiatan	7 Kegiatan		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi Vertikal terkait	1 tahun	1 tahun		
				Terlaksananya Kegiatan HUT RI, HUT KBB dan MTQ	100 %	100 %		Terlaksananya Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100 %	100 %						
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	100 %	100 %						
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	100 %	100 %						
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	100 %	100 %						
				Tersedianya Pasilitas Pembinaan, Montoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2 Kegiatan	2 Kegiatan						
							7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
								Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan		
								Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
								Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan yang terkoordinasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
								Jumlah Kegiatan PHBN, MTQ, Hari Besar KBB, Festival Keraipan Lokal	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
								Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan		
								Terfasilitasinya Kegiatan EVEN Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan		
								Terfasilitasinya Kegiatan Peringatan HUT RI	1 kegiatan	1 kegiatan		
								Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	1 tahun	1 tahun		

[illegible]

[illegible]

							dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	3 Kegiatan	3 Kegiatan	7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
				Jumlah/Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %		Tersedianya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
				Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %						
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %						
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %						
				Tersedianya Pasilitas Pembinaan, Montoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2 Kegiatan	2 Kegiatan						
				Terwujudnya peningkatan SDM aparatur	100 %	100 %						
							7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Tersedianya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
								Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan		
								Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan		
								Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
								Jumlah Kegiatan Rapat PBB dan Penegakkan Perda IMB yang terkoordinasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
								Jumlah Kewenangan yang dilimpahkan	3 Kegiatan	3 Kegiatan		
								Terfasilitasinya Sosialisasi	2 kegiatan	2 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
								Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 Tahun	1 Tahun		
								Terlaksananya kegiatan KASie EP2D, dan Pendataan Pajak	100 %	100 %		
								Terlaksananya Kegiatan Monev PBB	3 Kali	3 Kali		
								Terlaksananya Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan	12 Bulan	12 Bulan		

[illegible]

[illegible]

							Terlaksananya Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan, Kegiatan PKK, Kegiatan RLS, Kegiatan Verifikasi Pendidikan Non Formal, Kegiatan Vestifal Kearifan Lokal dan Kegiatan PHBN	6 Kegiatan	6 Kegiatan		
							Terlaksananya Kegiatan MTQ Tk Kecamatan ,PHBN Tk Kecamatan,TP-PKK Kecamatan,festival kearifan lokal,Pertemuan PKK,Tenaga Pendidik dan Kependidikan,Kelompok ekraf/Tani/Ternak/UMKM dan Pertemuan LKD	8 Kegiatan	8 Kegiatan		
							Terlaksananya Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12 Bulan	12 Bulan		
							Terlaksananya kegiatan PKK	1 kegiatan	1 kegiatan		
							Terlaksananya pembinaan,monitoring, evaluasi bidang OMD	12 Bulan	12 Bulan		
							terlaksananya pembinaan PKK, Kasie PMD, RT & RW, RLS dan Verifikasi Hibah Pendidikan Non Tunai 6 Kegiatan dan PKBM	6 Kegiatan	6 Kegiatan		
							Terlaksananya PKK	2 kegiatan	2 kegiatan		
							Terlaksananya Sosialisasi Kesarak, Posyandu, RLS PKBM Bidang PMD	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Lembang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Musrenbang dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Lembang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Bandung Barat
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	100 %					
							7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan RT dan RW	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Kab. Bandung Barat
								Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT dan RW	12 Bulan	12 Bulan	
								Terlaksananya pembinaan RT dan RW di wilayah Kecamatan Cihampelas	12 Bulan	12 Bulan	

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terasilitasi	100 %	100 %	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggara n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan	100 %	100 %	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	Kab. Bandung Barat
					Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Kegiatan	5 Kegiatan		Jumlah Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	
					Terlaksananya Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100 %	100 %		Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	
					Terlaksananya Kegiatan Beribada	50 Kegiatan	50 Kegiatan		Terfasilitasinya Kegiatan Kunjungan Tamu	1 Tahun	1 Tahun	
					Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan		Terfasilitasinya Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 kegiatan	4 kegiatan	
					Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %		Terlaksananya Sosialisasi Trantrib dan Linmas Bidang Trantrib	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
					Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %					
					Tersedianya Fasilitas Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Trantrib	1 Kegiatan	1 Kegiatan					
								7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	Kab. Bandung Barat
									Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	
									Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
									Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	Jumlah Kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	Kab. Bandung Barat

			Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah			Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					
				Jumlah Kegiatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	12 Kegiatan	12 Kegiatan		Jumlah Kegiatan	12 Keg	12 Keg		
				Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %		Jumlah Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		
				Terlaksanannya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %		Jumlah Orang	230 Orang	230 Orang		
				Terlaksanannya Pembinaan LINMAS	1 Tahun	1 Tahun		Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban yang terkoordinasi dan Sinergis Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Kegiatan	12 Kegiatan		
				Tersedianya Fasilitas Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Trantribum	1 Kegiatan	1 Kegiatan		Terfasilitasinya Insentif Linmas	12 Bulan	12 Bulan		
								Terfasilitasinya Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
								Terfasilitasinya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan LINMAS	12 Bulan	12 Bulan		
								Terlaksanannya Kegiatan Pembinaan Linmas	12 Bulan	12 Bulan		
								Terlaksanannya Kegiatan Pembinaan LINMAS	1 Tahun	1 Tahun		
								Terlaksanannya Pembinaan LINMAS	1 Tahun	1 Tahun		
								Terwujudnya Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan perundang undangan dan atau Kepolisian negara RI	12 bulan	12 bulan		
			7.01.04.2.04 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksanannya Kegiatan Linmas	12 bulan	12 bulan	7.01.04.2.04.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Anggota Linmas	138 Orang	138 Orang		
								Terlaksanannya Fasilitas Pembinaan, Tranrib dan linmas	12 bulan	12 bulan	Kab. Bandung Barat	

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi	100 %	100 %	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24 Kegiatan	24 Kegiatan	7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
					Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	6 Kegiatan	6 Kegiatan		Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
					Persentase Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa	100 %	100 %		Jumlah Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan		
					Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Di Fasilitasi, Di Rekomendasi dan Di Koordinasi	100 %	100 %		Terfasilitasinya Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 kegiatan	1 kegiatan		
					Terlaksanannya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %		Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
					Terlaksanannya fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	1 keg	1 keg		Terlaksanannya Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
					Terlaksanannya Pembinaan dan Pengawasan Desa	100 %	100 %						
					Terlaksanannya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %						
					Terlaksanannya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %						
					Terlaksanannya Sosialisasi Ketentraman dan Kertertiban serta tata Pemerintahan Desa	100 %	100 %						
					Tersedianya Pasilitas Pembinaan, Montoring dan Evaluasi Bidang BINWASDES	5 Kegiatan	5 Kegiatan						

[illegible]

								7.01.06.2.01.06 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
								7.01.06.2.01.07 Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									Jumlah Kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan		
									Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	1 Kali	1 Kali		
									Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi BPD	12 desa	12 desa		
									Terfasilitasinya Pembinaan tentang Tugas dan Fungsi BPD	1 kegiatan	1 kegiatan		
									Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
								7.01.06.2.01.11 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terfasilitasi	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									Terfasilitasinya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	12 Bulan		
								7.01.06.2.01.12 Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									Jumlah Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		
									Jumlah Pembinaan RT dan RW	12 Kegiatan	12 Kegiatan		
									Terfasilitasinya Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW)	12 Bulan	12 Bulan		
									Terfasilitasinya Pembinaan RW dan RT	12 Bulan	12 Bulan		
									Terlaksananya Pembinaan Ketua RT dan Ketua RW	12 Bulan	12 Bulan		
									Terlaksananya pembinaan RT dan RW di wilayah Kecamatan Cihampelas	660 orang	660 orang		
								7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Kegiatan Pendampingan	6 Desa	6 Desa	Kab. Bandung Barat	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BB Huruf Mutu	BB Huruf Mutu	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Disusun	20 Dokumen	20 Dokumen	Kab. Bandung Barat
									8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Disusun	15 Dokumen	15 Dokumen	Kab. Bandung Barat

						8.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Disusun	15 Dokumen	15 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
						8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Disusun	15 Dokumen	15 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
						8.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Disusun	15 Dokumen	15 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
						8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Disusun	15 Dokumen	15 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
			8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tercapainya SPP/SPM		28 dokumen	Kab. Bandung Barat
							Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang	168 Orang		
						8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
							Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)		1 dokumen		
						8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Disusun	10 Dokumen	17 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
			8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kedisiplinan Aparatur sesuai dengan Ketentuan	100 %	100 %	8.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	, Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian KORPRI, Pakaian Batik Tradisional, dan Pakaian Olahraga	32 Buah	29 Buah	Kab. Bandung Barat
						8.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian ASN dan PTT Badan Kesbangpol	27 Dokumen	30 Dokumen	Kab. Bandung Barat	
			8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	100 %	100 %	8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan	36 Buah	36 Buah	Kab. Bandung Barat
						8.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
							Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga		22 jenis		
						8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan Jumlah ATK yang diadakan	45 Buah	43 Buah	Kab. Bandung Barat	
						8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan yang diadakan	8 Buah	6 jenis	Kab. Bandung Barat	
						8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media Informasi dan Bahan Bacaan	6 Surat Kabar	2 Surat Kabar	Kab. Bandung Barat	

								8.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang di sediakan Terpenuhinya Makan Minum Tamu	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat		
								8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat		
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	100 %	100 %	8.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat		
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang terpenuhi	100 %	100 %	8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang di Perbaiki Pajak STNK Roda Empat,Roda Dua	8 Unit	9 Unit 9 unit	Kab. Bandung Barat		
								8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang di Rehabilitasi	1 Paket	1 Paket	Kab. Bandung Barat		
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat pemahaman politik di masyarakat	100 %	100 %	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Forum Dialog Kebudayaan dan Sosial antar kelompok Masyarakat	100 %	100 %	8.01.02.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Generasi Muda Terlaksananya Pendidikan Bela Negara	400 Orang 2 Kegiatan	5 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
								8.01.02.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan dan Pengembangan Karakter Bangsa	2 Kegiatan	4 Kegiatan	Kab. Bandung Barat		
								8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Rakor FPK di Kab.Bandung Barat	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Kab. Bandung Barat		
								8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	Terlaksananya Sosialisasi dan Rakor Revolusi Mental di Kab.Bandung Barat	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Kab. Bandung Barat		

								Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						
								8.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Wilayah di Kab.Bandung Barat	4 Kali	4 Kali		Kab. Bandung Barat	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman kehidupan Berpolitik yang Demokratis	100 %	100 %	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatkan Peran Tokoh Masyarakat dalam Kehidupan Berdemokrasi	100 %	100 %	8.01.03.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen Hasil Verifikasi Penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik	12 Bulan	15 dokumen	Kab. Bandung Barat	
								8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Bantuan Keuangan Parpol	12 Bulan	1 Kegiatan		Kab. Bandung Barat	
								8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Meningkatkan Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, dan Tokoh Perempuan dalam Kehidupan Berdemokrasi	5 Kegiatan	5 Kegiatan		Kab. Bandung Barat	

									Pemantauan Situasi Politik Di Daerah						
									8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi antar Lembaga	30 Kegiatan	30 Kegiatan	Kab. Bandung Barat		
									8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Situasi Politik	12 Bulan	396 HOK	Kab. Bandung Barat		
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Tercapainya Peningkatan Kualitas SDM pada setiap Organisasi Kemasyarakatan	12 Bulan	12 Bulan	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya seluruh Program Kerja Bidang Organisasi Kemasyarakatan	18 Kegiatan	18 Kegiatan	8.01.04.2.01.01 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tercapainya Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan	2 Kegiatan	1 Dokumen	Kab. Bandung Barat		
									8.01.04.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Bantuan Hibah	1 Kali	1 Kali	Kab. Bandung Barat		
									8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi SIPD dan Peraturan Ormas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat		

									8.01.04.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Jambore Ormas di Kab.Bandung Barat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tercapainya Monitoring dan Evaluasi Ormas di Daerah	5 Kali	5 Kali	Kab. Bandung Barat	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 %	100 %	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Masyarakat di Kab.Bandung Barat	100 %	100 %	8.01.05.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tercapainya Sosialisasi terkait NARKOBA	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
		Meningkatnya Pengetahuan Pencegahan Penyalahgunaa n Narkotika	100 %	100 %										
									8.01.05.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Bantuan Hibah	1 Kali	1 Kali	Semua Kab/Kota	
									8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	Terlaksananya Rakor Bakorpakem di Kab.Bandung Barat	5 Kegiatan	5 Kegiatan		

									Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					
									8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi terkait Eksosbud di Kab.Bandung Barat	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Penyelesaian Jumlah Potensi Konflik Sosial di Daerah	100 %	100 %	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama dengan Aparat Keamanan	12 Bulan	12 Bulan	8.01.06.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Kewaspadaan Dini	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	
									8.01.06.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tercapainya Penyusunan SOP Penanganan Konflik Sosial	12 Bulan	12 Bulan	Kab. Bandung Barat	
									8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Rakor Pelaksana Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Bandung Barat	

					8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	16 Kali	16 Kali	Kab. Bandung Barat	
					8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Rapat Evaluasi	8 Kali	8 Kali	Kab. Bandung Barat	

Tabel 4.1
Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.012.467.578.450	1.050.019.262.085	37.551.683.635
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.012.467.578.450	1.050.019.262.085	37.551.683.635
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.012.467.578.450	1.050.019.262.085	37.551.683.635
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	642.684.246.969	678.084.930.604	35.400.683.635
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.160.881.266	1.160.881.266	-
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.700.000	28.700.000	-
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	72.070.400	72.070.400	-
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	69.990.400	69.990.400	-
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	69.415.400	69.415.400	-
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	68.215.400	68.215.400	-
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	852.489.666	852.489.666	-
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	639.199.201.329	674.476.884.964	35.277.683.635
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	638.755.846.900	674.033.530.535	35.277.683.635
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.709.800	19.709.800	-
1.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	101.187.829	101.187.829	-
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	101.400.000	101.400.000	-
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	170.410.800	170.410.800	-
1.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50.646.000	50.646.000	-
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	653.477.337	653.477.337	-
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	653.477.337	653.477.337	-
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	548.490.987	548.490.987	-
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	481.490.987	481.490.987	-
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	67.000.000	67.000.000	-
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	812.682.450	935.682.450	123.000.000
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	277.911.850	277.911.850	-
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.609.800	39.609.800	-
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190.000.000	313.000.000	123.000.000
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	165.000.800	165.000.800	-
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.160.000	40.160.000	-
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	100.000.000	-
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.480.000	278.480.000	-
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.000.000	60.000.000	-
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.480.000	133.480.000	-
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.000.000	85.000.000	-
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.033.600	31.033.600	-
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.533.600	12.533.600	-
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.500.000	18.500.000	-
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	368.136.438.137	370.287.438.137	2.151.000.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	290.983.960.160	249.475.000.818	- 41.508.959.342
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	920.000.000	1.095.933.000	175.933.000
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	180.000.000	180.000.000	-
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.538.421.750	7.692.648.720	154.226.970
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	15.719.131.077	11.965.926.078	- 3.753.204.999
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.000.000.000	1.000.000.000	-
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	987.089.035	987.089.035	-
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	10.470.000.000	10.128.520.988	- 341.479.012
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	7.009.406.000	12.934.881.473	5.925.475.473
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	2.500.000.000	2.500.000.000	-
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	227.607.870.000	50.000.000	- 227.557.870.000
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	6.214.130.000	6.214.130.000	-
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	188.768.000	188.768.000	-
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	402.346.000	402.346.000	-
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	568.290.800	568.290.800	-
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	36.869.600	36.869.600	-
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.533.640.000	7.253.640.000	720.000.000
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.957.997.898	1.957.997.898	-
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0	181.982.787.476	181.982.787.476

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	0	1.335.171.750	1.335.171.750
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	38.648.889.352	81.419.256.944	42.770.367.592
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	4.638.383.950	5.126.833.762	488.449.812
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	445.834.850	445.834.850	-
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.833.130.719	2.954.030.687	1.120.899.968
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9.196.162.288	4.914.932.726	4.281.229.562
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	823.900.000	823.900.000	-
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	184.634.850	184.634.850	-
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	44.654.000	44.654.000
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	5.902.210.000	2.400.544.250	3.501.665.750
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4.756.492.800	4.668.102.700	88.390.100
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	1.750.000.000	1.750.000.000	-
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	200.000.000	251.812.000	51.812.000
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.961.910.000	6.182.251.700	3.220.341.700
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	342.532.000	357.220.000	14.688.000
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	333.290.000	499.015.000	165.725.000
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	70.000.000	70.000.000	-
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.984.178.000	4.344.178.000	360.000.000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.226.229.895	826.229.895	400.000.000
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0	45.575.082.524	45.575.082.524
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	30.778.457.924	31.668.049.674	889.591.750
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.138.586.546	1.138.586.546	-
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	443.787.741	443.787.741	-
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	480.000.000	415.016.375	64.983.625
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	3.092.626.000	2.976.201.375	116.424.625
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	500.000.000	500.000.000	-
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	20.593.490.000	21.664.490.000	1.071.000.000
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	58.256.000	58.256.000	-
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	3.843.072.300	3.843.072.300	-
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	544.139.337	544.139.337	-
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	84.500.000	84.500.000	-
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.725.130.701	7.725.130.701	-
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	469.289.651	469.289.651	-
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	291.246.150	291.246.150	-
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	5.645.710.000	5.645.710.000	-
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	154.902.000	154.902.000	-
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	92.574.400	92.574.400	-
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	99.823.000	99.823.000	-
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	98.702.800	98.702.800	-
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	771.581.500	771.581.500	-
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	101.301.200	101.301.200	-
01.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	753.816.092	753.816.092	-
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	458.770.100	458.770.100	-
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	105.901.100	105.901.100	-
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	106.040.000	106.040.000	-
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	99.936.000	99.936.000	-
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	146.893.000	146.893.000	-
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	295.045.992	295.045.992	-
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	102.149.163	102.149.163	-
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	90.941.000	90.941.000	-
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	101.955.829	101.955.829	-
01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	600.000.000	600.000.000	-
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	600.000.000	600.000.000	-
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	500.000.000	500.000.000	-
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	100.000.000	-
01.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	46.893.344	46.893.344	-
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	46.893.344	46.893.344	-
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	46.893.344	46.893.344	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
01.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	246.183.908	246.183.908	-
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	246.183.908	246.183.908	-
1.01.06.2.01.01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	91.205.308	91.205.308	-
1.01.06.2.01.03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	76.540.100	76.540.100	-
1.01.06.2.01.07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	78.438.500	78.438.500	-
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	352.796.817.682	441.828.274.860	89.031.457.178
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	352.796.817.682	441.828.274.860	89.031.457.178
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	206.594.120.477	258.172.030.225	51.577.909.748
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	104.040.635.438	138.013.683.897	33.973.048.459
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	762.928.049	849.718.049	86.790.000
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	173.194.000	173.194.000	-
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	57.737.700	57.737.700	-
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	92.796.400	92.796.400	-
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	55.091.600	55.091.600	-
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	66.629.800	66.629.800	-
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	317.478.549	404.268.549	86.790.000
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.347.260.113	133.737.018.572	33.389.758.459
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	99.930.917.775	133.320.676.234	33.389.758.459
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.269.050	10.269.050	-
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	266.074.440	266.074.440	-
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	139.998.848	139.998.848	-
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	982.208.000	982.208.000	-
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	982.208.000	982.208.000	-
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	884.636.000	1.381.136.000	496.500.000
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	239.400.800	239.400.800	-
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.886.100	38.886.100	-
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	341.584.800	838.084.800	496.500.000
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	128.794.300	128.794.300	-
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	57.000.000	57.000.000	-
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.970.000	78.970.000	-
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.100.000	532.100.000	-
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.600.000	96.600.000	-
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	435.500.000	435.500.000	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.503.276	531.503.276	-
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.905.000	133.905.000	-
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.288.500	80.288.500	-
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	317.309.776	317.309.776	-
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	97.295.967.639	115.136.228.628	17.840.260.989
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.438.574.984	19.819.808.350	3.381.233.366
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	0	834.802.844	834.802.844
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	0	139.446.400	139.446.400
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	0	2.292.397.200	2.292.397.200
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	71.999.817	71.999.817
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.099.998.628	3.280.955.400	1.180.956.772
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.207.128.839	4.310.759.829	2.103.630.990
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	107.627.370	107.627.370	-
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	5.312.834.947	5.312.833.230	1.717
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.816.595.000	2.574.596.060	3.241.998.940
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	256.469.100	256.469.100	-
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	637.921.100	637.921.100	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	79.991.712.905	94.221.638.605	14.229.925.700
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.859.498.350	2.048.890.650	189.392.300
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.073.558.800	3.024.537.900	49.020.900
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	582.607.100	418.636.800	163.970.300
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	723.889.600	832.283.000	108.393.400
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	252.294.900	608.987.900	356.693.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.285.933.050	1.229.506.750	56.426.300
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	782.121.779	366.016.600	416.105.179
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	185.147.800	228.531.500	43.383.700
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	215.350.000	216.550.000	1.200.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	245.091.600	321.261.050	76.169.450
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	925.179.400	957.406.150	32.226.750
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.029.441.600	1.155.007.500	125.565.900

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	4.703.914.350	5.647.522.650	943.608.300
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.876.541.990	3.542.665.540	- 333.876.450
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	443.322.800	404.963.500	- 38.359.300
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.626.455.800	639.932.300	- 986.523.500
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.338.348.550	1.338.348.550	-
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.038.725.387	339.476.006	- 2.699.249.381
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	41.450.000	41.450.000	-
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	363.333.500	363.333.500	-
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	939.694.400	939.694.400	-
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6.988.700.450	6.330.372.050	- 658.328.400
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	35.462.299.008	49.251.739.008	13.789.440.000
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	24.424.000	24.424.000	-
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	201.628.100	201.628.100	-
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	272.584.400	272.584.400	-
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	712.150.000	857.710.000	145.560.000
1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	154.757.000	154.757.000	-
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	6.798.570.200	6.623.700.000	- 174.870.200
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	775.033.691	775.033.691	-
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	743.368.000	743.368.000	-
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	225.899.100	225.899.100	-
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100.398.200	667.266.200	566.868.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	3.428.154.810	3.428.154.810
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	754.733.750	983.835.673	229.101.923
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	151.836.700	380.938.623	229.101.923
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	602.897.050	602.897.050	-
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110.946.000	110.946.000	-
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	110.946.000	110.946.000	-
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.335.906.800	3.197.961.600	- 137.945.200
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	3.172.156.800	3.034.211.600	- 137.945.200
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	61.635.000	61.635.000	-
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3.089.285.200	2.951.340.000	- 137.945.200
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	21.236.600	21.236.600	-
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	163.750.000	163.750.000	-
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	163.750.000	163.750.000	-
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	752.967.100	752.967.100	-
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	193.349.000	193.349.000	-
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	193.349.000	193.349.000	-
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	63.990.000	63.990.000	-
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	63.990.000	63.990.000	-
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	225.211.600	225.211.600	-
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	225.211.600	225.211.600	-
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	270.416.500	270.416.500	-
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	139.716.500	139.716.500	-
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	130.700.000	130.700.000	-
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.168.643.500	1.071.189.000	- 97.454.500
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	742.215.300	493.424.000	- 248.791.300

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	742.215.300	493.424.000	248.791.300
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	377.583.100	377.583.100	-
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	377.583.100	377.583.100	-
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.845.100	200.181.900	151.336.800
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	48.845.100	200.181.900	151.336.800
1.02.0.00.0.00.01.0001	RSUD Lembang	34.016.090.721	35.763.858.664	1.747.767.943
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.000.000.000	28.747.767.943	1.747.767.943
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	27.000.000.000	28.747.767.943	1.747.767.943
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	27.000.000.000	28.747.767.943	1.747.767.943
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.016.090.721	7.016.090.721	-
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.739.092.183	3.739.092.183	-
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	3.739.092.183	3.739.092.183	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.276.998.538	3.276.998.538	-
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.276.998.538	3.276.998.538	-
1.02.0.00.0.00.01.0002	RSUD Cililin	34.199.578.588	42.406.719.613	8.207.141.025
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.000.000.000	35.207.141.025	8.207.141.025
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	27.000.000.000	35.207.141.025	8.207.141.025
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	27.000.000.000	35.207.141.025	8.207.141.025
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.199.578.588	7.199.578.588	-
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.199.080.485	1.199.080.485	-
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	1.199.080.485	1.199.080.485	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.000.498.103	6.000.498.103	-
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	6.000.498.103	6.000.498.103	-
1.02.0.00.0.00.01.0003	RSUD Cikalongwetan	18.224.250.000	31.222.758.810	12.998.508.810
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.500.000.000	25.498.508.810	12.998.508.810
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	12.500.000.000	25.498.508.810	12.998.508.810
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12.500.000.000	25.498.508.810	12.998.508.810
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.724.250.000	5.724.250.000	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.724.250.000	5.724.250.000	-
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5.724.250.000	5.724.250.000	-
1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas DTP Cililin	2.369.277.960	2.711.236.015	341.958.055
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.369.277.960	2.711.236.015	341.958.055
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.369.277.960	2.711.236.015	341.958.055
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.369.277.960	2.711.236.015	341.958.055
1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas DTP Gununghalu	3.333.184.326	4.891.152.363	1.557.968.037
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.333.184.326	4.891.152.363	1.557.968.037
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.333.184.326	4.891.152.363	1.557.968.037
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.333.184.326	4.891.152.363	1.557.968.037
1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas DTP Rajamandala	1.721.468.595	2.102.592.626	381.124.031
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.721.468.595	2.102.592.626	381.124.031
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.721.468.595	2.102.592.626	381.124.031
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.721.468.595	2.102.592.626	381.124.031
1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas DTP Cikalongwetan	3.775.447.935	5.050.276.493	1.274.828.558
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.775.447.935	5.050.276.493	1.274.828.558
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.775.447.935	5.050.276.493	1.274.828.558
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.775.447.935	5.050.276.493	1.274.828.558
1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas DTP Jayagiri	1.654.937.615	1.960.481.086	305.543.471
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.654.937.615	1.960.481.086	305.543.471
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.654.937.615	1.960.481.086	305.543.471

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.654.937.615	1.960.481.086	305.543.471
1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas DTP Saguling	1.878.846.795	1.917.710.844	38.864.049
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.878.846.795	1.917.710.844	38.864.049
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.878.846.795	1.917.710.844	38.864.049
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.878.846.795	1.917.710.844	38.864.049
1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Parongpong	986.254.528	1.195.728.527	209.473.999
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	986.254.528	1.195.728.527	209.473.999
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	986.254.528	1.195.728.527	209.473.999
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	986.254.528	1.195.728.527	209.473.999
1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Ciwaruga	965.509.722	1.061.491.866	95.982.144
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	965.509.722	1.061.491.866	95.982.144
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	965.509.722	1.061.491.866	95.982.144
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	965.509.722	1.061.491.866	95.982.144
1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Cihampelas	3.299.792.856	3.852.500.857	552.708.001
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.299.792.856	3.852.500.857	552.708.001
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.299.792.856	3.852.500.857	552.708.001
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.299.792.856	3.852.500.857	552.708.001
1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Mukapayung	1.932.437.420	2.200.715.747	268.278.327
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.932.437.420	2.200.715.747	268.278.327
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.932.437.420	2.200.715.747	268.278.327
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.932.437.420	2.200.715.747	268.278.327
1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Sindangkerta	1.425.298.147	1.459.759.089	34.460.942
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.425.298.147	1.459.759.089	34.460.942
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.425.298.147	1.459.759.089	34.460.942
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.425.298.147	1.459.759.089	34.460.942
1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Cicangkanggirang	1.373.552.699	1.541.272.186	167.719.487
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.373.552.699	1.541.272.186	167.719.487
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.373.552.699	1.541.272.186	167.719.487
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.373.552.699	1.541.272.186	167.719.487
1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Cipatat	1.699.244.305	2.593.989.717	894.745.412
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.699.244.305	2.593.989.717	894.745.412
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.699.244.305	2.593.989.717	894.745.412
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.699.244.305	2.593.989.717	894.745.412
1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Sumurbandung	952.364.981	1.161.550.026	209.185.045
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	952.364.981	1.161.550.026	209.185.045
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	952.364.981	1.161.550.026	209.185.045
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	952.364.981	1.161.550.026	209.185.045
1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Rongga	2.273.305.110	2.618.781.904	345.476.794
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.273.305.110	2.618.781.904	345.476.794
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.273.305.110	2.618.781.904	345.476.794
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.273.305.110	2.618.781.904	345.476.794
1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Jayamekar	1.417.763.969	1.504.814.779	87.050.810
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.417.763.969	1.504.814.779	87.050.810
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.417.763.969	1.504.814.779	87.050.810
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.417.763.969	1.504.814.779	87.050.810
1.02.0.00.0.00.01.0021	Puskesmas Cipeundeuy	2.808.839.306	3.547.552.534	738.713.228
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.808.839.306	3.547.552.534	738.713.228
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.808.839.306	3.547.552.534	738.713.228
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.808.839.306	3.547.552.534	738.713.228
1.02.0.00.0.00.01.0022	Puskesmas Citalem	1.923.973.304	2.405.221.028	481.247.724

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.923.973.304	2.405.221.028	481.247.724
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.923.973.304	2.405.221.028	481.247.724
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.923.973.304	2.405.221.028	481.247.724
1.02.0.00.0.00.01.0023	Puskesmas Cipongkor	2.498.233.268	4.182.919.989	1.684.686.721
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.498.233.268	4.182.919.989	1.684.686.721
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.498.233.268	4.182.919.989	1.684.686.721
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	2.498.233.268	4.182.919.989	1.684.686.721
1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Cimareme	2.463.426.568	2.983.026.973	519.600.405
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.463.426.568	2.983.026.973	519.600.405
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.463.426.568	2.983.026.973	519.600.405
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.463.426.568	2.983.026.973	519.600.405
1.02.0.00.0.00.01.0025	Puskesmas Ngamprah	1.750.867.665	2.147.489.643	396.621.978
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.750.867.665	2.147.489.643	396.621.978
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.750.867.665	2.147.489.643	396.621.978
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.750.867.665	2.147.489.643	396.621.978
1.02.0.00.0.00.01.0026	Puskesmas Batujajar	3.245.827.400	4.243.785.010	997.957.610
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.245.827.400	4.243.785.010	997.957.610
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.245.827.400	4.243.785.010	997.957.610
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.245.827.400	4.243.785.010	997.957.610
1.02.0.00.0.00.01.0027	Puskesmas Cibodas	914.179.386	1.128.126.692	213.947.306
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	914.179.386	1.128.126.692	213.947.306
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	914.179.386	1.128.126.692	213.947.306
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	914.179.386	1.128.126.692	213.947.306
1.02.0.00.0.00.01.0028	Puskesmas Cikole	933.630.460	1.072.189.923	138.559.463
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	933.630.460	1.072.189.923	138.559.463
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	933.630.460	1.072.189.923	138.559.463
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	933.630.460	1.072.189.923	138.559.463
1.02.0.00.0.00.01.0029	Puskesmas Lembang	1.965.245.969	2.183.345.723	218.099.754
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.965.245.969	2.183.345.723	218.099.754
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.965.245.969	2.183.345.723	218.099.754
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.965.245.969	2.183.345.723	218.099.754
1.02.0.00.0.00.01.0030	Puskesmas Pasirlangu	839.597.969	1.006.724.049	167.126.080
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	839.597.969	1.006.724.049	167.126.080
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	839.597.969	1.006.724.049	167.126.080
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	839.597.969	1.006.724.049	167.126.080
1.02.0.00.0.00.01.0031	Puskesmas Rende	1.210.777.840	2.003.965.042	793.187.202
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.210.777.840	2.003.965.042	793.187.202
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.210.777.840	2.003.965.042	793.187.202
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.210.777.840	2.003.965.042	793.187.202
1.02.0.00.0.00.01.0032	Puskesmas Cirata	845.925.403	999.945.251	154.019.848
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	845.925.403	999.945.251	154.019.848
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	845.925.403	999.945.251	154.019.848
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	845.925.403	999.945.251	154.019.848
1.02.0.00.0.00.01.0033	Puskesmas Cisarua	1.359.387.275	1.593.881.602	234.494.327
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.359.387.275	1.593.881.602	234.494.327
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.359.387.275	1.593.881.602	234.494.327
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.359.387.275	1.593.881.602	234.494.327
1.02.0.00.0.00.01.0034	Puskesmas Pataruman	2.226.639.579	2.905.207.479	678.567.900
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.226.639.579	2.905.207.479	678.567.900

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.226.639.579	2.905.207.479	678.567.900
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.226.639.579	2.905.207.479	678.567.900
1.02.0.00.0.00.01.0035	Puskesmas Tagog Apu	922.819.028	1.076.387.094	153.568.066
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	922.819.028	1.076.387.094	153.568.066
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	922.819.028	1.076.387.094	153.568.066
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	922.819.028	1.076.387.094	153.568.066
1.02.0.00.0.00.01.0036	Puskesmas Padalarang	2.369.519.148	2.533.884.026	164.364.878
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.369.519.148	2.533.884.026	164.364.878
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.369.519.148	2.533.884.026	164.364.878
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.369.519.148	2.533.884.026	164.364.878
1.02.0.00.0.00.01.0037	UPT Lab Kesda	425.201.365	425.201.365	-
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	425.201.365	425.201.365	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	425.201.365	425.201.365	-
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	425.201.365	425.201.365	-
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	317.283.954.259	390.237.798.017	72.953.843.758
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	317.283.954.259	390.237.798.017	72.953.843.758
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	317.283.954.259	390.237.798.017	72.953.843.758
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.169.302.422	22.268.624.034	3.099.321.612
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	595.168.083	595.002.583	- 165.500
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	282.388.225	282.222.725	- 165.500
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	97.037.258	97.037.258	-
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	22.140.800	22.140.800	-
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	71.365.900	71.365.900	-
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20.200.000	20.200.000	-
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	102.035.900	102.035.900	-
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.849.845.189	17.524.234.315	2.674.389.126
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.514.507.489	17.188.896.615	2.674.389.126
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	113.445.900	113.445.900	-
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	87.870.900	87.870.900	-
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	98.970.900	98.970.900	-
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	35.050.000	35.050.000	-
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	178.183.845	178.183.845	-
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	178.183.845	178.183.845	-
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	327.049.850	352.112.450	25.062.600
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	25.062.600	25.062.600
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	204.599.850	204.599.850	-
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	122.450.000	122.450.000	-
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.351.121.580	1.709.877.580	358.756.000
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.962.780	8.962.780	-
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	403.729.600	378.155.600	- 25.574.000
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.765.200	45.765.200	-
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	290.126.500	731.126.500	441.000.000
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.422.500	30.422.500	-
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.739.000	53.739.000	-
1.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	22.230.000	22.230.000	-
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	496.146.000	439.476.000	- 56.670.000
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.814.500	4.814.500	-
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.814.500	4.814.500	-
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.730.711	289.730.711	-
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	148.397.658	148.397.658	-
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.815.616	39.815.616	-
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.517.437	101.517.437	-
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.573.388.664	1.614.668.050	41.279.386
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	467.350.000	467.350.000	-
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	869.120.000	869.120.000	-
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.521.000	18.521.000	-
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	218.397.664	259.677.050	41.279.386
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.818.021.889	8.218.021.889	400.000.000
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.162.189.968	1.462.189.968	300.000.000

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	227.188.158	227.188.158	-
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	112.412.800	112.412.800	-
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	629.887.673	929.887.673	300.000.000
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	98.580.358	98.580.358	-
1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	94.120.979	94.120.979	-
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.655.831.921	6.755.831.921	100.000.000
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	430.423.258	430.423.258	-
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3.491.637.372	3.591.637.372	100.000.000
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	835.939.925	835.939.925	-
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.897.831.366	1.897.831.366	-
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.264.387.033	11.264.387.033	-
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	11.264.387.033	11.264.387.033	-
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.035.494.875	3.035.494.875	-
1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8.228.892.158	8.228.892.158	-
01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	77.300.000	107.299.750	29.999.750
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	77.300.000	107.299.750	29.999.750
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	77.300.000	107.299.750	29.999.750
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.914.575.378	7.914.575.378	-
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.914.575.378	7.914.575.378	-
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	7.914.575.378	7.914.575.378	-
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.052.831.795	5.052.831.795	-
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.052.831.795	5.052.831.795	-
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	4.948.331.795	4.948.331.795	-
1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	104.500.000	104.500.000	-
01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	24.270.851.000	24.570.851.000	300.000.000
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	24.270.851.000	24.570.851.000	300.000.000
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	24.270.851.000	24.570.851.000	300.000.000
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	43.297.689.642	49.152.062.119	5.854.372.477
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	43.297.689.642	49.152.062.119	5.854.372.477
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1.227.776.487	1.227.776.487	-
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	36.390.048.220	42.582.064.187	6.192.015.967
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	218.389.479	218.389.479	-
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.708.786.967	1.302.482.087	-406.304.880
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3.752.688.489	3.821.349.879	68.661.390
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	193.629.415.238	256.901.335.207	63.271.919.969
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	193.629.415.238	256.901.335.207	63.271.919.969
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.424.797.800	1.424.797.800	-
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	282.110.400	282.110.400	-
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	903.616.074	903.616.074	-
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	166.783.857.506	229.713.957.475	62.930.099.969
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	14.952.246.227	15.003.156.227	50.910.000
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.311.959.394	5.051.959.394	-260.000.000
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	2.840.632.737	3.391.542.737	550.910.000
1.03.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	1.130.195.100	1.130.195.100	-
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	936.657.058	936.657.058	-
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	558.740.358	558.740.358	-
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	351.017.229	351.017.229	-
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	207.723.129	207.723.129	-
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	329.816.700	329.816.700	-
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	329.816.700	329.816.700	-
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	48.100.000	48.100.000	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	48.100.000	48.100.000	-
01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.852.922.804	3.851.152.754	1.770.050
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.122.779.925	1.121.009.875	1.770.050
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	210.172.050	210.172.050	-
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	505.267.625	522.919.700	17.652.075
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	275.331.850	255.909.725	19.422.125
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	132.008.400	132.008.400	-
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.112.482.000	1.112.482.000	-
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1.112.482.000	1.112.482.000	-
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	661.704.425	661.704.425	-
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	392.429.775	392.429.775	-
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	269.274.650	269.274.650	-
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	955.956.454	955.956.454	-
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	391.158.154	391.158.154	-
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	239.960.200	239.960.200	-
1.03.12.2.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	324.838.100	324.838.100	-
01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	25.464.654.486	27.797.416.425	2.332.761.939
1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	25.464.654.486	27.797.416.425	2.332.761.939
1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	25.464.654.486	27.797.416.425	2.332.761.939
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.471.564.733	9.724.363.472	2.252.798.739
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	176.189.837	185.596.137	9.406.300
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	65.591.729	65.591.729	-
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.013.000	5.138.000	2.125.000
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.791.800	2.791.800	-
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.522.300	5.553.600	3.031.300
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	102.271.008	106.521.008	4.250.000
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.689.856.672	7.910.118.611	2.220.261.939
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.495.056.393	7.715.318.332	2.220.261.939
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.425.900	65.425.900	-
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.779.179	30.779.179	-
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	96.586.000	96.586.000	-
1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.009.200	2.009.200	-
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	680.874.400	619.074.400	61.800.000
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	263.820.000	263.820.000	-
1.04.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	417.054.400	355.254.400	61.800.000
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	418.853.800	503.784.300	84.930.500
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.003.400	5.003.400	-
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	244.967.800	217.398.300	27.569.500
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.065.100	5.065.100	-
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153.816.400	266.316.400	112.500.000
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.001.100	10.001.100	-
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.346.324	382.346.324	-
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	148.401.437	148.401.437	-
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.944.887	233.944.887	-
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.443.700	123.443.700	-
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.350.000	35.350.000	-
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.500.000	79.500.000	-
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.593.700	8.593.700	-
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	819.752.660	819.752.660	-
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	135.996.650	135.996.650	-
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	34.577.950	34.577.950	-
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	56.257.950	56.257.950	-
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	45.160.750	45.160.750	-
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	35.872.200	35.872.200	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
1.04.02.2.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	35.872.200	35.872.200	-
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	224.514.479	224.514.479	-
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	193.564.300	193.564.300	-
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	30.950.179	30.950.179	-
1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	97.734.350	97.734.350	-
1.04.02.2.04.01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	97.734.350	97.734.350	-
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	317.340.981	317.340.981	-
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	217.900.915	217.900.915	-
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	99.440.066	99.440.066	-
1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	8.294.000	8.294.000	-
1.04.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	8.294.000	8.294.000	-
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.644.874.133	5.724.722.433	79.848.300
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	379.099.504	458.947.804	79.848.300
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	175.747.954	255.596.254	79.848.300
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	203.351.550	203.351.550	-
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	209.776.800	209.776.800	-
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	209.776.800	209.776.800	-
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	5.055.997.829	5.055.997.829	-
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	4.942.596.300	4.942.596.300	-
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	113.401.529	113.401.529	-
01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	10.328.562.909	10.585.307.589	256.744.680
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	10.328.562.909	10.585.307.589	256.744.680
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	358.406.366	358.406.366	-
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	9.970.156.543	10.226.901.223	256.744.680
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.199.900.051	943.270.271	- 256.629.780
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.199.900.051	943.270.271	- 256.629.780
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	202.504.800	202.504.800	-
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	933.682.301	677.052.521	- 256.629.780
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	63.712.950	63.712.950	-
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	38.294.033.575	41.953.790.528	3.659.756.953
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	11.759.260.790	12.858.481.912	1.099.221.122
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	11.759.260.790	12.858.481.912	1.099.221.122
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.310.113.190	7.209.589.462	899.476.272
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.894.200	191.775.000	- 8.119.200
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.850.600	35.731.400	- 8.119.200
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	33.110.500	33.110.500	-
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	32.817.700	32.817.700	-
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	33.110.500	33.110.500	-
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	33.622.500	33.622.500	-
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.382.400	23.382.400	-
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.311.089.030	5.047.260.502	736.171.472
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.300.766.130	5.036.937.602	736.171.472
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.480.500	5.480.500	-
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.842.400	4.842.400	-
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.117.078.600	1.104.442.600	- 12.636.000
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	557.662.000	557.662.000	-
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	559.416.600	546.780.600	- 12.636.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	405.505.100	589.565.100	184.060.000
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.594.400	2.594.400	-
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.482.800	35.042.800	11.560.000

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.584.300	3.584.300	-
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.058.600	214.558.600	172.500.000
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.091.000	6.091.000	-
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.320.000	4.320.000	-
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.800.000	4.800.000	-
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	318.574.000	318.574.000	-
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.148.200	130.148.200	-
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	-
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.000.000	31.000.000	-
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.648.200	97.648.200	-
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.398.060	146.398.060	-
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.400.000	141.400.000	-
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.998.060	4.998.060	-
01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.449.147.600	5.648.892.450	199.744.850
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.269.748.800	5.278.944.000	9.195.200
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.924.150.000	3.894.650.000	-29.500.000
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	84.520.400	84.520.400	-
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	419.097.600	419.097.600	-
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	369.021.200	376.221.200	7.200.000
1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	472.959.600	504.454.800	31.495.200
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	160.508.800	351.058.450	190.549.650
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	69.048.800	163.195.050	94.146.250
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	91.460.000	187.863.400	96.403.400
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	18.890.000	18.890.000	-
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	18.890.000	18.890.000	-
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.348.010.435	10.634.805.996	1.286.795.561
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.348.010.435	10.634.805.996	1.286.795.561
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.598.412.158	6.885.207.719	1.286.795.561
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.700.000	11.700.000	-
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.950.000	1.950.000	-
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.950.000	1.950.000	-
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.950.000	1.950.000	-
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.950.000	1.950.000	-
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.950.000	1.950.000	-
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.950.000	1.950.000	-
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.942.755.492	5.184.551.053	1.241.795.561
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.849.599.592	5.091.395.153	1.241.795.561
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.000.000	8.000.000	-
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85.155.900	85.155.900	-
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.800.000	33.800.000	-
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.800.000	33.800.000	-
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	792.051.200	837.051.200	45.000.000
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.770.800	113.770.800	45.000.000
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.710.400	38.710.400	-
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	130.000.000	130.000.000	-
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	554.570.000	554.570.000	-
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	168.928.300	168.928.300	-
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.313.000	15.313.000	-
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.615.300	153.615.300	-
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.227.166	228.227.166	-
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.521.000	21.521.000	-
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.706.166	206.706.166	-
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.950.000	420.950.000	-
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.440.000	105.440.000	-
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	315.510.000	315.510.000	-
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.749.598.277	3.749.598.277	-
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	894.885.450	894.885.450	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	199.751.250	199.751.250	-
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	695.134.200	695.134.200	-
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.969.458.727	1.969.458.727	-
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	343.303.437	343.303.437	-
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	50.300.300	50.300.300	-
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	130.500.500	130.500.500	-
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.049.919.566	1.049.919.566	-
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	362.152.924	362.152.924	-
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	33.282.000	33.282.000	-
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	885.254.100	885.254.100	-
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	27.803.200	27.803.200	-
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	535.749.500	535.749.500	-
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	190.000.000	190.000.000	-
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	131.701.400	131.701.400	-
1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.186.762.350	18.460.502.620	1.273.740.270
1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.186.762.350	18.460.502.620	1.273.740.270
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.749.383.502	6.023.123.772	1.273.740.270
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000	24.000.000	-
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	-
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000	4.000.000	-
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000	4.000.000	-
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000	4.000.000	-
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.000.000	4.000.000	-
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	-
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.928.993.542	5.004.733.812	1.075.740.270
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.832.797.292	4.908.537.562	1.075.740.270
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.774.400	5.774.400	-
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90.421.850	90.421.850	-
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.079.400	7.079.400	-
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.079.400	7.079.400	-
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.534.800	394.534.800	198.000.000
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84.656.100	84.656.100	-
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.194.300	30.194.300	-
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.515.500	3.515.500	-
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.320.300	249.320.300	198.000.000
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.978.600	9.978.600	-
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.550.000	4.550.000	-
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.320.000	12.320.000	-
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.803.600	19.803.600	-
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	19.803.600	19.803.600	-
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.466.850	138.466.850	-
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	138.466.850	138.466.850	-
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.505.310	434.505.310	-
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	376.020.000	376.020.000	-
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.485.310	58.485.310	-
01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	12.437.378.848	12.437.378.848	-
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.265.562.948	12.265.562.948	-
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.265.562.348	4.265.562.348	-
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	8.000.000.600	8.000.000.600	-
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	71.815.900	71.815.900	-
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	71.815.900	71.815.900	-
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100.000.000	100.000.000	-
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100.000.000	100.000.000	-
01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13.751.141.944	15.148.478.801	1.397.336.857
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	13.751.141.944	15.148.478.801	1.397.336.857
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	13.751.141.944	15.148.478.801	1.397.336.857
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.276.463.038	7.673.799.895	1.397.336.857
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158.786.600	158.786.600	-
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.774.000	27.774.000	-
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	66.978.200	66.978.200	-
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.279.000	3.279.000	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	55.290.400	55.290.400	-
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.465.000	5.465.000	-
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.070.692.685	6.405.029.542	1.334.336.857
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.954.252.285	6.288.589.142	1.334.336.857
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.728.400	39.728.400	-
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	76.712.000	76.712.000	-
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	686.420.453	686.420.453	-
1.06.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	686.420.453	686.420.453	-
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.739.900	313.739.900	63.000.000
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.006.400	6.006.400	-
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.240.700	134.240.700	-
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.749.100	4.749.100	-
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.844.200	97.844.200	63.000.000
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.112.500	7.112.500	-
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.965.000	14.965.000	-
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.400.000	23.400.000	-
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.422.000	25.422.000	-
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.032.400	26.032.400	-
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	26.032.400	26.032.400	-
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.291.000	65.291.000	-
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	7.500.000	-
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	6.000.000	-
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.791.000	51.791.000	-
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.500.000	18.500.000	-
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.500.000	18.500.000	-
01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.511.852.200	1.511.852.200	-
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.511.852.200	1.511.852.200	-
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	292.311.800	292.311.800	-
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.219.540.400	1.219.540.400	-
01.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	7.560.000	7.560.000	-
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	7.560.000	7.560.000	-
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	7.560.000	7.560.000	-
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.785.368.532	1.785.368.532	-
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.510.263.832	1.510.263.832	-
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	266.657.200	266.657.200	-
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	136.725.000	136.725.000	-
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	338.068.700	338.068.700	-
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	306.213.516	306.213.516	-
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	99.321.800	99.321.800	-
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	80.254.116	80.254.116	-
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	29.000.000	29.000.000	-
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20.000.000	20.000.000	-
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	23.980.500	23.980.500	-
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	185.549.000	185.549.000	-
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	24.494.000	24.494.000	-
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	275.104.700	275.104.700	-
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	15.480.000	15.480.000	-
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	259.624.700	259.624.700	-
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.628.813.179	2.628.813.179	-
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.628.813.179	2.628.813.179	-
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.724.743.979	1.724.743.979	-
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	752.100.000	752.100.000	-
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	151.969.200	151.969.200	-
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.206.960.000	1.206.960.000	-
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	638.640.000	638.640.000	-
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	185.102.500	185.102.500	-
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	182.710.000	182.710.000	-
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	175.880.000	175.880.000	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	94.947.500	94.947.500	-
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	568.320.000	568.320.000	-
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	568.320.000	568.320.000	-
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	334.124.995	334.124.995	-
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	334.124.995	334.124.995	-
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	334.124.995	334.124.995	-
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-
02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	14.164.733.599	15.382.822.233	1.218.088.634
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	14.164.733.599	15.382.822.233	1.218.088.634
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	14.164.733.599	15.382.822.233	1.218.088.634
02.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.144.952.134	7.076.491.118	931.538.984
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	439.957.958	439.957.958	-
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	223.102.800	223.102.800	-
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	-
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	-
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	-
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	-
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	189.355.158	189.355.158	-
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	-
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.991.573.055	5.867.612.039	876.038.984
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.847.410.255	5.723.449.239	876.038.984
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	130.162.800	130.162.800	-
2.07.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.500.000	6.500.000	-
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.500.000	7.500.000	-
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.499.800	32.499.800	-
2.07.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000	15.000.000	-
2.07.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.499.900	7.499.900	-
2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.999.900	9.999.900	-
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.484.800	149.484.800	-
2.07.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	41.995.200	41.995.200	-
2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000	30.000.000	-
2.07.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.000.000	25.000.000	-
2.07.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	52.489.600	52.489.600	-
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	269.550.510	325.050.510	55.500.000
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.019.210	14.019.210	-
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.269.000	12.269.000	-
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000	35.000.000	-
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.762.300	136.262.300	55.500.000
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.500.000	65.500.000	-
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.000.000	27.000.000	-
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.000.000	35.000.000	-
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.855.400	26.855.400	-
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	-
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.855.400	20.855.400	-
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.030.611	235.030.611	-
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.992.000	60.992.000	-
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174.038.611	174.038.611	-
02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	11.518.400	11.518.400	-
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	11.518.400	11.518.400	-
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	11.518.400	11.518.400	-
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	5.187.030.670	5.473.580.320	286.549.650
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	4.996.956.870	5.283.506.520	286.549.650
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.289.645.758	2.289.645.758	-
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	2.443.604.688	2.730.154.338	286.549.650
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	263.706.424	263.706.424	-
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	172.473.800	172.473.800	-
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	172.473.800	172.473.800	-
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.600.000	17.600.000	-
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	17.600.000	17.600.000	-
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	286.828.937	286.828.937	-
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	46.548.400	46.548.400	-
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	18.417.000	18.417.000	-
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	10.801.400	10.801.400	-
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	17.330.000	17.330.000	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	64.057.000	64.057.000	-
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	17.790.000	17.790.000	-
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	46.267.000	46.267.000	-
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	162.418.537	162.418.537	-
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	162.418.537	162.418.537	-
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.805.000	13.805.000	-
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.805.000	13.805.000	-
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.534.403.458	2.534.403.458	-
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	786.417.700	786.417.700	-
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	300.000.000	300.000.000	-
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	150.000.000	150.000.000	-
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	336.417.700	336.417.700	-
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.747.985.758	1.747.985.758	-
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	925.500.000	925.500.000	-
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	400.000.000	-
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	106.791.958	106.791.958	-
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	215.693.800	215.693.800	-
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100.000.000	100.000.000	-
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.747.611.079	4.747.611.079	-
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	4.747.611.079	4.747.611.079	-
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	4.747.611.079	4.747.611.079	-
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.661.049.950	2.661.049.950	-
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.661.049.950	2.661.049.950	-
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.661.049.950	2.661.049.950	-
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	277.662.679	277.662.679	-
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	176.662.679	176.662.679	-
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	176.662.679	176.662.679	-
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	78.000.000	78.000.000	-
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	78.000.000	78.000.000	-
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.000.000	23.000.000	-
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	23.000.000	23.000.000	-
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	797.978.200	797.978.200	-
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	229.970.750	229.970.750	-
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	229.970.750	229.970.750	-
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	568.007.450	568.007.450	-
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	568.007.450	568.007.450	-
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	85.163.750	85.163.750	-
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85.163.750	85.163.750	-
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	85.163.750	85.163.750	-
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	419.119.150	419.119.150	-
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	419.119.150	419.119.150	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	419.119.150	419.119.150	-
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	506.637.350	506.637.350	-
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	268.787.350	268.787.350	-
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	189.837.350	189.837.350	-
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	78.950.000	78.950.000	-
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184.044.000	184.044.000	-
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	184.044.000	184.044.000	-
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.806.000	53.806.000	-
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.806.000	53.806.000	-
02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	18.531.692.749	22.326.312.689	3.794.619.940
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.531.692.749	22.326.312.689	3.794.619.940
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.531.692.749	22.326.312.689	3.794.619.940
02.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.461.550.813	19.256.170.753	3.794.619.940
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	531.822.136	531.822.136	-
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	341.432.792	341.432.792	-
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	190.389.344	190.389.344	-
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.826.343.461	17.503.963.401	3.677.619.940
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.630.783.621	17.308.403.561	3.677.619.940
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	117.198.896	117.198.896	-
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	78.360.944	78.360.944	-
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	332.380.000	332.380.000	-
2.09.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	332.380.000	332.380.000	-
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.542.500	369.542.500	117.000.000
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.022.500	200.022.500	117.000.000
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.040.000	59.040.000	-
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.480.000	110.480.000	-
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.508.000	90.508.000	-
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	90.508.000	90.508.000	-
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.004.716	348.004.716	-
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	77.195.916	77.195.916	-
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	222.808.800	222.808.800	-
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.000.000	48.000.000	-
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.950.000	79.950.000	-
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.350.000	35.350.000	-
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.600.000	44.600.000	-
02.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.358.089.648	1.358.089.648	-
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.358.089.648	1.358.089.648	-
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1.358.089.648	1.358.089.648	-
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.507.305.240	1.507.305.240	-
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	251.668.800	251.668.800	-
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	161.718.400	161.718.400	-
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	89.950.400	89.950.400	-
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	208.455.296	208.455.296	-
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	208.455.296	208.455.296	-
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.047.181.144	1.047.181.144	-
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.047.181.144	1.047.181.144	-
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	124.316.648	124.316.648	-
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	124.316.648	124.316.648	-
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	124.316.648	124.316.648	-
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	80.430.400	80.430.400	-
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	80.430.400	80.430.400	-
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	80.430.400	80.430.400	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
02.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.881.323.724	1.881.323.724	-
1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.881.323.724	1.881.323.724	-
1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.881.323.724	1.881.323.724	-
02.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	75.993.129	75.993.129	-
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.993.129	75.993.129	-
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.993.129	75.993.129	-
02.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	282.607.179	282.607.179	-
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	282.607.179	282.607.179	-
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	201.239.050	201.239.050	-
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	41.207.950	41.207.950	-
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	40.160.179	40.160.179	-
02.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	237.273.508	237.273.508	-
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	37.255.179	37.255.179	-
2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.255.179	37.255.179	-
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	200.018.329	200.018.329	-
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	52.380.179	52.380.179	-
2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	147.638.150	147.638.150	-
02.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.285.449.908	1.285.449.908	-
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1.285.449.908	1.285.449.908	-
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1.233.268.329	1.233.268.329	-
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	52.181.579	52.181.579	-
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	42.409.320.780	44.807.598.637	2.398.277.857
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	42.409.320.780	44.807.598.637	2.398.277.857
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	42.409.320.780	44.807.598.637	2.398.277.857
02.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.321.551.345	10.719.829.252	2.398.277.907
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.659.958	140.659.958	-
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.122.000	43.122.000	-
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.200.000	8.200.000	-
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.367.600	8.367.600	-
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.030.000	9.030.000	-
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.473.000	5.473.000	-
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.467.358	66.467.358	-
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.197.826.736	9.083.104.643	1.885.277.907
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.115.238.536	9.000.516.443	1.885.277.907
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	64.594.400	64.594.400	-
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.723.700	8.723.700	-
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.270.100	9.270.100	-
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	166.520.000	166.520.000	-
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	166.520.000	166.520.000	-
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	591.738.437	1.104.738.437	513.000.000
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	-
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.751.300	79.751.300	-
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.285.000	15.285.000	-
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	113.983.137	626.983.137	513.000.000
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	122.677.000	122.677.000	-
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	20.000.000	-
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.950.000	14.950.000	-
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.092.000	215.092.000	-
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.034.714	172.034.714	-
2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	172.034.714	172.034.714	-
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.000.000	18.000.000	-
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	18.000.000	-
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.771.500	34.771.500	-
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.600.000	9.600.000	-
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.171.500	25.171.500	-
02.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	530.018.950	530.018.950	-
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	500.853.150	500.853.150	-
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	500.853.150	500.853.150	-
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	29.165.800	29.165.800	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	29.165.800	29.165.800	-
02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	680.364.358	680.364.358	-
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	558.625.279	558.625.279	-
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	398.543.279	398.543.279	-
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	160.082.000	160.082.000	-
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	121.739.079	121.739.079	-
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	121.739.079	121.739.079	-
02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.495.682.071	1.495.682.071	-
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.495.682.071	1.495.682.071	-
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	151.885.600	151.885.600	-
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.343.796.471	1.343.796.471	-
02.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	230.547.279	230.547.279	-
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	230.547.279	230.547.279	-
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	230.547.279	230.547.279	-
02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	386.876.296	386.876.296	-
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	386.876.296	386.876.296	-
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	161.544.338	161.544.338	-
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	225.331.958	225.331.958	-
02.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	186.724.500	186.724.500	-
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	186.724.500	186.724.500	-
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	186.724.500	186.724.500	-
02.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	235.569.079	235.569.079	-
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	235.569.079	235.569.079	-
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	235.569.079	235.569.079	-
02.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	30.341.986.902	30.341.986.852	- 50
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	30.341.986.902	30.341.986.852	- 50
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	258.821.079	258.821.029	- 50
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	18.094.807.555	18.094.807.555	-
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	216.771.100	216.771.100	-
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	11.771.587.168	11.771.587.168	-
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	13.843.316.762	16.022.109.247	2.178.792.485
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	13.843.316.762	16.022.109.247	2.178.792.485
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	13.843.316.762	16.022.109.247	2.178.792.485
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.311.637.427	13.480.750.568	2.169.113.141
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.962.000	62.534.000	- 3.428.000
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.149.000	9.349.000	- 7.800.000
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.382.000	8.382.000	-
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.361.000	7.361.000	-
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.749.000	4.749.000	-
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.532.000	5.532.000	-
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.789.000	27.161.000	4.372.000
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.854.175.327	7.404.593.468	1.550.418.141
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.541.441.274	6.997.204.864	1.455.763.590
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	283.963.653	378.618.204	94.654.551
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.324.000	10.324.000	-
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.446.400	18.446.400	-
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.525.417.600	4.931.133.600	405.716.000
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.922.800	13.922.800	-
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.216.291.300	4.314.748.300	98.457.000
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.304.400	155.894.400	86.590.000

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.413.100	8.212.100	- 8.201.000
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	22.500.000	22.500.000	-
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.986.000	415.856.000	228.870.000
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.592.500	866.479.500	244.887.000
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	319.580.000	319.580.000	-
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.079.200	120.365.800	- 49.713.400
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.933.300	426.533.700	294.600.400
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.490.000	216.010.000	- 28.480.000
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	244.490.000	216.010.000	- 28.480.000
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	403.262.637	426.262.916	23.000.279
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	361.452.437	426.262.916	64.810.479
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	173.748.979	207.216.972	33.467.993
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	187.703.458	219.045.944	31.342.486
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	334.606.658	379.775.544	45.168.886
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	152.163.858	156.445.144	4.281.286
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	152.163.858	156.445.144	4.281.286
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	182.442.800	223.330.400	40.887.600
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	29.580.000	29.580.000	-
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	152.862.800	193.750.400	40.887.600
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.778.419.040	1.727.624.719	- 50.794.321
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	159.589.529	203.339.529	43.750.000
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	159.589.529	203.339.529	43.750.000
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.362.787.074	1.333.684.074	- 29.103.000
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.362.787.074	1.333.684.074	- 29.103.000
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	208.954.437	190.601.116	- 18.353.321
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	32.494.000	7.680.000	- 24.814.000
2.12.04.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	21.444.000	4.240.000	- 17.204.000
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	155.016.437	178.681.116	23.664.679
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	15.391.000	7.695.500	- 7.695.500
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	15.391.000	7.695.500	- 7.695.500
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	15.391.000	7.695.500	- 7.695.500
02.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20.321.803.853	22.858.003.231	2.536.199.378
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.321.803.853	22.858.003.231	2.536.199.378
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.321.803.853	22.858.003.231	2.536.199.378
02.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.342.352.195	6.578.551.573	1.236.199.378
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.931.200	138.931.200	-
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000	14.000.000	-
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.000.000	25.000.000	-
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.931.200	25.931.200	-
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23.000.000	23.000.000	-
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	25.000.000	25.000.000	-
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.000.000	26.000.000	-
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.299.673.195	5.501.372.573	1.201.699.378
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.114.569.795	5.316.269.173	1.201.699.378
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	185.103.400	185.103.400	-
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175.293.600	175.293.600	-
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.450.000	16.450.000	-
2.13.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	158.843.600	158.843.600	-
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	554.051.000	588.551.000	34.500.000
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.314.500	199.314.500	-
2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.544.200	27.544.200	-
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.180.900	163.680.900	34.500.000
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.591.400	59.591.400	-
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.380.000	55.380.000	-
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.040.000	83.040.000	-
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.403.200	174.403.200	-
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.010.000	135.010.000	-
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.393.200	39.393.200	-
02.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	1.483.910.729	1.483.910.729	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	1.483.910.729	1.483.910.729	-
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	50.000.000	50.000.000	-
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	75.000.000	75.000.000	-
2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	1.000.000.000	1.000.000.000	-
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	358.910.729	358.910.729	-
02.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	741.403.379	741.403.379	-
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	741.403.379	741.403.379	-
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	266.879.900	266.879.900	-
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	286.767.700	286.767.700	-
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	187.755.779	187.755.779	-
02.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.083.544.750	5.083.544.750	-
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.083.544.750	5.083.544.750	-
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	482.091.400	482.091.400	-
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3.889.971.950	3.889.971.950	-
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	157.569.000	157.569.000	-
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	97.180.000	97.180.000	-
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	150.000.000	150.000.000	-
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	230.722.400	230.722.400	-
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	76.010.000	76.010.000	-
02.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	7.670.592.800	8.970.592.800	1.300.000.000
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.670.592.800	8.970.592.800	1.300.000.000
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	54.400.000	854.400.000	800.000.000
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6.482.201.900	6.482.201.900	-
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	294.553.550	294.553.550	-
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	296.081.950	296.081.950	-
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	81.455.400	581.455.400	500.000.000
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	461.900.000	461.900.000	-
02.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	33.602.422.206	34.865.675.446	1.263.253.240
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	33.602.422.206	34.865.675.446	1.263.253.240
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	33.602.422.206	34.865.675.446	1.263.253.240
02.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.911.942.053	13.175.195.293	1.263.253.240
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	363.552.800	363.552.800	-
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.643.300	79.643.300	-
2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	15.000.000	-
2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	15.000.000	-
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	15.000.000	-
2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.000.000	15.000.000	-
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83.217.900	83.217.900	-
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.691.600	140.691.600	-
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.225.024.395	11.376.916.635	1.151.892.240
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.987.488.587	11.174.246.227	1.186.757.640
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.513.900	75.513.900	-
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	115.886.108	115.886.108	-
2.14.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	46.135.800	11.270.400	34.865.400
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	78.705.300	78.705.300	-
2.14.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.491.950	40.491.950	-
2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	38.213.350	38.213.350	-
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	292.853.058	292.853.058	-
2.14.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	70.248.450	70.248.450	-
2.14.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	107.597.079	107.597.079	-
2.14.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	115.007.529	115.007.529	-
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.037.600	467.482.100	115.444.500
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.367.400	122.311.900	38.944.500
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	142.587.100	219.087.100	76.500.000
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	97.993.100	97.993.100	-
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.090.000	28.090.000	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	186.018.900	181.935.400	- 4.083.500
2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	186.018.900	181.935.400	- 4.083.500
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.000.000	203.000.000	-
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	-
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.000.000	198.000.000	-
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.750.000	210.750.000	-
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.000.000	4.000.000	-
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.750.000	176.750.000	-
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	30.000.000	-
02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.704.373.429	1.704.373.429	-
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	648.654.250	648.654.250	-
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	61.923.550	61.923.550	-
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	387.130.700	387.130.700	-
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	199.600.000	199.600.000	-
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.055.719.179	1.055.719.179	-
2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	50.999.750	50.999.750	-
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	388.996.350	388.996.350	-
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	149.982.000	149.982.000	-
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	45.450.000	45.450.000	-
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	76.800.000	76.800.000	-
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	343.491.079	343.491.079	-
02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	10.037.775.466	10.037.775.466	-
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.034.211.100	1.034.211.100	-
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	96.611.100	96.611.100	-
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	247.680.000	247.680.000	-
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	648.000.000	648.000.000	-
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	41.920.000	41.920.000	-
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.742.143.858	2.742.143.858	-
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1.542.574.000	1.542.574.000	-
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.199.569.858	1.199.569.858	-
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.689.975.829	3.689.975.829	-
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	38.360.000	38.360.000	-
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.709.625.800	1.709.625.800	-
2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	236.870.900	236.870.900	-
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.092.593.000	1.092.593.000	-
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.595.800	13.595.800	-
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	321.291.650	321.291.650	-
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	173.929.900	173.929.900	-
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	103.708.779	103.708.779	-
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.571.444.679	2.571.444.679	-
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	2.571.444.679	2.571.444.679	-
02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	9.948.331.258	9.948.331.258	-
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	9.948.331.258	9.948.331.258	-
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	231.000.000	231.000.000	-
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	714.879.000	714.879.000	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8.622.332.258	8.622.332.258	-
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	380.120.000	380.120.000	-
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	25.226.972.443	26.611.561.456	1.384.589.013
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	25.226.972.443	26.611.561.456	1.384.589.013
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	25.226.972.443	26.611.561.456	1.384.589.013
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.875.302.034	11.259.891.047	1.384.589.013
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	244.777.500	244.777.500	-
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.052.800	70.052.800	-
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.877.000	16.877.000	-
2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.242.950	15.242.950	-
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.923.700	16.923.700	-
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	16.694.150	16.694.150	-
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77.754.700	77.754.700	-
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.232.200	31.232.200	-
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.890.151.593	9.093.240.606	1.203.089.013
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.662.484.064	8.865.573.077	1.203.089.013
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	138.136.017	138.136.017	-
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	69.862.631	69.862.631	-
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19.668.881	19.668.881	-
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	297.170.000	297.170.000	-
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	297.170.000	297.170.000	-
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.341.936	456.841.936	181.500.000
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.896.320	4.896.320	-
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.022.500	221.522.500	181.500.000
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.482.200	88.482.200	-
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.200.000	25.200.000	-
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.759.158	62.759.158	-
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.981.758	53.981.758	-
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	786.385.397	786.385.397	-
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.041.129	24.041.129	-
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	725.458.329	725.458.329	-
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.885.939	36.885.939	-
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.475.608	381.475.608	-
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.000.000	2.000.000	-
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	252.409.029	252.409.029	-
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	127.066.579	127.066.579	-
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	15.068.714.309	15.068.714.309	-
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.467.752.093	5.467.752.093	-
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.396.590.853	4.396.590.853	-
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.071.161.240	1.071.161.240	-
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	5.197.520.885	5.197.520.885	-
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	4.385.295.295	4.385.295.295	-
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	812.225.590	812.225.590	-
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	461.054.853	461.054.853	-
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	281.868.337	281.868.337	-
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	179.186.516	179.186.516	-
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.266.821.371	1.266.821.371	-
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	595.821.171	595.821.171	-
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	209.024.000	209.024.000	-
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	210.210.000	210.210.000	-
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	67.080.000	67.080.000	-
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	179.189.200	179.189.200	-
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5.497.000	5.497.000	-
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.684.498.491	1.684.498.491	-
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	161.471.800	182.733.800	21.262.000
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	215.587.058	194.325.058	- 21.262.000

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	107.824.758	107.824.758	-
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.199.614.875	1.199.614.875	-
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	44.985.900	44.985.900	-
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	44.985.900	44.985.900	-
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	270.021.500	270.021.500	-
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	115.250.000	115.250.000	-
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	119.821.500	119.821.500	-
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	34.950.000	34.950.000	-
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	266.755.979	266.755.979	-
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	266.755.979	266.755.979	-
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	409.303.237	409.303.237	-
2.15.02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	409.303.237	409.303.237	-
02.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	282.956.100	282.956.100	-
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	282.956.100	282.956.100	-
2.15.03.2.12.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	282.956.100	282.956.100	-
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17.229.989.003	22.976.038.360	5.746.049.357
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	17.229.989.003	22.976.038.360	5.746.049.357
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	17.229.989.003	22.976.038.360	5.746.049.357
02.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.012.619.529	5.752.497.886	739.878.357
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.385.350	127.385.350	-
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.956.850	39.956.850	-
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.015.200	4.015.200	-
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.802.600	3.802.600	-
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.393.700	3.393.700	-
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.305.500	3.305.500	-
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.911.500	72.911.500	-
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.711.149.328	4.401.698.685	690.549.357
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.577.425.770	4.267.975.127	690.549.357
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61.284.329	61.284.329	-
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.505.900	3.505.900	-
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	68.933.329	68.933.329	-
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.617.779	30.617.779	-
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.617.779	30.617.779	-
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	209.769.529	209.769.529	-
2.16.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	70.626.600	70.626.600	-
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.200.000	44.200.000	-
2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	54.658.929	54.658.929	-
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40.284.000	40.284.000	-
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.794.600	324.123.600	49.329.000
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.775.300	98.604.300	- 6.171.000
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.782.500	9.782.500	-
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.781.700	130.281.700	55.500.000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.817.100	8.817.100	-
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	7.200.000	-
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.438.000	69.438.000	-
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.417.500	110.417.500	-
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	110.417.500	110.417.500	-
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.880.350	102.880.350	-
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.698.350	49.698.350	-
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.182.000	53.182.000	-
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.605.093	445.605.093	-
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.691.600	60.691.600	-
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.775.200	21.775.200	-
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	363.138.293	363.138.293	-
02.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.823.056.050	1.823.056.050	-
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.823.056.050	1.823.056.050	-
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	120.000.000	120.000.000	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	334.949.750	334.949.750	-
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	111.779.500	111.779.500	-
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	376.010.000	376.010.000	-
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	116.918.200	116.918.200	-
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	60.871.000	60.871.000	-
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	702.527.600	702.527.600	-
02.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	10.394.313.424	15.400.484.424	5.006.171.000
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.529.045.579	3.529.045.579	-
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3.529.045.579	3.529.045.579	-
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.865.267.845	11.871.438.845	5.006.171.000
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	5.185.939.087	10.192.110.087	5.006.171.000
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	107.520.879	107.520.879	-
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	823.099.029	823.099.029	-
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	195.307.100	195.307.100	-
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	349.137.600	349.137.600	-
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	204.264.150	204.264.150	-
02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	20.611.170.470	21.713.928.156	1.102.757.686
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	20.611.170.470	21.713.928.156	1.102.757.686
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	20.611.170.470	21.713.928.156	1.102.757.686
02.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.276.199.279	6.378.956.965	1.102.757.686
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	362.116.929	362.116.929	-
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.153.000	37.153.000	-
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.578.000	15.578.000	-
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.876.500	14.876.500	-
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.962.000	12.962.000	-
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.962.000	12.962.000	-
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.803.000	9.803.000	-
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	258.782.429	258.782.429	-
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.938.645.621	5.009.903.307	1.071.257.686
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.778.077.921	4.849.335.607	1.071.257.686
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.308.600	75.308.600	-
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85.259.100	85.259.100	-
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.962.179	32.962.179	-
2.17.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	32.962.179	32.962.179	-
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	229.896.300	229.896.300	-
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105.000.000	105.000.000	-
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	124.896.300	124.896.300	-
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	368.143.900	399.643.900	31.500.000
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.455.400	98.455.400	-
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.055.600	22.055.600	-
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.421.500	117.921.500	31.500.000
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.746.400	19.746.400	-
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.319.000	35.319.000	-
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.330.000	7.330.000	-
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.816.000	98.816.000	-
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.374.100	15.374.100	-
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	15.374.100	15.374.100	-
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.683.850	93.683.850	-
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	93.683.850	93.683.850	-
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.376.400	235.376.400	-
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	192.626.400	192.626.400	-
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.750.000	42.750.000	-
02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	223.376.350	223.376.350	-
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	223.376.350	223.376.350	-
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	172.198.400	172.198.400	-
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	51.177.950	51.177.950	-
02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	108.627.579	108.627.579	-
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	108.627.579	108.627.579	-
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	99.135.579	99.135.579	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	9.492.000	9.492.000	-
02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	330.198.300	330.198.300	-
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	330.198.300	330.198.300	-
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	330.198.300	330.198.300	-
02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.799.856.029	1.799.856.029	-
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.799.856.029	1.799.856.029	-
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.799.856.029	1.799.856.029	-
02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	12.013.741.221	12.013.741.221	-
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	12.013.741.221	12.013.741.221	-
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	607.233.936	607.233.936	-
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	17.178.600	17.178.600	-
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	336.364.000	336.364.000	-
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	11.009.050.685	11.009.050.685	-
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	43.914.000	43.914.000	-
02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	859.171.712	859.171.712	-
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	859.171.712	859.171.712	-
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	859.171.712	859.171.712	-
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.889.751.002	9.071.727.705	181.976.703
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.889.751.002	9.071.727.705	181.976.703
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.889.751.002	9.071.727.705	181.976.703
02.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.080.537.941	7.262.514.644	181.976.703
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	212.306.308	212.306.308	-
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.933.179	70.933.179	-
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.500.000	10.500.000	-
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.500.000	10.500.000	-
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.500.000	10.500.000	-
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.500.000	10.500.000	-
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	99.373.129	99.373.129	-
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.202.309.305	6.351.291.358	148.982.053
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.064.836.176	6.213.818.229	148.982.053
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.000.000	35.000.000	-
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	102.473.129	102.473.129	-
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.609.000	107.609.000	-
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.200	50.000.200	-
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	57.608.800	57.608.800	-
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.363.620	312.358.270	32.994.650
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.620.200	1.620.200	-
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.084.600	7.084.600	-
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	113.811.970	146.811.970	33.000.000
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77.301.500	77.301.500	-
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	-
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.680.000	4.680.000	-
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.966.000	69.860.000	43.894.000
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.360.358	78.360.358	-
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	78.360.358	78.360.358	-
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.589.350	200.589.350	-
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.952.000	180.952.000	-
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.637.350	19.637.350	-
02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	92.512.100	92.512.100	-
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	92.512.100	92.512.100	-
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	46.792.250	46.792.250	-
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	45.719.850	45.719.850	-
02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	434.872.558	434.872.558	-
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	434.872.558	434.872.558	-
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	434.872.558	434.872.558	-
02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	298.189.387	298.189.387	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	298.189.387	298.189.387	-
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	118.325.529	118.325.529	-
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	99.207.958	99.207.958	-
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	80.655.900	80.655.900	-
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	838.781.537	838.781.537	-
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	838.781.537	838.781.537	-
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	333.946.658	333.946.658	-
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	393.839.329	416.461.329	22.622.000
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	110.995.550	88.373.550	-22.622.000
02.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	144.857.479	144.857.479	-
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	144.857.479	144.857.479	-
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	144.857.479	144.857.479	-
02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	36.096.674.254	37.152.655.319	1.055.981.065
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga	36.096.674.254	37.152.655.319	1.055.981.065
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga	36.096.674.254	37.152.655.319	1.055.981.065
02.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.655.908.551	5.711.889.616	1.055.981.065
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.377.200	99.377.200	-
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.180.600	35.180.600	-
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.754.500	6.754.500	-
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.754.500	6.754.500	-
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.754.500	6.754.500	-
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.754.500	6.754.500	-
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.178.600	37.178.600	-
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.059.532.615	5.072.013.680	1.012.481.065
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.992.677.936	5.005.159.001	1.012.481.065
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34.897.300	34.897.300	-
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31.957.379	31.957.379	-
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84.387.800	84.387.800	-
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	650.800	650.800	-
2.19.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	80.487.000	80.487.000	-
2.19.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.250.000	3.250.000	-
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.695.910	167.195.910	43.500.000
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.238.200	23.238.200	-
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46.525.210	90.025.210	43.500.000
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.738.500	16.738.500	-
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000	24.000	-
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000	13.000.000	-
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.170.000	24.170.000	-
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.444.600	13.444.600	-
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	13.444.600	13.444.600	-
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.755.500	171.755.500	-
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	65.091.200	65.091.200	-
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.664.300	106.664.300	-
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.714.926	103.714.926	-
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.390.000	46.390.000	-
2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.324.926	57.324.926	-
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.163.913.800	3.163.913.800	-
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.470.305.800	2.470.305.800	-
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	82.605.200	82.605.200	-
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	169.951.000	169.951.000	-
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	177.606.000	177.606.000	-
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	265.836.500	265.836.500	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	1.030.126.500	1.030.126.500	-
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	98.280.000	98.280.000	-
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	645.900.600	645.900.600	-
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	693.608.000	693.608.000	-
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	693.608.000	693.608.000	-
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	28.072.826.903	28.072.826.903	-
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.871.577.444	3.871.577.444	-
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	3.871.577.444	3.871.577.444	-
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.273.798.500	6.273.798.500	-
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	705.722.000	705.722.000	-
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	5.568.076.500	5.568.076.500	-
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	778.804.450	778.804.450	-
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	130.660.600	130.660.600	-
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	240.377.000	240.377.000	-
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	407.766.850	407.766.850	-
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	14.889.415.200	14.889.415.200	-
2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	92.980.600	92.980.600	-
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	14.704.725.000	14.704.725.000	-
2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	91.709.600	91.709.600	-
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.259.231.309	2.259.231.309	-
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	724.463.100	724.463.100	-
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	30.440.600	30.440.600	-
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1.479.121.809	1.479.121.809	-
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	25.205.800	25.205.800	-
02.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	204.025.000	204.025.000	-
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	204.025.000	204.025.000	-
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	204.025.000	204.025.000	-
02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	529.857.950	529.857.950	-
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	529.857.950	529.857.950	-
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	529.857.950	529.857.950	-
02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	529.857.950	529.857.950	-
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	529.857.950	529.857.950	-
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	443.402.750	443.402.750	-
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	62.128.200	62.128.200	-
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	24.327.000	24.327.000	-
02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	325.974.229	325.974.229	-
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	325.974.229	325.974.229	-
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	325.974.229	325.974.229	-
02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	325.974.229	325.974.229	-
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	325.974.229	325.974.229	-
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	158.029.550	158.029.550	-
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	167.944.679	167.944.679	-
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.805.399.624	3.805.399.624	-
3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.805.399.624	3.805.399.624	-
3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.805.399.624	3.805.399.624	-
02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.208.771.729	3.208.771.729	-
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	83.938.729	83.938.729	-
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	83.938.729	83.938.729	-
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	180.975.900	180.975.900	-
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	180.975.900	180.975.900	-
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.943.857.100	2.943.857.100	-
2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	2.943.857.100	2.943.857.100	-
02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	66.788.000	66.788.000	-
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.788.000	66.788.000	-
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	66.788.000	66.788.000	-
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	529.839.895	529.839.895	-
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	341.635.575	341.635.575	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	341.635.575	341.635.575	-
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	188.204.320	188.204.320	-
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	188.204.320	188.204.320	-
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.521.788.455	4.071.787.910	549.999.455
2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	3.521.788.455	4.071.787.910	549.999.455
2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	3.521.788.455	4.071.787.910	549.999.455
02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3.521.788.455	4.071.787.910	549.999.455
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.716.182.300	3.266.182.300	550.000.000
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	703.949.800	1.004.431.800	300.482.000
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	462.877.000	462.877.000	-
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	551.689.000	551.689.000	-
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	522.752.300	522.752.300	-
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	474.914.200	724.432.200	249.518.000
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	805.606.155	805.605.610	-545
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	185.915.800	185.915.800	-
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	570.005.755	570.005.210	-545
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	49.684.600	49.684.600	-
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	6.157.845.768	7.590.539.580	1.432.693.812
2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	6.157.845.768	7.590.539.580	1.432.693.812
2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Arsip dan Perpustakaan	6.157.845.768	7.590.539.580	1.432.693.812
02.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.490.926.468	5.933.671.480	1.442.745.012
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.643.900	10.643.900	-
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.341.000	5.341.000	-
2.24.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.091.500	1.091.500	-
2.24.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.491.500	1.491.500	-
2.24.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.427.000	1.427.000	-
2.24.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	910.000	910.000	-
2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	382.900	382.900	-
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.292.957.655	4.514.202.567	1.221.244.912
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.292.301.255	4.513.546.167	1.221.244.912
2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	656.400	656.400	-
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	354.752.450	576.252.550	221.500.100
2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.878.000	19.193.300	9.315.300
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.477.150	164.477.150	-
2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.279.500	17.279.500	-
2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.660.600	263.160.600	211.500.000
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.731.200	11.416.000	684.800
2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.540.000	9.540.000	-
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.186.000	91.186.000	-
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52.778.300	52.778.300	-
2.24.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	52.778.300	52.778.300	-
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	678.237.400	678.237.400	-
2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	678.237.400	678.237.400	-
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.556.763	101.556.763	-
2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.400.000	8.400.000	-
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.350.000	43.350.000	-
2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.806.763	49.806.763	-
02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.309.693.800	1.299.693.800	-10.000.000
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	107.168.000	107.168.000	-
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	70.753.000	70.753.000	-
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	36.415.000	36.415.000	-
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	886.836.600	886.836.600	-
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	886.836.600	886.836.600	-
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	315.689.200	305.689.200	-10.000.000
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	231.215.200	221.215.200	-10.000.000
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	84.474.000	84.474.000	-
02.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	357.225.500	357.174.300	-51.200
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	357.225.500	357.174.300	-51.200
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	357.225.500	357.174.300	-51.200

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			-
03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.178.525.673	18.615.497.345	2.436.971.672
3.25.2.09.3.27.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	16.178.525.673	18.615.497.345	2.436.971.672
3.25.2.09.3.27.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	16.178.525.673	18.615.497.345	2.436.971.672
03.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.590.031.179	12.112.986.851	2.522.955.672
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	191.458.079	201.958.079	10.500.000
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.208.950	55.958.950	3.750.000
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.126.000	15.126.000	-
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.556.000	11.556.000	-
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.862.000	13.862.000	-
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.212.000	9.212.000	-
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.833.129	85.583.129	6.750.000
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.660.000	10.660.000	-
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.933.254.274	10.264.605.871	2.331.351.597
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.717.576.974	10.026.428.571	2.308.851.597
3.25.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	102.863.850	114.113.850	11.250.000
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.649.600	6.649.600	-
3.25.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.850.000	5.850.000	-
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.313.850	111.563.850	11.250.000
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	377.122.737	399.622.737	22.500.000
3.25.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	109.071.200	109.071.200	-
3.25.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	89.308.308	100.558.308	11.250.000
3.25.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.853.229	112.103.229	11.250.000
3.25.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	77.890.000	77.890.000	-
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	751.493.889	910.097.964	158.604.075
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.674.760	24.674.760	-
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.502.480	114.106.555	58.604.075
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190.315.480	341.815.480	151.500.000
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	122.040.090	122.040.090	-
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.960.000	9.960.000	- 20.000.000
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.200.000	31.200.000	-
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.030.000	82.030.000	-
3.25.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	95.271.079	105.771.079	10.500.000
3.25.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	120.500.000	78.500.000	- 42.000.000
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.800.000	10.800.000	-
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.000	10.800.000	-
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.902.200	325.902.200	-
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.700.000	70.700.000	-
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.380.000	219.380.000	-
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.822.200	35.822.200	-
03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.625.485.478	5.486.501.478	- 138.984.000
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	2.667.186.808	2.518.752.808	- 148.434.000
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	2.418.560.729	2.259.626.729	- 158.934.000
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	248.626.079	259.126.079	10.500.000
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	76.690.000	75.890.000	- 800.000
3.25.04.2.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	76.690.000	75.890.000	- 800.000
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.881.608.670	2.891.858.670	10.250.000
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.475.000	25.475.000	-
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	881.115.670	897.615.670	16.500.000
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.943.940.000	1.943.940.000	-
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.078.000	24.828.000	- 6.250.000
03.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	228.893.628	272.143.628	43.250.000
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	228.893.628	272.143.628	43.250.000
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	228.893.628	272.143.628	43.250.000
03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	734.115.388	743.865.388	9.750.000
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	130.405.179	133.405.179	3.000.000

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	130.405.179	133.405.179	3.000.000
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	403.678.129	410.428.129	6.750.000
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	403.678.129	410.428.129	6.750.000
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	200.032.080	200.032.080	-
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.032.080	200.032.080	-
03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	13.269.773.569	14.333.937.421	1.064.163.852
3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13.269.773.569	14.333.937.421	1.064.163.852
3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13.269.773.569	14.333.937.421	1.064.163.852
03.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.346.020.556	7.410.184.408	1.064.163.852
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.215.787	207.215.787	-
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.843.529	87.843.529	-
3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.500.000	6.500.000	-
3.26.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.500.000	6.500.000	-
3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.500.000	6.500.000	-
3.26.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.500.000	6.500.000	-
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	93.372.258	93.372.258	-
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.317.246.472	6.340.910.324	1.023.663.852
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.167.934.672	6.191.598.524	1.023.663.852
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	76.155.900	76.155.900	-
3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	73.155.900	73.155.900	-
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	508.591.400	549.091.400	40.500.000
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.944.700	17.944.700	-
3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65.939.200	65.939.200	-
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.762.900	156.262.900	40.500.000
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.518.600	95.518.600	-
3.26.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	21.450.000	21.450.000	-
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.976.000	191.976.000	-
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.397.800	19.397.800	-
3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	19.397.800	19.397.800	-
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.150.000	5.150.000	-
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.150.000	5.150.000	-
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.419.097	288.419.097	-
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	179.480.000	179.480.000	-
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	108.939.097	108.939.097	-
03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.183.604.976	3.183.604.976	-
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	271.585.300	271.585.300	-
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	271.585.300	271.585.300	-
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.771.360.697	2.771.360.697	-
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	61.391.950	61.391.950	-
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.388.634.418	1.388.634.418	-
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.050.070.829	1.050.070.829	-
3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	271.263.500	271.263.500	-
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	140.658.979	140.658.979	-
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	39.766.000	39.766.000	-
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	52.707.479	52.707.479	-
3.26.02.2.04.05	Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	48.185.500	48.185.500	-
03.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.744.992.729	2.744.992.729	-
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.744.992.729	2.744.992.729	-
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	740.256.629	740.256.629	-
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.749.233.150	1.749.233.150	-
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	23.950.000	23.950.000	-
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	231.552.950	231.552.950	-
03.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	168.376.950	168.376.950	-
3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Bereksprei, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	116.636.950	116.636.950	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
3.26.04.2.01.01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	116.636.950	116.636.950	-
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	51.740.000	51.740.000	-
3.26.04.2.02.08	Perlindungan Hasil Kreativitas	51.740.000	51.740.000	-
03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	826.778.358	826.778.358	-
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	614.525.408	614.525.408	-
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	29.716.100	29.716.100	-
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	511.619.129	511.619.129	-
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	73.190.179	73.190.179	-
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	212.252.950	212.252.950	-
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	129.132.950	129.132.950	-
3.26.05.2.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	83.120.000	83.120.000	-
03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	42.984.851.402	47.350.049.608	4.365.198.206
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.608.029.098	17.538.319.898	1.930.290.800
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.608.029.098	17.538.319.898	1.930.290.800
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8.867.902.032	9.117.902.032	250.000.000
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	6.447.071.844	6.697.071.844	250.000.000
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	709.743.296	959.743.296	250.000.000
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5.737.328.548	5.737.328.548	-
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2.420.830.188	2.420.830.188	-
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	125.044.344	125.044.344	-
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2.295.785.844	2.295.785.844	-
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.202.025.724	4.572.023.524	1.369.997.800
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	0	133.867.300	133.867.300
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	0	133.867.300	133.867.300
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.202.025.724	4.438.156.224	1.236.130.500
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.614.582.079	1.604.382.079	10.200.000
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	302.040.000	402.040.000	100.000.000
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.285.403.645	2.431.734.145	1.146.330.500
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.538.101.342	3.848.394.342	310.293.000
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.538.101.342	3.848.394.342	310.293.000
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	504.485.624	504.485.624	-
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	190.322.640	490.415.640	300.093.000
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.843.293.078	2.853.493.078	10.200.000
3.25.2.09.3.27.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	27.376.822.304	29.811.729.710	2.434.907.406
3.25.2.09.3.27.01.0000	Dinas Perikanan dan Peternakan	27.376.822.304	29.811.729.710	2.434.907.406
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	21.727.303.108	21.779.335.164	52.032.056
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	310.115.879	755.129.335	445.013.456
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	310.115.879	755.129.335	445.013.456
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	247.275.079	244.275.079	3.000.000
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	247.275.079	244.275.079	3.000.000
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	102.098.050	102.098.050	-
3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	102.098.050	102.098.050	-
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.067.814.100	20.677.832.700	389.981.400
3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	274.552.800	469.417.800	194.865.000
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	20.793.261.300	20.208.414.900	584.846.400
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.676.956.543	1.870.618.070	193.661.527
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.577.257.543	1.770.919.070	193.661.527
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	778.133.161	817.858.737	39.725.576
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	799.124.382	953.060.333	153.935.951
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	99.699.000	99.699.000	-
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	99.699.000	99.699.000	-
03.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.965.990.296	5.061.754.119	2.095.763.823
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	950.329.677	1.637.078.502	686.748.825
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	198.488.092	198.488.092	-
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	493.556.185	1.180.305.010	686.748.825
3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	258.285.400	258.285.400	-
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	532.479.815	1.022.675.455	490.195.640
3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	8.090.000	487.785.640	479.695.640

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	483.605.815	494.105.815	10.500.000
3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	40.784.000	40.784.000	-
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.015.430.317	1.921.499.675	906.069.358
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	29.450.625	29.450.625	-
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	985.979.692	1.892.049.050	906.069.358
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	319.045.129	325.795.129	6.750.000
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	97.601.000	97.601.000	-
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	93.051.000	93.051.000	-
3.27.04.2.04.03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	128.393.129	135.143.129	6.750.000
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	148.705.358	154.705.358	6.000.000
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	148.705.358	154.705.358	6.000.000
03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	57.675.100	57.675.100	-
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	57.675.100	57.675.100	-
3.27.05.2.01.04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	57.675.100	57.675.100	-
03.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	273.952.129	280.702.129	6.750.000
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	147.435.000	147.435.000	-
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	104.246.000	104.246.000	-
3.27.06.2.02.04	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	43.189.000	43.189.000	-
3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	126.517.129	133.267.129	6.750.000
3.27.06.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	31.700.000	31.700.000	-
3.27.06.2.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	94.817.129	101.567.129	6.750.000
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	674.945.128	761.645.128	86.700.000
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	674.945.128	761.645.128	86.700.000
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	150.571.079	161.071.079	10.500.000
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	524.374.049	600.574.049	76.200.000
03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.695.402.532	1.985.801.132	- 709.601.400
3.31.3.30.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.695.402.532	1.985.801.132	- 709.601.400
3.31.3.30.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.695.402.532	1.985.801.132	- 709.601.400
03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	119.319.900	77.718.500	- 41.601.400
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	14.989.900	14.989.900	-
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	14.989.900	14.989.900	-
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	27.570.000	62.728.600	35.158.600
3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	9.190.000	62.728.600	53.538.600
03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.460.320.400	785.320.400	- 675.000.000
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.199.587.800	524.587.800	- 675.000.000
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	428.377.800	428.377.800	-
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	771.210.000	96.210.000	- 675.000.000
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	260.732.600	260.732.600	-
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	112.780.800	112.780.800	-
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	147.951.800	147.951.800	-
03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	79.671.100	79.671.100	-
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	16.768.000	16.768.000	-
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6.078.000	6.078.000	-
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6.530.000	6.530.000	-
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4.160.000	4.160.000	-
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	19.045.800	19.045.800	-
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5.225.800	5.225.800	-
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4.300.000	4.300.000	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	9.520.000	9.520.000	-
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.857.300	43.857.300	-
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	25.431.300	25.431.300	-
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	7.718.400	7.718.400	-
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	10.707.600	10.707.600	-
03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	451.525.600	451.525.600	-
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	451.525.600	451.525.600	-
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	69.430.000	69.430.000	-
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	98.437.100	98.437.100	-
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	149.331.500	149.331.500	-
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	109.622.000	109.622.000	-
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	24.705.000	24.705.000	-
03.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	267.012.000	274.012.000	7.000.000
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	267.012.000	274.012.000	7.000.000
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	204.052.000	211.052.000	7.000.000
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	62.960.000	62.960.000	-
03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	317.553.532	317.553.532	-
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	317.553.532	317.553.532	-
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	57.209.800	57.209.800	-
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	154.050.000	154.050.000	-
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	106.293.732	106.293.732	-
03.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	18.211.626.554	22.858.396.712	4.646.770.158
3.31.3.30.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.211.626.554	22.858.396.712	4.646.770.158
3.31.3.30.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.211.626.554	22.858.396.712	4.646.770.158
03.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.473.725.359	15.984.342.895	3.510.617.536
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.630.400	29.630.400	-
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.490.600	5.490.600	-
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.655.500	6.655.500	-
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.628.200	5.628.200	-
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.846.200	4.846.200	-
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.009.900	7.009.900	-
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.434.428.906	14.626.033.642	3.191.604.736
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.431.245.906	14.622.850.642	3.191.604.736
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.183.000	3.183.000	-
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.250.000	144.760.000	72.510.000
3.31.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	72.250.000	144.760.000	72.510.000
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.583.000	422.506.500	127.923.500
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.522.900	41.961.400	25.438.500
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.438.500	137.938.500	70.500.000
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	114.711.600	146.696.600	31.985.000
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	66.000.000	66.000.000	-
3.31.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	11.440.000	11.440.000	-
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.470.000	18.470.000	-
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	36.909.300	36.909.300
3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	36.909.300	36.909.300
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	642.833.053	652.553.053	9.720.000
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	211.872.258	211.872.258	-
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.997.200	29.997.200	-
3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.200.000	6.200.000	-
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	394.763.595	404.483.595	9.720.000
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	71.950.000	71.950.000
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	71.950.000	71.950.000
03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.500.454.445	6.636.607.067	1.136.152.622
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5.500.454.445	6.636.607.067	1.136.152.622
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	61.638.300	61.638.300	-
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	118.670.179	118.670.179	-
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	248.605.108	923.675.750	675.070.642
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.542.602.708	3.717.584.108	174.981.400
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	678.238.850	964.346.030	286.107.180

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	850.699.300	850.692.700	- 6.600
03.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	25.750.000	25.750.000	-
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	25.750.000	25.750.000	-
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	25.750.000	25.750.000	-
03.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	211.696.750	211.696.750	-
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	211.696.750	211.696.750	-
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	27.020.950	27.020.950	-
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	184.675.800	184.675.800	-
03.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	37.199.700	37.199.700	-
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	37.199.700	37.199.700	-
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	37.199.700	37.199.700	-
03.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	37.199.700	37.199.700	-
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	37.199.700	37.199.700	-
3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	37.199.700	37.199.700	-
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			-
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	83.717.023.365	91.268.668.994	7.551.645.629
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	83.717.023.365	91.268.668.994	7.551.645.629
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	83.717.023.365	91.268.668.994	7.551.645.629
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.625.641.563	53.128.043.392	3.502.401.829
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	355.046.600	355.046.600	-
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	257.876.600	257.876.600	-
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.984.800	12.984.800	-
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.738.000	8.738.000	-
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.250.400	9.250.400	-
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.149.600	12.149.600	-
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.047.200	54.047.200	-
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.917.561.309	25.136.871.138	3.219.309.829
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.477.130.068	24.696.439.897	3.219.309.829
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	284.617.762	284.617.762	-
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	57.167.500	57.167.500	-
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43.780.400	43.780.400	-
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42.922.779	42.922.779	-
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.942.800	11.942.800	-
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	45.420.000	45.420.000	-
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	45.420.000	45.420.000	-
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	844.692.760	844.692.760	-
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	147.874.000	147.874.000	-
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	206.246.644	206.246.644	-
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	490.572.116	490.572.116	-
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.701.231.616	5.998.231.616	297.000.000
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.065.500	29.065.500	-
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	546.144.900	546.144.900	-
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	305.211.400	305.211.400	-
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	410.001.500	707.001.500	297.000.000
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	338.316.800	338.316.800	-
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	370.767.744	370.767.744	-
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.287.625.000	3.287.625.000	-
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	414.098.772	414.098.772	-
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.101.428.850	1.101.428.850	-
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	211.210.900	211.210.900	-
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	890.217.950	890.217.950	-
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.842.346.966	4.842.346.966	-
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	305.520.516	305.520.516	-
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	354.638.000	354.638.000	-
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	688.000.000	688.000.000	-
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.494.188.450	3.494.188.450	-
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.979.630.336	3.979.630.336	-
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	572.728.000	572.728.000	-
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	686.578.200	686.578.200	-
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	607.551.790	607.551.790	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.112.772.346	2.112.772.346	-
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.875.692.760	3.875.692.760	-
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.819.271.380	2.819.271.380	-
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	110.000.000	110.000.000	-
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25.000.000	25.000.000	-
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	921.421.380	921.421.380	-
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	478.192.800	478.192.800	-
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	255.980.400	255.980.400	-
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	107.730.000	107.730.000	-
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	114.482.400	114.482.400	-
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	1.547.374.950	1.533.466.950	- 13.908.000
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	578.126.400	571.626.400	- 6.500.000
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	185.200.800	185.200.800	-
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	303.105.600	295.697.600	- 7.408.000
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	269.872.400	269.872.400	-
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	211.069.750	211.069.750	-
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.937.022.616	4.937.022.616	-
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	2.986.458.579	2.986.458.579	-
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.734.379.437	1.734.379.437	-
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	216.184.600	216.184.600	-
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	26.408.177.778	26.422.085.778	13.908.000
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.051.988.372	1.003.088.372	- 48.900.000
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	452.438.772	452.038.772	- 400.000
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	378.294.600	378.294.600	-
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	221.255.000	172.755.000	- 48.500.000
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	23.363.718.840	23.533.596.840	169.878.000
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	22.487.318.195	22.693.016.195	205.698.000
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	478.754.608	478.754.608	-
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	397.646.037	361.826.037	- 35.820.000
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.741.820.208	1.656.566.208	- 85.254.000
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	629.384.979	629.384.979	-
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	668.074.050	668.074.050	-
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	444.361.179	359.107.179	- 85.254.000
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	250.650.358	228.834.358	- 21.816.000
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	90.990.979	90.990.979	-
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	32.614.500	10.798.500	- 21.816.000
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	127.044.879	127.044.879	-
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	7.683.204.024	11.718.539.824	4.035.335.800
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.163.335.650	4.355.335.650	192.000.000
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	999.611.500	999.611.500	-
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	626.397.050	818.397.050	192.000.000
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	1.637.367.700	1.637.367.700	-
4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	214.286.300	214.286.300	-
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	685.673.100	685.673.100	-
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	805.253.758	805.253.758	-
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	178.510.500	178.510.500	-
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	127.871.500	127.871.500	-
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	498.871.758	498.871.758	-
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.714.614.616	2.714.614.616	-
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	997.379.058	997.379.058	-
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	999.852.750	999.852.750	-
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	717.382.808	717.382.808	-
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	0	3.843.335.800	3.843.335.800
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	0	3.843.335.800	3.843.335.800
04.02	SEKRETARIAT DPRD	102.188.188.320	103.981.178.187	1.792.989.867
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	102.188.188.320	103.981.178.187	1.792.989.867
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	102.188.188.320	103.981.178.187	1.792.989.867
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.316.831.650	73.109.821.517	1.792.989.867
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.140.330.650	1.140.330.650	-
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	764.216.150	764.216.150	-
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	58.005.000	58.005.000	-
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	49.660.000	49.660.000	-
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	35.105.000	35.105.000	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	34.395.600	34.395.600	-
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.320.000	40.320.000	-
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158.628.900	158.628.900	-
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.706.767.313	8.373.757.180	1.666.989.867
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.824.768.105	7.491.757.972	1.666.989.867
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	703.054.208	703.054.208	-
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.345.000	55.345.000	-
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54.300.000	54.300.000	-
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	69.300.000	69.300.000	-
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	817.195.900	817.195.900	-
4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	42.050.000	42.050.000	-
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8.698.900	8.698.900	-
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	381.450.000	381.450.000	-
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	351.447.000	351.447.000	-
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33.550.000	33.550.000	-
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.374.554.316	3.500.554.316	126.000.000
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.376.500	17.376.500	-
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	301.428.350	301.428.350	-
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	78.506.300	78.506.300	-
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182.194.600	308.194.600	126.000.000
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	503.594.400	503.594.400	-
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	887.920.000	887.920.000	-
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	592.876.666	592.876.666	-
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	810.657.500	810.657.500	-
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.259.500	20.259.500	-
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.259.500	20.259.500	-
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.715.677.419	1.715.677.419	-
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.053.000	41.053.000	-
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.176.300	190.176.300	-
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	464.020.000	464.020.000	-
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.020.428.119	1.020.428.119	-
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.059.947.372	1.059.947.372	-
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.450.000	99.450.000	-
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	214.730.000	214.730.000	-
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	664.238.064	664.238.064	-
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.529.308	81.529.308	-
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	50.959.491.132	50.959.491.132	-
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	50.475.981.132	50.475.981.132	-
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	331.130.000	331.130.000	-
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	152.380.000	152.380.000	-
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	5.522.608.048	5.522.608.048	-
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	431.286.400	431.286.400	-
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4.764.429.072	4.764.429.072	-
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	326.892.576	326.892.576	-
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	30.871.356.670	30.871.356.670	-
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.597.462.400	3.597.462.400	-
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	351.215.300	351.215.300	-
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.338.550.300	2.338.550.300	-
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	136.153.600	136.153.600	-
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	593.937.900	593.937.900	-
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	177.605.300	177.605.300	-
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.237.032.844	2.237.032.844	-
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	425.330.000	425.330.000	-
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	429.740.000	429.740.000	-
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	13.270.500	13.270.500	-
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	637.835.000	637.835.000	-
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	349.062.344	349.062.344	-
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	381.795.000	381.795.000	-
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.496.185.300	1.496.185.300	-
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	383.367.700	383.367.700	-
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	174.088.800	174.088.800	-
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	360.386.100	360.386.100	-
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	176.437.200	176.437.200	-
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	25.754.500	25.754.500	-
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	139.640.000	139.640.000	-
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	80.963.000	80.963.000	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	155.548.000	155.548.000	-
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	10.295.852.982	10.295.852.982	-
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	4.190.931.100	4.190.931.100	-
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	1.849.664.000	1.849.664.000	-
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2.365.750.000	2.365.750.000	-
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	60.000.000	60.000.000	-
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	432.000.000	432.000.000	-
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.296.996.082	1.296.996.082	-
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	100.511.800	100.511.800	-
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.183.014.944	5.183.014.944	-
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	177.000.000	177.000.000	-
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	927.385.944	927.385.944	-
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	4.078.629.000	4.078.629.000	-
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	81.203.400	81.203.400	-
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	81.203.400	81.203.400	-
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	313.921.100	313.921.100	-
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	26.105.600	26.105.600	-
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	287.815.500	287.815.500	-
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	7.666.683.700	7.666.683.700	-
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.361.921.900	6.361.921.900	-
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	95.924.500	95.924.500	-
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	71.028.800	71.028.800	-
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.137.808.500	1.137.808.500	-
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			-
05.01	PERENCANAAN	20.204.988.603	21.564.834.877	1.359.846.274
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.204.988.603	21.564.834.877	1.359.846.274
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.204.988.603	21.564.834.877	1.359.846.274
05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.886.729.153	14.246.575.427	1.359.846.274
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	623.661.600	623.661.600	-
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	331.997.000	331.997.000	-
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.429.000	8.429.000	-
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.429.000	8.429.000	-
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.322.000	10.322.000	-
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	65.202.000	65.202.000	-
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.244.000	38.244.000	-
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	161.038.600	161.038.600	-
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.399.887.292	10.708.733.566	1.308.846.274
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.873.181.892	10.182.028.166	1.308.846.274
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	233.876.200	233.876.200	-
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	163.440.000	163.440.000	-
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85.414.200	85.414.200	-
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	43.975.000	43.975.000	-
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	137.275.000	137.275.000	-
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	47.175.000	47.175.000	-
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	90.100.000	90.100.000	-
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	565.786.400	565.786.400	-
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	92.000.000	92.000.000	-
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	316.366.400	316.366.400	-
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	157.420.000	157.420.000	-
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.661.461.500	1.712.461.500	51.000.000
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.232.100	19.232.100	-
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	568.539.700	568.539.700	-
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	54.076.300	54.076.300	-
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.331.400	104.331.400	51.000.000
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.892.000	79.892.000	-
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	366.670.000	366.670.000	-
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.500.000	45.500.000	-
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	416.970.000	416.970.000	-
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	57.250.000	57.250.000	-
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.294.161	210.294.161	-
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	-
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.294.161	209.294.161	-
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.363.200	288.363.200	-
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	241.710.000	241.710.000	-
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.225.200	9.225.200	-
5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.428.000	37.428.000	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.990.547.300	3.990.547.300	-
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.997.908.200	2.997.908.200	-
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	50.000.000	50.000.000	-
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	50.000.000	50.000.000	-
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	75.798.400	75.798.400	-
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	50.962.800	50.962.800	-
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1.614.725.000	1.214.725.000	400.000.000
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	41.044.400	41.044.400	-
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.115.377.600	1.515.377.600	400.000.000
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	620.410.500	620.410.500	-
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	384.050.500	384.050.500	-
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	236.360.000	236.360.000	-
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	372.228.600	372.228.600	-
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	127.898.200	127.898.200	-
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	244.330.400	244.330.400	-
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.327.712.150	3.327.712.150	-
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.262.551.250	1.262.551.250	-
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	424.184.550	424.184.550	-
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	38.723.200	38.723.200	-
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	101.748.500	101.748.500	-
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	59.305.200	59.305.200	-
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	435.075.000	435.075.000	-
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	23.260.400	23.260.400	-
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	137.998.900	137.998.900	-
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	42.255.500	42.255.500	-
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	941.170.700	941.170.700	-
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	489.743.000	489.743.000	-
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	38.175.600	38.175.600	-
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	40.142.000	40.142.000	-
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	255.939.100	255.939.100	-
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	40.508.600	40.508.600	-
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	76.662.400	76.662.400	-
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.123.990.200	1.123.990.200	-
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	168.662.900	168.662.900	-
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	52.956.300	52.956.300	-
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	83.481.600	83.481.600	-
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	255.262.600	255.262.600	-
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	118.293.800	118.293.800	-
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	109.075.000	109.075.000	-
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	81.326.000	81.326.000	-
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	254.932.000	254.932.000	-
05.02	KEUANGAN	617.858.445.359	627.975.499.528	10.117.054.169
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	581.385.214.130	590.778.385.654	9.393.171.524

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	581.385.214.130	590.778.385.654	9.393.171.524
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77.505.267.267	80.227.197.520	2.721.930.253
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	365.478.887	365.478.887	-
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.209.786	76.209.786	-
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	83.284.286	83.284.286	-
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.203.400	50.203.400	-
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	62.330.686	62.330.686	-
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	19.229.400	19.229.400	-
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.221.329	74.221.329	-
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.370.715.445	61.032.645.698	2.661.930.253
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	57.487.630.166	60.149.560.419	2.661.930.253
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	423.180.200	423.180.200	-
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	174.165.424	174.165.424	-
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	285.739.655	285.739.655	-
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	220.523.429	220.523.429	-
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42.500.000	42.500.000	-
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	178.023.429	178.023.429	-
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	608.558.000	608.558.000	-
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	202.800.000	202.800.000	-
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	405.758.000	405.758.000	-
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.355.009.110	1.415.009.110	60.000.000
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.684.000	9.684.000	-
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.328.010	117.328.010	-
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.781.800	32.781.800	-
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	238.025.100	298.025.100	60.000.000
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.797.200	125.797.200	-
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	396.010.000	396.010.000	-
5.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	185.500.000	185.500.000	-
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.883.000	249.883.000	-
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	844.159.900	844.159.900	-
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	844.159.900	844.159.900	-
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.885.743.322	14.885.743.322	-
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.907.558	400.907.558	-
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.484.835.764	14.484.835.764	-
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	855.079.174	855.079.174	-
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88.605.600	88.605.600	-
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	235.485.650	235.485.650	-
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	530.987.924	530.987.924	-
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	498.731.122.725	505.402.363.996	6.671.241.271
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.488.855.808	2.488.855.808	-
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	166.440.112	166.440.112	-
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	164.722.812	164.722.812	-
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	64.520.912	64.520.912	-
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	250.816.012	250.816.012	-
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	71.337.812	71.337.812	-
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	277.541.912	277.541.912	-
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	511.808.924	511.808.924	-
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	476.805.400	476.805.400	-
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	304.939.112	304.939.112	-
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	56.994.900	56.994.900	-
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	142.927.900	142.927.900	-
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.177.034.294	2.177.034.294	-
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	189.610.448	189.610.448	-
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	211.685.000	211.685.000	-
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	248.708.400	248.708.400	-
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	138.996.900	138.996.900	-
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	138.206.100	138.206.100	-
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	343.931.424	343.931.424	-
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	284.156.424	284.156.424	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	168.602.948	168.602.948	-
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	453.136.650	453.136.650	-
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.399.657.572	1.399.657.572	-
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	318.158.572	318.158.572	-
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	185.287.000	185.287.000	-
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	185.602.200	185.602.200	-
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	169.171.700	169.171.700	-
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	541.438.100	541.438.100	-
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	492.167.188.501	498.838.429.772	6.671.241.271
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12.025.600.000	11.025.600.000	- 1.000.000.000
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	408.052.528.500	417.300.106.050	9.247.577.550
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	22.000.000.000	15.223.663.721	- 6.776.336.279
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	50.089.060.001	55.289.060.001	5.200.000.000
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	498.386.550	498.386.550	-
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	420.836.550	420.836.550	-
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	77.550.000	77.550.000	-
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.148.824.138	5.148.824.138	-
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.148.824.138	5.148.824.138	-
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	251.756.200	251.756.200	-
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	69.254.400	69.254.400	-
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	311.855.400	311.855.400	-
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	288.344.300	288.344.300	-
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	167.235.200	167.235.200	-
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.575.267.500	1.575.267.500	-
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	246.063.550	246.063.550	-
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	110.403.000	110.403.000	-
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.130.214.188	1.130.214.188	-
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	287.499.400	287.499.400	-
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	177.131.600	177.131.600	-
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	533.799.400	533.799.400	-
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	36.473.231.229	37.197.113.874	723.882.645
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	36.473.231.229	37.197.113.874	723.882.645
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.693.114.745	27.416.997.390	723.882.645
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.631.250	146.631.250	-
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.699.000	17.699.000	-
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.794.100	25.794.100	-
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.461.500	11.461.500	-
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.851.000	8.851.000	-
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.176.000	9.176.000	-
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69.545.650	69.545.650	-
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.104.000	4.104.000	-
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.728.280.605	24.339.663.250	611.382.645
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.595.681.405	24.207.064.050	611.382.645
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.244.000	22.244.000	-
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	25.730.500	25.730.500	-
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84.624.700	84.624.700	-
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	213.450.000	213.450.000	-
5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	161.990.000	161.990.000	-
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51.460.000	51.460.000	-
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.197.521.316	1.310.021.316	112.500.000
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.290.000	6.290.000	-
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	232.907.400	232.907.400	-
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.031.600	55.031.600	-
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	342.556.237	455.056.237	112.500.000
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	236.884.100	236.884.100	-
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	25.000.000	-
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.315.179	40.315.179	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.156.000	237.156.000	-
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.380.800	21.380.800	-
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.436.300	31.436.300	-
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	31.436.300	31.436.300	-
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.099.750	277.099.750	-
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.943.850	116.943.850	-
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.155.900	160.155.900	-
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.098.695.524	1.098.695.524	-
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	496.720.000	496.720.000	-
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	253.465.200	253.465.200	-
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	348.510.324	348.510.324	-
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	9.780.116.484	9.780.116.484	-
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	9.780.116.484	9.780.116.484	-
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	461.169.300	461.169.300	-
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	472.181.029	472.181.029	-
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.199.266.444	1.199.266.444	-
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	638.300.700	638.300.700	-
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	724.228.616	724.228.616	-
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	368.003.772	368.003.772	-
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	608.592.200	608.592.200	-
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	266.145.572	266.145.572	-
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.202.652.916	1.202.652.916	-
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	682.055.000	682.055.000	-
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	2.138.894.769	2.138.894.769	-
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	164.002.508	164.002.508	-
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	646.180.529	646.180.529	-
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	208.443.129	208.443.129	-
05.03	KEPEGAWAIAN	51.677.191.386	18.647.402.667	- 33.029.788.719
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	51.677.191.386	18.647.402.667	- 33.029.788.719
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	51.677.191.386	18.647.402.667	- 33.029.788.719
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.776.768.428	13.746.979.709	- 33.029.788.719
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	431.104.300	431.104.300	-
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.545.200	43.545.200	-
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	72.555.000	72.555.000	-
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	72.555.000	72.555.000	-
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.074.000	25.074.000	-
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	25.074.000	25.074.000	-
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59.677.950	59.677.950	-
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.623.150	132.623.150	-
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.131.021.133	12.062.232.414	- 33.068.788.719
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.957.105.233	11.888.316.514	- 33.068.788.719
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	57.860.000	57.860.000	-
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	116.055.900	116.055.900	-
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	693.461.100	732.461.100	39.000.000
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.228.400	12.228.400	-
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.222.100	112.222.100	-
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.288.400	25.288.400	-
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	208.909.600	247.909.600	39.000.000
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.611.100	94.611.100	-
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.287.500	28.287.500	-
5.03.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	35.100.000	35.100.000	-
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.814.000	176.814.000	-
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.996.895	156.996.895	-
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	900.000	900.000	-
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.096.895	156.096.895	-
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.185.000	364.185.000	-
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	261.980.000	261.980.000	-
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.205.000	102.205.000	-
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.900.422.958	4.900.422.958	-
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.015.917.379	2.015.917.379	-
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1.287.055.200	1.287.055.200	-
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	164.996.000	164.996.000	-
5.03.02.2.01.08	Facilitasi Lembaga Profesi ASN	135.708.379	135.708.379	-
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	272.469.850	272.469.850	-
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	155.687.950	155.687.950	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.407.153.379	1.407.153.379	-
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	226.194.000	226.194.000	-
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	522.434.429	522.434.429	-
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	658.524.950	658.524.950	-
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	508.904.150	508.904.150	-
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	321.081.550	321.081.550	-
5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	80.355.200	80.355.200	-
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	107.467.400	107.467.400	-
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	968.448.050	968.448.050	-
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	183.833.250	183.833.250	-
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	270.000.000	270.000.000	-
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	224.457.650	224.457.650	-
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	233.057.150	233.057.150	-
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	57.100.000	57.100.000	-
05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.880.891.179	1.880.891.179	-
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.880.891.179	1.880.891.179	-
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.880.891.179	1.880.891.179	-
05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.880.891.179	1.880.891.179	-
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	686.233.279	686.233.279	-
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	686.233.279	686.233.279	-
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.194.657.900	1.194.657.900	-
5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.194.657.900	1.194.657.900	-
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.415.995.975	2.415.995.975	-
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.415.995.975	2.415.995.975	-
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.415.995.975	2.415.995.975	-
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.415.995.975	2.415.995.975	-
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	668.254.900	668.254.900	-
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	560.104.875	560.104.875	-
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	108.150.025	108.150.025	-
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	689.786.300	689.786.300	-
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	305.463.225	305.463.225	-
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	258.326.050	258.326.050	-
5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	125.997.025	125.997.025	-
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	536.479.700	536.479.700	-
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	211.244.225	211.244.225	-
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	117.721.425	117.721.425	-
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	207.514.050	207.514.050	-
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	521.475.075	521.475.075	-
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	339.761.075	339.761.075	-
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	181.714.000	181.714.000	-
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			-
06.01	INSPEKTORAT DAERAH	17.714.591.052	20.489.954.142	2.775.363.090
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	17.714.591.052	20.489.954.142	2.775.363.090
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	17.714.591.052	20.489.954.142	2.775.363.090
06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.399.025.187	17.197.852.354	2.798.827.167
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.286.000	28.286.000	-
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.166.000	9.166.000	-
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.780.000	4.780.000	-
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.780.000	4.780.000	-
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.780.000	4.780.000	-
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.780.000	4.780.000	-
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.259.370.187	16.028.810.254	2.769.440.067
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.254.490.187	16.023.930.254	2.769.440.067
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.640.000	2.640.000	-
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.240.000	2.240.000	-
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.043.780.000	1.048.976.800	5.196.800
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.171.300	134.171.300	-
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	81.037.100	81.037.100	-
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	519.170.600	524.367.400	5.196.800
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	147.709.000	147.709.000	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.860.000	16.860.000	-
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.832.000	144.832.000	-
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.689.000	49.689.000	-
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	-
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.689.000	45.689.000	-
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.900.000	42.090.300	24.190.300
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.900.000	42.090.300	24.190.300
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.102.267.965	2.078.803.888	- 23.464.077
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.796.212.965	1.772.748.888	- 23.464.077
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	81.300.000	81.300.000	-
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	726.655.965	764.395.888	37.739.923
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	112.411.000	71.611.000	- 40.800.000
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	84.036.000	63.636.000	- 20.400.000
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	296.250.000	296.250.000	-
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	495.560.000	495.556.000	- 4.000
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	306.055.000	306.055.000	-
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	135.870.000	135.870.000	-
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	170.185.000	170.185.000	-
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.213.297.900	1.213.297.900	-
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	948.219.900	948.219.900	-
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	596.292.900	596.292.900	-
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	351.927.000	351.927.000	-
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	265.078.000	265.078.000	-
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	95.018.000	95.018.000	-
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	28.824.000	28.824.000	-
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	43.068.000	43.068.000	-
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	98.168.000	98.168.000	-
7	UNSUR KEWILAYAHAN			-
07.01	KECAMATAN	86.117.111.766	94.316.688.670	8.199.576.904
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Batujajar	4.763.361.554	5.544.738.277	781.376.723
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Batujajar	4.763.361.554	5.544.738.277	781.376.723
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.871.900.380	3.653.277.103	781.376.723
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.605.000	44.605.000	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.325.000	8.325.000	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.300.000	1.300.000	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.300.000	1.300.000	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.300.000	1.300.000	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.300.000	1.300.000	-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.080.000	31.080.000	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.575.514.392	3.343.391.115	767.876.723
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.539.009.213	3.306.885.936	767.876.723
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.549.000	4.549.000	-
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.600.000	2.600.000	-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	29.356.179	29.356.179	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.950.000	22.950.000	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.950.000	22.950.000	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.172.600	176.672.600	13.500.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.966.700	46.966.700	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.705.900	105.205.900	13.500.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.500.000	24.500.000	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.666.000	3.666.000	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.666.000	3.666.000	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.992.388	61.992.388	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.350.000	35.350.000	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.642.388	26.642.388	-
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	255.261.837	255.261.837	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	57.401.900	57.401.900	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	57.401.900	57.401.900	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	152.759.937	152.759.937	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	152.759.937	152.759.937	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	45.100.000	45.100.000	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	45.100.000	45.100.000	-
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.177.154.937	1.177.154.937	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	288.194.937	288.194.937	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	41.050.000	41.050.000	-
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	67.427.300	67.427.300	-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	179.717.637	179.717.637	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	888.960.000	888.960.000	-
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	888.960.000	888.960.000	-
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	350.520.000	350.520.000	-
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	350.520.000	350.520.000	-
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	350.520.000	350.520.000	-
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	108.524.400	108.524.400	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	108.524.400	108.524.400	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	61.074.400	61.074.400	-
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	47.450.000	47.450.000	-
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Cipeundeuy	5.252.225.189	5.461.351.161	209.125.972
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Cipeundeuy	5.252.225.189	5.461.351.161	209.125.972
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.724.951.557	2.934.077.529	209.125.972
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.550.800	24.550.800	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.309.800	10.309.800	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.999.700	1.999.700	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.999.800	1.999.800	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.998.600	1.998.600	-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.242.900	6.242.900	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.480.776.387	2.668.902.359	188.125.972
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.416.972.787	2.605.098.759	188.125.972
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	63.803.600	63.803.600	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	-
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25.000.000	25.000.000	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.281.700	152.281.700	21.000.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.398.800	3.398.800	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.372.700	35.372.700	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.500.000	26.500.000	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.504.000	44.504.000	21.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.346.200	8.346.200	-
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.160.000	34.160.000	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.342.670	63.342.670	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.350.000	33.350.000	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.992.670	29.992.670	-
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	293.894.737	293.894.737	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	115.903.250	115.903.250	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	115.903.250	115.903.250	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	86.518.237	86.518.237	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	86.518.237	86.518.237	-
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	33.079.650	33.079.650	-
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	33.079.650	33.079.650	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	58.393.600	58.393.600	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	58.393.600	58.393.600	-
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	178.556.758	178.556.758	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	178.556.758	178.556.758	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	64.375.000	64.375.000	-
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	30.452.000	30.452.000	-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83.729.758	83.729.758	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	695.695.779	695.695.779	-
7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	695.695.779	695.695.779	-
7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Permdang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	695.695.779	695.695.779	-
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.359.126.358	1.359.126.358	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.359.126.358	1.359.126.358	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	153.266.358	153.266.358	-
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.205.860.000	1.205.860.000	-
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Gununghalu	5.106.331.679	5.461.714.738	355.383.059
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Gununghalu	5.106.331.679	5.461.714.738	355.383.059
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.666.854.089	3.022.237.148	355.383.059
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.720.000	36.720.000	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.400.000	26.400.000	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.560.000	1.560.000	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.560.000	1.560.000	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.560.000	1.560.000	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.560.000	1.560.000	-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.080.000	4.080.000	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.244.814.243	2.583.697.302	338.883.059
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.237.814.243	2.576.697.302	338.883.059
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.750.000	2.750.000	-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.250.000	4.250.000	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126.042.600	126.042.600	-
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	18.000.000	18.000.000	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.800.000	40.800.000	-
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	16.629.800	16.629.800	-
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.612.800	50.612.800	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.788.208	125.288.208	16.500.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.980.608	4.980.608	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.847.900	28.847.900	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.938.700	5.938.700	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.499.900	67.999.900	16.500.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.868.600	4.868.600	-
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.277.500	1.277.500	-
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.375.000	11.375.000	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.477.500	40.477.500	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	40.477.500	40.477.500	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.306.300	2.306.300	-
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.306.300	2.306.300	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.705.238	107.705.238	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.140.000	86.140.000	-
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.565.238	21.565.238	-
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	209.841.995	209.841.995	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.670.000	12.670.000	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.670.000	12.670.000	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	146.975.895	146.975.895	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	146.975.895	146.975.895	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50.196.100	50.196.100	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50.196.100	50.196.100	-
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	303.601.600	303.601.600	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	303.601.600	303.601.600	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	65.874.600	65.874.600	-
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	82.251.200	82.251.200	-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	155.475.800	155.475.800	-
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	492.345.537	492.345.537	-
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	492.345.537	492.345.537	-
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	492.345.537	492.345.537	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.433.688.458	1.433.688.458	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.433.688.458	1.433.688.458	-
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19.453.200	19.453.200	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.096.200	13.096.200	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.656.400	14.656.400	-
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.370.000	8.370.000	-
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	9.576.400	9.576.400	-
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.368.536.258	1.368.536.258	-
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Padalarang	6.240.581.425	6.592.983.487	352.402.062
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Padalarang	6.240.581.425	6.592.983.487	352.402.062
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.310.658.209	3.663.060.271	352.402.062
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	181.480.079	181.480.079	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.224.300	139.224.300	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.500.000	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000	2.500.000	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000	2.000.000	-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.755.779	30.755.779	-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.786.952.701	3.116.854.763	329.902.062
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.721.281.743	3.051.183.805	329.902.062
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	2.500.000	-
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.000.000	1.000.000	-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	62.170.958	62.170.958	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101.511.958	101.511.958	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35.000.000	35.000.000	-
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	66.511.958	66.511.958	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.394.800	139.894.800	22.500.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.590.400	3.590.400	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.883.100	18.883.100	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.997.800	4.997.800	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.500.000	42.000.000	22.500.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	2.000.000	-
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.523.500	1.523.500	-
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.950.000	61.950.000	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.950.000	4.950.000	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71.819.800	71.819.800	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	71.819.800	71.819.800	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.350.000	2.350.000	-
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.350.000	2.350.000	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.148.871	49.148.871	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.150.000	39.150.000	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.998.871	9.998.871	-
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	264.890.300	264.890.300	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	101.827.950	101.827.950	-
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.000.000	15.000.000	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	86.827.950	86.827.950	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	94.435.900	94.435.900	-
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	10.100.000	10.100.000	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84.335.900	84.335.900	-
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.000.000	5.000.000	-
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.000.000	5.000.000	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	63.626.450	63.626.450	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	63.626.450	63.626.450	-
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	228.325.479	228.325.479	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	228.325.479	228.325.479	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.984.000	34.984.000	-
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	54.980.000	54.980.000	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	138.361.479	138.361.479	-
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	506.775.979	506.775.979	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	41.865.979	41.865.979	-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.365.979	35.365.979	-
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.500.000	6.500.000	-
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	464.910.000	464.910.000	-
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	464.910.000	464.910.000	-
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.929.931.458	1.929.931.458	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.929.931.458	1.929.931.458	-
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.000.000	5.000.000	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36.565.879	36.565.879	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.084.600	6.084.600	-
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	38.315.779	38.315.779	-
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.843.965.200	1.843.965.200	-
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Lembang	7.386.261.861	7.938.233.057	551.971.196
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Lembang	7.386.261.861	7.938.233.057	551.971.196
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.893.527.445	4.445.498.641	551.971.196
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.548.000	27.548.000	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.768.000	7.768.000	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.956.000	3.956.000	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.956.000	3.956.000	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.956.000	3.956.000	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.956.000	3.956.000	-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.956.000	3.956.000	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.288.290.695	3.828.261.891	539.971.196
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.229.790.695	3.769.761.891	539.971.196
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	58.500.000	58.500.000	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91.130.000	91.130.000	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	61.850.000	61.850.000	-
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	29.280.000	29.280.000	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.331.500	180.331.500	12.000.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.456.500	7.456.500	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.662.100	41.662.100	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.112.900	108.112.900	12.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.100.000	23.100.000	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.566.000	67.566.000	-
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.958.000	15.958.000	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.608.000	51.608.000	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.661.250	250.661.250	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.396.400	39.396.400	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211.264.850	211.264.850	-
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	423.518.216	423.518.216	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	166.945.700	166.945.700	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	166.945.700	166.945.700	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	238.372.516	238.372.516	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	238.372.516	238.372.516	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	18.200.000	18.200.000	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	18.200.000	18.200.000	-
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.252.616.200	2.252.616.200	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.202.480.200	2.202.480.200	-
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	99.999.800	99.999.800	-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.102.480.400	2.102.480.400	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	50.136.000	50.136.000	-
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50.136.000	50.136.000	-
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	753.900.000	753.900.000	-
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	753.900.000	753.900.000	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	753.900.000	753.900.000	-
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	62.700.000	62.700.000	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	62.700.000	62.700.000	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	62.700.000	62.700.000	-
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sindangkerta	4.983.611.307	5.613.033.804	629.422.497
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sindangkerta	4.983.611.307	5.613.033.804	629.422.497
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.495.053.535	3.124.476.032	629.422.497
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.905.000	27.905.000	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.525.000	9.525.000	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.430.000	2.430.000	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.430.000	2.430.000	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.510.000	3.510.000	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.510.000	3.510.000	-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000	6.500.000	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.091.106.858	2.702.529.355	611.422.497
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.006.215.558	2.617.638.055	611.422.497
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.775.000	8.775.000	-
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.120.000	3.120.000	-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72.996.300	72.996.300	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.035.550	90.035.550	-
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	21.162.600	21.162.600	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.160.950	24.160.950	-
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	44.712.000	44.712.000	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.177.022	204.177.022	18.000.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.022.422	5.022.422	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.581.400	83.581.400	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.201.800	5.201.800	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.108.400	62.108.400	18.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.263.000	18.263.000	-
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	30.000.000	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.993.000	24.993.000	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.993.000	24.993.000	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.836.105	74.836.105	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.830.000	47.830.000	-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.006.300	7.006.300	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.999.805	19.999.805	-
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	372.224.237	372.224.237	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	54.989.800	54.989.800	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	54.989.800	54.989.800	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	154.591.137	154.591.137	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	154.591.137	154.591.137	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	162.643.300	162.643.300	-
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	59.149.600	59.149.600	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	103.493.700	103.493.700	-
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	247.717.598	247.717.598	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	247.717.598	247.717.598	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.015.000	34.015.000	-
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	75.000.000	75.000.000	-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	138.702.598	138.702.598	-
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	690.251.137	690.251.137	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.284.000	33.284.000	-
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	33.284.000	33.284.000	-
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	656.967.137	656.967.137	-
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	656.967.137	656.967.137	-
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.178.364.800	1.178.364.800	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.178.364.800	1.178.364.800	-
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20.167.200	20.167.200	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	36.367.200	36.367.200	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26.710.400	26.710.400	-
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.095.120.000	1.095.120.000	-
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Cisarua	4.936.431.332	5.661.217.503	724.786.171
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Cisarua	4.936.431.332	5.661.217.503	724.786.171
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.988.357.374	3.713.143.545	724.786.171
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.200.000	18.200.000	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.200.000	5.200.000	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.600.000	2.600.000	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.600.000	2.600.000	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.300.000	1.300.000	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.300.000	1.300.000	-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.200.000	5.200.000	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.633.511.101	3.343.297.272	709.786.171
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.577.166.572	3.286.952.743	709.786.171
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	56.344.529	56.344.529	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.330.358	87.330.358	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.500.000	25.500.000	-
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	61.830.358	61.830.358	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.989.000	147.062.600	15.073.600
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.075.500	48.075.500	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.009.900	10.009.900	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.498.200	45.498.200	15.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.405.400	7.479.000	73.600
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.000.000	36.000.000	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.355.400	17.281.800	- 73.600
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	17.355.400	17.281.800	- 73.600
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.340.800	27.340.800	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.340.800	15.340.800	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000	12.000.000	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.630.715	72.630.715	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.050.000	56.050.000	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.580.715	16.580.715	-
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	358.828.058	358.828.058	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	121.208.600	121.208.600	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	121.208.600	121.208.600	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	177.107.858	177.107.858	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	177.107.858	177.107.858	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60.511.600	60.511.600	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60.511.600	60.511.600	-
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	285.730.300	285.730.300	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	285.730.300	285.730.300	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	83.424.400	83.424.400	-
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	81.058.300	81.058.300	-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	121.247.600	121.247.600	-
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	390.600.000	390.600.000	-
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	390.600.000	390.600.000	-
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	390.600.000	390.600.000	-
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	912.915.600	912.915.600	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	912.915.600	912.915.600	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	64.135.600	64.135.600	-
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	848.780.000	848.780.000	-
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Ngamprah	5.755.338.338	6.332.765.149	577.426.811
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Ngamprah	5.755.338.338	6.332.765.149	577.426.811
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.914.989.250	3.548.067.961	633.078.711

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.005.000	22.005.000	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.400.000	5.400.000	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.050.000	4.050.000	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.455.000	4.455.000	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.050.000	4.050.000	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.050.000	4.050.000	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.553.068.464	3.118.445.375	565.376.911
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.504.206.685	3.057.633.596	553.426.911
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48.861.779	60.811.779	11.950.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.849.200	36.849.200	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.849.200	36.849.200	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.658.600	238.360.400	67.701.800
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.750.000	98.764.800	16.014.800
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.908.600	139.595.600	51.687.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.041.672	80.041.672	-
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80.041.672	80.041.672	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.366.314	52.366.314	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.600.000	2.600.000	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.766.314	49.766.314	-
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	465.062.230	409.410.330	- 55.651.900
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	211.838.500	156.186.600	- 55.651.900
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	211.838.500	156.186.600	- 55.651.900
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	117.028.430	117.028.430	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	117.028.430	117.028.430	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	136.195.300	136.195.300	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	136.195.300	136.195.300	-
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	156.981.579	156.981.579	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	156.981.579	156.981.579	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.222.600	25.222.600	-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	131.758.979	131.758.979	-
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	498.000.000	498.000.000	-
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	498.000.000	498.000.000	-
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	498.000.000	498.000.000	-
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.720.305.279	1.720.305.279	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.720.305.279	1.720.305.279	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.616.491.400	1.616.491.400	-
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	103.813.879	103.813.879	-
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Cikalongwetan	5.864.694.853	7.144.063.200	1.279.368.347
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Cikalongwetan	5.864.694.853	7.144.063.200	1.279.368.347
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.856.846.771	4.136.215.118	1.279.368.347
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.103.500	76.103.500	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.006.300	35.006.300	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.913.000	5.913.000	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.913.000	5.913.000	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.584.000	5.584.000	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.584.000	5.584.000	-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.524.000	6.524.000	-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.579.200	11.579.200	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.378.644.814	3.637.013.161	1.258.368.347
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.329.750.935	3.588.119.282	1.258.368.347
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48.893.879	48.893.879	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84.385.179	84.385.179	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.200.000	46.200.000	-
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	38.185.179	38.185.179	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.455.100	185.455.100	21.000.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.283.700	5.283.700	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.906.800	74.906.800	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.925.100	18.925.100	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.924.000	43.924.000	21.000.000

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.315.500	13.315.500	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.100.000	29.100.000	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.095.179	42.095.179	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.398.400	3.398.400	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.696.779	38.696.779	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.162.999	111.162.999	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.310.000	87.310.000	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.852.999	23.852.999	-
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	428.870.058	428.870.058	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	222.206.500	222.206.500	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	222.206.500	222.206.500	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	127.244.258	127.244.258	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	127.244.258	127.244.258	-
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	7.500.000	7.500.000	-
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	7.500.000	7.500.000	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	71.919.300	71.919.300	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	71.919.300	71.919.300	-
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	191.673.958	191.673.958	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	191.673.958	191.673.958	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	88.319.600	88.319.600	-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	103.354.358	103.354.358	-
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	701.065.337	701.065.337	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.719.800	20.719.800	-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.719.800	20.719.800	-
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	680.345.537	680.345.537	-
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	680.345.537	680.345.537	-
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.686.238.729	1.686.238.729	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.686.238.729	1.686.238.729	-
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10.993.000	10.993.000	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17.409.800	17.409.800	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.409.800	17.409.800	-
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10.993.000	10.993.000	-
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.629.433.129	1.629.433.129	-
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Cipongkor	4.863.055.706	5.195.568.101	332.512.395
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Cipongkor	4.863.055.706	5.195.568.101	332.512.395
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.421.778.490	2.754.290.885	332.512.395
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.347.600	59.347.600	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.212.600	41.212.600	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.030.000	4.030.000	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.030.000	4.030.000	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.015.000	2.015.000	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.015.000	2.015.000	-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.015.000	2.015.000	-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.030.000	4.030.000	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.143.012.818	2.460.525.213	317.512.395
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.103.815.218	2.421.327.613	317.512.395
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.030.000	4.030.000	-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35.167.600	35.167.600	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.921.572	61.921.572	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000	25.000.000	-
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	36.921.572	36.921.572	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.879.300	139.879.300	15.000.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.236.600	1.236.600	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.599.800	47.599.800	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.844.700	3.844.700	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.005.800	50.005.800	15.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.692.400	2.692.400	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.500.000	-
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.000.000	33.000.000	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000	12.000.000	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000	12.000.000	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.617.200	20.617.200	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.617.200	20.617.200	-
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	412.840.216	412.840.216	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	138.654.900	138.654.900	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	138.654.900	138.654.900	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	211.135.116	211.135.116	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	211.135.116	211.135.116	-
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	8.159.800	8.159.800	-
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	8.159.800	8.159.800	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	54.890.400	54.890.400	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	54.890.400	54.890.400	-
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	269.776.600	269.776.600	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	269.776.600	269.776.600	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	75.019.000	75.019.000	-
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	84.124.400	84.124.400	-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	110.633.200	110.633.200	-
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	642.805.200	642.805.200	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36.805.200	36.805.200	-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.275.400	21.275.400	-
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.529.800	15.529.800	-
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	606.000.000	606.000.000	-
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	606.000.000	606.000.000	-
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.115.855.200	1.115.855.200	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.115.855.200	1.115.855.200	-
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	17.043.600	17.043.600	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	34.004.000	34.004.000	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36.564.000	36.564.000	-
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	24.843.600	24.843.600	-
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.003.400.000	1.003.400.000	-
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Saguling	3.828.017.196	4.373.175.070	545.157.874
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Saguling	3.828.017.196	4.373.175.070	545.157.874
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.309.207.585	2.854.365.459	545.157.874
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.691.900	19.691.900	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.250.000	3.250.000	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.250.000	3.250.000	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.250.000	3.250.000	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.250.000	3.250.000	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.250.000	3.250.000	-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.441.900	3.441.900	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.980.743.493	2.506.401.367	525.657.874
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.936.522.314	2.462.180.188	525.657.874
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.925.000	2.925.000	-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	41.296.179	41.296.179	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.250.000	21.250.000	-
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8.750.000	8.750.000	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.500.000	12.500.000	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.642.900	203.142.900	19.500.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.218.400	6.218.400	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.720.900	47.720.900	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.945.800	4.945.800	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.555.200	102.055.200	19.500.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.702.600	16.702.600	-
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.500.000	25.500.000	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.028.900	39.028.900	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	39.028.900	39.028.900	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.995.092	19.995.092	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.409.792	14.409.792	-
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.585.300	5.585.300	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.855.300	44.855.300	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.832.000	24.832.000	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.023.300	20.023.300	-
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	325.981.558	325.981.558	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	130.281.100	130.281.100	-
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	19.500.000	19.500.000	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	110.781.100	110.781.100	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	148.789.458	148.789.458	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	148.789.458	148.789.458	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	46.911.000	46.911.000	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	46.911.000	46.911.000	-
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	751.316.337	751.316.337	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	751.316.337	751.316.337	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	51.511.000	51.511.000	-
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	75.450.000	75.450.000	-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	624.355.337	624.355.337	-
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	340.683.758	340.683.758	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	92.283.758	92.283.758	-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	92.283.758	92.283.758	-
7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	248.400.000	248.400.000	-
7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Permdang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	248.400.000	248.400.000	-
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100.827.958	100.827.958	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.827.958	100.827.958	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.605.200	14.605.200	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	66.742.358	66.742.358	-
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	19.480.400	19.480.400	-
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Cililin	5.425.018.395	5.558.505.871	133.487.476
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Cililin	5.425.018.395	5.558.505.871	133.487.476
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.991.621.500	3.125.108.976	133.487.476
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.170.000	16.170.000	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.170.000	1.170.000	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	3.000.000	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000	3.000.000	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	3.000.000	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.000.000	3.000.000	-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.457.493.241	2.568.480.717	110.987.476
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.421.597.062	2.532.584.538	110.987.476
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.000.000	3.000.000	-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	32.896.179	32.896.179	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	215.110.837	215.110.837	-
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	24.000.000	24.000.000	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.000.000	22.000.000	-
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	154.113.237	154.113.237	-
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14.997.600	14.997.600	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.552.092	198.052.092	22.500.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.010.692	5.010.692	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.771.400	82.771.400	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.700	7.000.700	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.026.600	62.526.600	22.500.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.024.700	9.024.700	-
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.718.000	31.718.000	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.640.000	12.640.000	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.640.000	5.640.000	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.000.000	7.000.000	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.655.330	114.655.330	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.650.000	54.650.000	-
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.005.330	60.005.330	-
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	339.757.637	339.757.637	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	115.876.400	115.876.400	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	115.876.400	115.876.400	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	155.288.137	155.288.137	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	155.288.137	155.288.137	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	68.593.100	68.593.100	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	68.593.100	68.593.100	-
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	202.083.400	202.083.400	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	169.264.800	169.264.800	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.287.200	34.287.200	-
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	79.977.700	79.977.700	-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	54.999.900	54.999.900	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	32.818.600	32.818.600	-
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	32.818.600	32.818.600	-
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	573.692.358	573.692.358	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.100.000	35.100.000	-
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	35.100.000	35.100.000	-
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	538.592.358	538.592.358	-
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	538.592.358	538.592.358	-
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.317.863.500	1.317.863.500	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.317.863.500	1.317.863.500	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35.185.200	35.185.200	-
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa	34.780.400	34.780.400	-
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.247.897.900	1.247.897.900	-
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Parongpong	5.171.064.625	5.918.677.236	747.612.611
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Parongpong	5.171.064.625	5.918.677.236	747.612.611
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.234.009.435	3.981.622.046	747.612.611
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.528.000	42.528.000	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.843.000	17.843.000	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.937.000	4.937.000	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.937.000	4.937.000	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.937.000	4.937.000	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.937.000	4.937.000	-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.937.000	4.937.000	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.778.015.895	3.504.628.506	726.612.611
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.768.091.895	3.494.704.506	726.612.611
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.537.000	5.537.000	-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.387.000	4.387.000	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.560.000	62.560.000	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	54.400.000	54.400.000	-
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	8.160.000	8.160.000	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	281.337.500	302.337.500	21.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.448.500	182.448.500	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.889.000	83.889.000	21.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.000.000	36.000.000	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.013.200	12.013.200	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.013.200	12.013.200	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.554.840	57.554.840	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.950.000	35.950.000	-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.968.500	11.968.500	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.636.340	9.636.340	-
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	479.163.590	479.163.590	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	61.900.000	61.900.000	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	61.900.000	61.900.000	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	405.863.590	405.863.590	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	405.863.590	405.863.590	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	11.400.000	11.400.000	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11.400.000	11.400.000	-
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.105.651.600	1.105.651.600	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.105.651.600	1.105.651.600	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.750.000	19.750.000	-
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	87.421.600	87.421.600	-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	998.480.000	998.480.000	-
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	340.340.000	340.340.000	-
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	340.340.000	340.340.000	-
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	340.340.000	340.340.000	-
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.900.000	11.900.000	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.900.000	11.900.000	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.900.000	11.900.000	-
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Cipatat	5.910.905.996	5.753.775.961	- 157.130.035
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Cipatat	5.910.905.996	5.753.775.961	- 157.130.035
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.987.377.937	2.830.247.902	- 157.130.035
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.411.008	118.411.008	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.391.358	70.391.358	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	33.145.250	33.145.250	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.317.800	4.317.800	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.607.300	3.607.300	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.767.300	3.767.300	-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.182.000	3.182.000	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.651.932.885	2.473.802.850	- 178.130.035
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.648.140.085	2.470.010.050	- 178.130.035
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.792.800	3.792.800	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.600.000	32.600.000	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.600.000	32.600.000	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.733.000	81.733.000	21.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.608.700	24.608.700	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.907.600	38.907.600	21.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.241.700	2.241.700	-
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.975.000	15.975.000	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.701.044	123.701.044	-
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	123.701.044	123.701.044	-
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	292.716.916	292.716.916	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	83.305.400	83.305.400	-
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.543.600	22.543.600	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.761.800	60.761.800	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	117.850.937	117.850.937	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	117.850.937	117.850.937	-
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	31.185.100	31.185.100	-
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	31.185.100	31.185.100	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60.375.479	60.375.479	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60.375.479	60.375.479	-
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	182.193.337	182.193.337	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	182.193.337	182.193.337	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	37.542.200	37.542.200	-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	144.651.137	144.651.137	-
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	597.731.458	597.731.458	-
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	597.731.458	597.731.458	-
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	597.731.458	597.731.458	-
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.850.886.348	1.850.886.348	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.850.886.348	1.850.886.348	-
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18.156.900	18.156.900	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.776.900	10.776.900	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	86.363.348	86.363.348	-
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15.989.200	15.989.200	-
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.719.600.000	1.719.600.000	-
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Cihampelas	5.604.004.448	6.230.694.269	626.689.821
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Cihampelas	5.604.004.448	6.230.694.269	626.689.821
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.120.383.266	3.747.073.087	626.689.821
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	13.000.000	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.600.000	2.600.000	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.600.000	2.600.000	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.600.000	2.600.000	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.600.000	2.600.000	-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.600.000	2.600.000	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.780.590.646	3.387.780.467	607.189.821
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.780.590.646	3.387.780.467	607.189.821
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.000.000	33.000.000	-
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	33.000.000	33.000.000	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.746.700	303.246.700	19.500.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.695.700	1.695.700	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.004.700	104.004.700	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	131.246.300	150.746.300	19.500.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.800.000	46.800.000	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.045.920	10.045.920	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.600.000	2.600.000	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.445.920	7.445.920	-
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	619.471.182	619.471.182	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	448.934.924	448.934.924	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	448.934.924	448.934.924	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	148.986.258	148.986.258	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	148.986.258	148.986.258	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	21.550.000	21.550.000	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21.550.000	21.550.000	-
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	215.500.000	215.500.000	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	215.500.000	215.500.000	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	43.100.000	43.100.000	-
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	129.300.000	129.300.000	-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.100.000	43.100.000	-
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	461.950.000	461.950.000	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	461.950.000	461.950.000	-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	461.950.000	461.950.000	-
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.186.700.000	1.186.700.000	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.186.700.000	1.186.700.000	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21.550.000	21.550.000	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21.550.000	21.550.000	-
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.143.600.000	1.143.600.000	-
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Rongga	5.026.207.862	5.536.191.786	509.983.924

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Rongga	5.026.207.862	5.536.191.786	509.983.924
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.662.032.546	3.172.016.470	509.983.924
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.700.000	33.700.000	-
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.780.000	8.780.000	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.040.000	5.040.000	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.220.000	3.220.000	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.040.000	5.040.000	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.220.000	3.220.000	-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.400.000	8.400.000	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.137.548.146	2.635.532.070	497.983.924
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.118.963.146	2.616.947.070	497.983.924
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.500.000	7.500.000	-
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.695.000	3.695.000	-
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.390.000	7.390.000	-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67.351.600	67.351.600	-
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.508.000	36.508.000	-
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	30.843.600	30.843.600	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.870.600	217.870.600	12.000.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.243.800	4.243.800	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.559.400	39.559.400	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.708.700	11.708.700	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.611.700	129.611.700	12.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.634.200	23.634.200	-
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.312.800	1.312.800	-
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.900.000	3.900.000	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.900.000	3.900.000	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.348.900	55.348.900	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	55.348.900	55.348.900	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.183.500	17.183.500	-
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.697.900	10.697.900	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.485.600	6.485.600	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.029.800	145.029.800	-
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.860.000	93.860.000	-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.995.800	10.995.800	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.174.000	40.174.000	-
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	277.168.337	277.168.337	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.890.000	24.890.000	-
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.120.000	12.120.000	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.770.000	12.770.000	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	165.381.437	165.381.437	-
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12.280.000	12.280.000	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	153.101.437	153.101.437	-
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	3.240.000	3.240.000	-
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3.240.000	3.240.000	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	83.656.900	83.656.900	-
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.533.600	6.533.600	-
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	6.533.600	6.533.600	-
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	70.589.700	70.589.700	-
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	393.962.300	393.962.300	-
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	393.962.300	393.962.300	-
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	52.573.700	52.573.700	-
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100.000.000	100.000.000	-
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	241.388.600	241.388.600	-
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	471.331.550	471.331.550	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22.153.600	22.153.600	-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.120.000	6.120.000	-
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.033.600	16.033.600	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	449.177.950	449.177.950	-
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	449.177.950	449.177.950	-
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.221.713.129	1.221.713.129	-
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.221.713.129	1.221.713.129	-
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.800.000	8.800.000	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17.600.000	17.600.000	-
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.360.000	3.360.000	-
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.200.000	7.200.000	-
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.184.753.129	1.184.753.129	-
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			-
08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.021.950.155	19.637.336.709	615.386.554
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.021.950.155	19.637.336.709	615.386.554
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.021.950.155	19.637.336.709	615.386.554
08.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.534.593.952	6.000.341.709	1.465.747.757
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.461.500	138.813.200	80.351.700
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.797.000	109.148.700	80.351.700
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.932.900	2.932.900	-
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.932.900	2.932.900	-
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.432.900	10.432.900	-
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.432.900	10.432.900	-
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.932.900	2.932.900	-
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.653.429.228	3.798.267.785	1.144.838.557
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.633.015.328	3.777.853.885	1.144.838.557
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.606.400	4.606.400	-
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.807.500	15.807.500	-
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	574.614.944	701.814.944	127.200.000
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46.200.000	37.950.000	- 8.250.000
8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	528.414.944	663.864.944	135.450.000
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.165.219.000	1.122.589.100	- 42.629.900
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	224.512.900	172.683.000	- 51.829.900
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.854.600	11.854.600	-
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.510.900	96.510.900	18.000.000
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.840.600	4.040.600	- 8.800.000
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	138.200.000	138.200.000	-
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	362.700.000	362.700.000	-
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	336.600.000	336.600.000	-
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.025.200	13.812.600	4.787.400
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.025.200	13.812.600	4.787.400
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.844.080	225.044.080	151.200.000
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.800.000	161.000.000	151.200.000
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.044.080	64.044.080	-
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.181.006.800	1.806.026.800	625.020.000
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.181.006.800	1.806.026.800	625.020.000
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	196.309.400	578.149.400	381.840.000
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	36.983.000	36.983.000	-
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	56.480.000	140.430.000	83.950.000
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	849.634.400	849.634.400	-
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	41.600.000	200.830.000	159.230.000
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.441.103.600	5.542.953.600	101.850.000
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	5.441.103.600	5.542.953.600	101.850.000

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.710.956.300	4.710.956.300	-
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	29.050.000	29.050.000	-
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	407.611.200	407.611.200	-
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	204.064.900	254.214.900	50.150.000
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	89.421.200	141.121.200	51.700.000
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	828.745.100	1.124.301.300	295.556.200
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	828.745.100	1.124.301.300	295.556.200
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	53.724.300	126.924.300	73.200.000
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	280.000.000	280.000.000	-
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	145.174.600	145.174.600	-
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300.843.800	523.200.000	222.356.200
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	49.002.400	49.002.400	-
08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	982.213.300	982.213.300	-
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	982.213.300	982.213.300	-
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	71.756.000	71.756.000	-
8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	265.160.000	265.160.000	-
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500.000.000	500.000.000	-
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	95.233.000	95.233.000	-
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50.064.300	50.064.300	-
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	6.054.287.403	4.181.500.000	1.872.787.403
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	6.054.287.403	4.181.500.000	1.872.787.403
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	136.000.000	138.150.000	2.150.000
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	52.099.600	77.400.000	25.300.400
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.872.882.803	405.225.000	2.467.657.803
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	1.668.445.000	1.668.445.000	-

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
	Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.324.860.000	1.892.280.000	567.420.000

3.3. Belanja Daerah

Belanja daerah penggunaannya untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Secara keseluruhan Belanja Daerah dalam Perubahan PPAS T.A 2022 diproyeksikan mengalami penambahan sebesar Rp242.955.695.201,00 atau naik 7,77 % dari semula sebesar Rp3.128.129.584.936,00 menjadi Rp3.371.085.280.137,00, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi, mengalami penambahan sebesar Rp132.305.045.580,00 atau naik 5,73% semula Rp2.308.435.452.701,00 menjadi Rp2.440.740.498.281,00.
- b. Belanja Modal, mengalami penambahan sebesar Rp102.979.408.350,00 atau naik 30,33% semula Rp339.552.543.734,00 menjadi Rp442.531.952.084,00.
- c. Belanja Tidak Terduga, mengalami pengurangan sebesar Rp6.776.336.279,00 atau turun 30,80% semula Rp22.000.000.000,00 menjadi Rp15.223.663.721,00.
- d. Belanja Transfer, mengalami penambahan sebesar Rp14.447.577.550,00 atau naik 3,15% semula sebesar Rp458.141.588.501,00 menjadi Rp472.589.166.051,00. Penambahan tersebut diperoleh dari Transfer Bantuan Keuangan saja, sedangkan Transfer Bagi Hasil Pendapatan tidak mengalami perubahan.

Tabel 4.2
Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Plafon Anggaran		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	
05.01	BELANJA OPERASI	2.308.435.452.701	2.440.740.498.281	132.305.045.580
05.01.01	Belanja Pegawai	1.165.883.665.312	1.261.884.281.353	96.000.616.041
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.021.345.223.063	1.055.686.387.147	34.341.164.084
05.01.03	Belanja Bunga	12.025.600.000	11.025.600.000	- 1.000.000.000
05.01.05	Belanja Hibah	98.978.464.326	98.518.649.781	- 459.814.545
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	10.202.500.000	13.625.580.000	3.423.080.000
05.02	BELANJA MODAL	339.552.543.734	442.531.952.084	102.979.408.350
05.02.01	Belanja Modal Tanah	1.440.935.850	1.440.935.850	-
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.240.402.081	97.514.933.053	24.274.530.972
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.547.094.230	82.628.452.277	5.081.358.047
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	181.689.420.621	245.040.817.212	63.351.396.591
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.084.897.985	13.468.200.635	9.383.302.650
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.549.792.967	2.438.613.057	888.820.090
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.000.000.000	15.223.663.721	- 6.776.336.279
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	22.000.000.000	15.223.663.721	- 6.776.336.279
05.04	BELANJA TRANSFER	458.141.588.501	472.589.166.051	14.447.577.550
05.04.01	Belanja Bagi Hasil	50.089.060.001	55.289.060.001	5.200.000.000
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	408.052.528.500	417.300.106.050	9.247.577.550
	TOTAL	3.128.129.584.936	3.371.085.280.137	242.955.695.201

3.4. Pembiayaan

Pembiayaan mengalami perubahan, baik dari sisi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengurangan penerimaan pembiayaan terjadi pada Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yaitu sebesar Rp105.919.584.890,00 atau turun 55,54% dari semula sebesar Rp190.712.820.661,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp84.793.235.771,00. Adapun untuk Penerimaan Pinjaman Daerah mengalami penambahan sebesar Rp54.163.275.345,00 atau naik 38,51 % dari semula sebesar Rp140.658.483.577,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp194.821.758.922,00.

Pengurangan Pengeluaran Pembiayaan terjadi pada pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo yaitu sebesar Rp.37.000.000.000,00 atau 34,51% semula dianggarkan 107.200.000.000,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp.70.200.000.000,00. Sedangkan untuk penyertaan modal tetap sebesar Rp. 10.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan.

Untuk lebih jelasnya mengenai pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan		Bertambah/ Berkurang	Dasar Hukum
		Sebelum	Sesudah		
6	PEMBIAYAAN				
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	331.371.304.238	279.614.994.693	-51.756.309.545	
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	190.712.820.661	84.793.235.771	-105.919.584.890	
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	140.658.483.577	194.821.758.922	54.163.275.345	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	331.371.304.238	279.614.994.693	-51.756.309.545	
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	117.200.000.000	80.200.000.000	-37.000.000.000	
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	0	
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	107.200.000.000	70.200.000.000	-37.000.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	117.200.000.000	80.200.000.000	-37.000.000.000	
	Pembiayaan Netto	214.171.304.238	199.414.994.693	-14.756.309.545	

IV. PENUTUP

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD TA 2022.

Pada Bab Ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Perubahan PPAS.

I. PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang.....1

 1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS.....3

 1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS 3

II.RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
.....9

 2.1. Rencana Pendapatan Daerah.....9

 2.1.1. Pendapatan Asli Daerah.....10

 2.1.2. Pendapatan Transfer 11

 2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 13

 2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah.....13

 Tabel 2.1 14

III. PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 15

 3.1. Perubahan Masing-masing Urusan Perangkat DAerah 15

 Tabel 3.1 17

 3.2. Perubahan PPAS Berdasarkan Program dan Kegiatan 23

 Tabel 3.2 24

 Tabel 3.3 32

 Tabel 3.4 52

 Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator
Kinerja 52

 Tabel 4.1 52

 3.3. Belanja Daerah.....305

 Tabel 4.2 306

 3.4. Pembiayaan 307

 Tabel 5.1 308

IV. PENUTUP.....309